

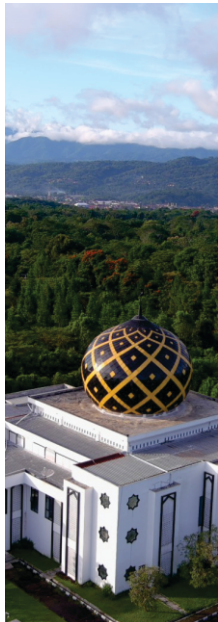


BUKU I

RANCANGAN AKHIR

RKPD 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
2023**





BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan menengah Daerah untuk periode Tahun 2024-2026, merupakan pedoman perencanaan pembangunan serta implementasi dari periode terakhir RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2025.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2024, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024; dan
- b. penjabaran dari RPJPD dan RPD 2024-2026 yang memuat:
 1. pendahuluan;
 2. gambaran umum kondisi Daerah;
 3. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 4. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 5. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 6. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan KUA, PPAS dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Bab I (satu) memuat tentang pendahuluan, terdiri atas:
 1. gambaran umum kondisi Daerah;
 2. kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan ekonomi Daerah;
 3. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 4. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 5. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Bab II (dua) memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas; dan
 - c. Bab III (tiga) memuat tentang penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 7-7-2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 7-7-2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-16
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-47
2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam kerangka RPJMD	II-51
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-80
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah	II-80
2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-85
2.3.3 Permasalahan Utama Pembangunan	II-99
2.3.4 Isu Strategis Pembangunan	II-100
2.4 Inovasi Daerah	II-101
2.4.1 Pelaksanaan Desa Pinunjul	II-101
2.4.2 Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)	II-103

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
---	-------

3.1.1	Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan 2022	III-3
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023-2024	III-13
3.1.3	Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah	III-18
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-25
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-29
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-30
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-35
3.2.5	Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	III-43
3.3	Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-44
3.4	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	III-50

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-3
4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-4
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	IV-10
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024	IV-15
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	IV-25
4.2.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-25
4.2.2	Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	IV-31

4.2.3	Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	IV-32
4.2.4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	IV-49

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2024.....	V-2
5.2	Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024	V-29
5.3	Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2023.....	V-35
5.4	Usulan Rencana Kegiatan Yang Bersumber Dari Apbd Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	V-38
5.5	Rencana Program Dan Kegiatan Kabupaten Kuningan Tahun 2024.....	V-42

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	VI-1
---	------

BAB VII PENUTUP

Penutup	VII-1
---------------	-------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024	I-14
Tabel 2.1	Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan ...	II-3
Tabel 2.2	Luasan Wilayah berdasarkan Topografi	II-4
Tabel 2.3	Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi Kabupaten Kuningan	II-6
Tabel 2.4	Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan Kabupaten Kuningan	II-8
Tabel 2.5	Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Kuningan	II-11
Tabel 2.6	Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Kabupaten Kuningan Tahun 2022	II-11
Tabel 2.7	Produksi Tanaman Pangan	II-12
Tabel 2.8	Jumlah Komoditas Ternak Kabupaten Kuningan	II-13
Tabel 2.9	Luasan Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Kuningan	II-16
Tabel 2.10	Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api Ciremai	II-18
Tabel 2.11	Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022	II-22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2022	II-22
Tabel 2.13	Indikator Umum Kesejahteraan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2022	II-23
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2022	II-25
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018–2022	II-25

Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018–2022	II-26
Tabel 2.17	Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023	II-28
Tabel 2.18	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-28
Tabel 2.19	Target dan Capaian Indikator Inflasi Kabupate Kuningan Tahun 2019-2023	II-28
Tabel 2.20	Perbandingan Inflasi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.21	Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Kabupate Kuningan Tahun 2019-2023	II-29
Tabel 2.22	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2022	II-30
Tabel 2.23	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022....	II-30
Tabel 2.24	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan	II-31
Tabel 2.25	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan	II-32
Tabel 2.26	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-33
Tabel 2.27	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-33
Tabel 2.28	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-34
Tabel 2.29	Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial	II-34
Tabel 2.30	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja.....	II-35
Tabel 2.31	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-35
Tabel 2.32	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan.....	II-36

Tabel 2.33	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan.....	II-36
Tabel 2.34	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup	II-36
Tabel 2.35	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-37
Tabel 2.36	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-37
Tabel 2.37	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-38
Tabel 2.38	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan	II-38
Tabel 2.39	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika	II-39
Tabel 2.40	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II-39
Tabel 2.41	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal	II-40
Tabel 2.42	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga.....	II-40
Tabel 2.43	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik	II-40
Tabel 2.44	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian	II-41
Tabel 2.45	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan	II-41
Tabel 2.46	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan	II-41
Tabel 2.47	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan.....	II-41
Tabel 2.48	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata	II-42

Tabel 2.49	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian	II-42
Tabel 2.50	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan.....	II-43
Tabel 2.51	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian	II-43
Tabel 2.52	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Transmigrasi	II-44
Tabel 2.53	Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan.....	II-44
Tabel 2.54	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan	II-44
Tabel 2.55	Kondisi Pelayanan Penunjang Uusan Aspek Keuangan	II-45
Tabel 2.56	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-45
Tabel 2.57	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan..	II-46
Tabel 2.58	Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan	II-46
Tabel 2.59	Kondisi Aspek Daya Saing Daerah.....	II-47
Tabel 2.60	Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2022	II-49
Tabel 2.61	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kab. Kuningan Tahun 2018 – 2023	II-52
Tabel 2.62	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2022	II-57
Tabel 2.63	Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-80
Tabel 2.64	Capaian Desa Pinunjul Sampai Dengan Tahun 2022.....	II-101
Tabel 3.1	Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022	III-3
Tabel 3.2	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	III-4

Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2022.....	III-5
Tabel 3.4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2022 (%)	III-5
Tabel 3.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2022 (juta rupiah).....	III-7
Tabel 3.6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2022 (juta rupiah).....	III-8
Tabel 3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.8	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.9	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	III-12
Tabel 3.10	Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2022	III-12
Tabel 3.11	Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi	III-13
Tabel 3.12	Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan	III-18
Tabel 3.13	Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2022	III-27
Tabel 3.14	Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2023-2024	III-27
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Tahun 2020-2022	III-31
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2024 Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.....	III-33
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.....	III-34
Tabel 3.18	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022	III-35
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023-2024 (Rupiah).....	III-36
Tabel 3.20	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 sesuai Kapasitas Keuangan Daerah.....	III-38
Tabel 3.21	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 sesuai Kebutuhan Daerah	III-39

Tabel 3.22	Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Dasar.....	III-46
Tabel 3.23	Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Keadaan Infrastruktur dan Utiliti Dasar.....	III-46
Tabel 3.24	Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sosial Dasar.....	III-47
Tabel 2.25	Kepuasan Masyarakat terhadap Dukungan Ekonomi Dasar.....	III-48
Tabel 3.26	Kepuasan Masyarakat terhadap Program-Program Umum Pemda.....	48
Tabel 3.27	Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemda KabupatenKuningan di 5 Bidang/Unit Pelayanan	III-49
Tabel 4.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional (Ekonomi Makro) Tahun 2024.....	IV-9
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.3	Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026	IV-18
Tabel 4.4	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024	IV-34
Tabel 4.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024	IV-42
Tabel 4.6	Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV-50
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 (PPD1) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-52
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 (PPD2) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat	

	Daerah Penanggung Jawab	IV-59
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 (PPD3) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-69
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 (PPD4) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-77
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 (PPD5) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-80
Tabel 4.12	Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.....	IV-85
Tabel 4.13	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan pada RKPD Tahun 2024 dengan Sasaran pembangunan Dearah Jawa Barat dan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	IV-87
Tabel 4.14	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan dengan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-89
Tabel 4.15	Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024.....	IV-92
Tabel 4.16	Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2024	IV-99
Tabel 5.1	Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	V-4

Tabel 5.3	Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2024	V-3
Tabel 5.4	Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024	V-30
Tabel 5.5	Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024	V-36
Tabel 5.6	Sinergitas Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	V-36
Tabel 5.7	Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Reguler Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	V-38
Tabel 5.8	Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	V-40
Tabel 5.9	Sinergitas Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	V-40
Tabel 5.10	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	V-42
Tabel 5.11	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	V-43
Tabel 5.12	Proporsi Anggaran Berdasarkan Isu Tematik.....	V-45
Tabel 6.1	Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2024	VI-3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2024	VI-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan	I-6
Gambar 1.2	Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah	I-15
Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kuningan.....	II-5
Gambar 2.3	Peta Morfologi Kabupaten Kuningan.....	II-7
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Kuningan.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kuningan	II-15
Gambar 2.6	Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Kuningan.....	II-17
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai Kabupaten Kuningan	II-19
Gambar 2.8	Peta Kawasan Risiko Bencana Kabupaten Kuningan	II-21
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2022.....	II-28
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 (juta rupiah)	III-7
Gambar 3.2	Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Kuningan Tahun 2022.....	III-10
Gambar 3.3	Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Di Kabupaten Kuningan Tahun 2022.....	III-10
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran Dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah	IV-3
Gambar 4.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026	IV-17
Gambar 4.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-26
Gambar 4.4	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	IV-27
Gambar 4.5	Sasaran Masing-masing Prioritas Nasional 2024	IV-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan periode 2024-2026. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta arahan operasionalnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan Dokumen RKPD 2024. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 paling sedikit memuat analisis gambaran umum kondisi daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; analisis kapasitas riil keuangan daerah; penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan daerah; penelaahan terhadap sasaran RPD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;

penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Tahun 2024 adalah tahun yang krusial dan penuh tantangan bagi Kabupaten Kuningan, dikarenakan Tahun 2024 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026. Selain harus fokus terhadap pencapaian, target-target tujuan dan sasaran daerah yang belum tercapai pada pelaksanaan tahun sebelumnya, juga fokus terhadap pelaksanaan Pilkada serentak supaya terselenggara secara tertib dan aman.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

- (1) Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
- (3) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (4) Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) **Top-down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta visi-misi daerah.

- 2) **Bottom-up**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Kabupaten. Proses ini dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2023, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
- 3) **Teknokratik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) **Politik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.
- 5) **Partisipatif**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Selain pendekatan diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 juga menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Pendekatan Perencanaan Holistik - Tematik** pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran

prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/ kabupaten.

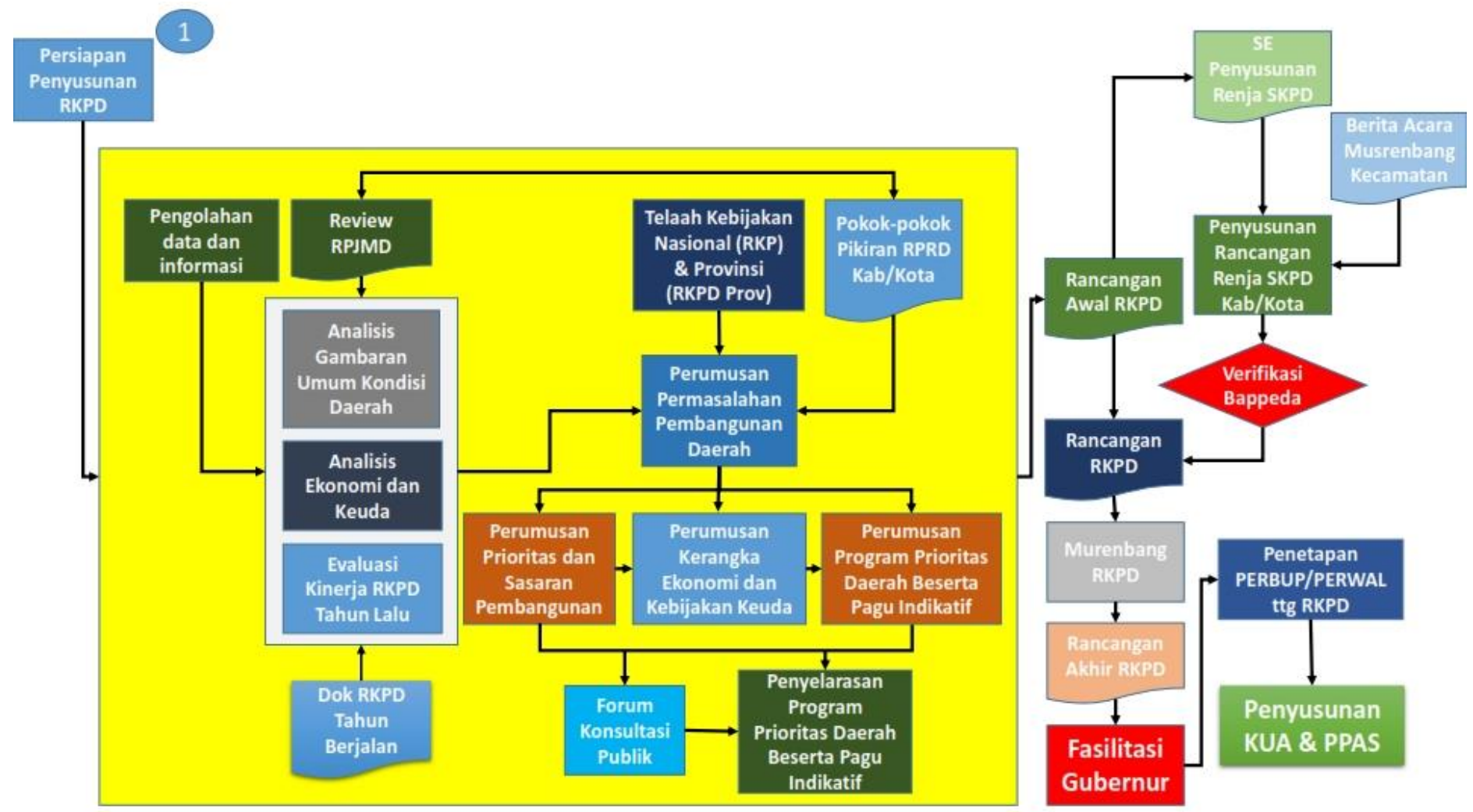
- **Pendekatan Integratif** lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
- **Pendekatan Spasial** digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dilakukan melalui:

- 1) **Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD** dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, Rancangan Awal RKP Tahun 2024, Rancangan Awal RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, Hasil Evaluasi Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Evaluasi RKPD Tahun 2022 dan Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan 1.
- 2) **Penyusunan Rancangan RKPD** dilakukan melalui tahapan yang terdiri dari **Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Pra Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kabupaten** sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, dan hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Pra Musrenbang Kabupaten dan Rakor Bidang, Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten.

- 3) **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupaten pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Kuningan serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) **Penetapan RKPD**, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Adapun alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 disajikan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);

22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

- Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 memperhatikan RKP Nasional Tahun 2024, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 serta masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui penjangkaran aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Mekanisme perencanaan partisipatif juga diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 1.1 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024

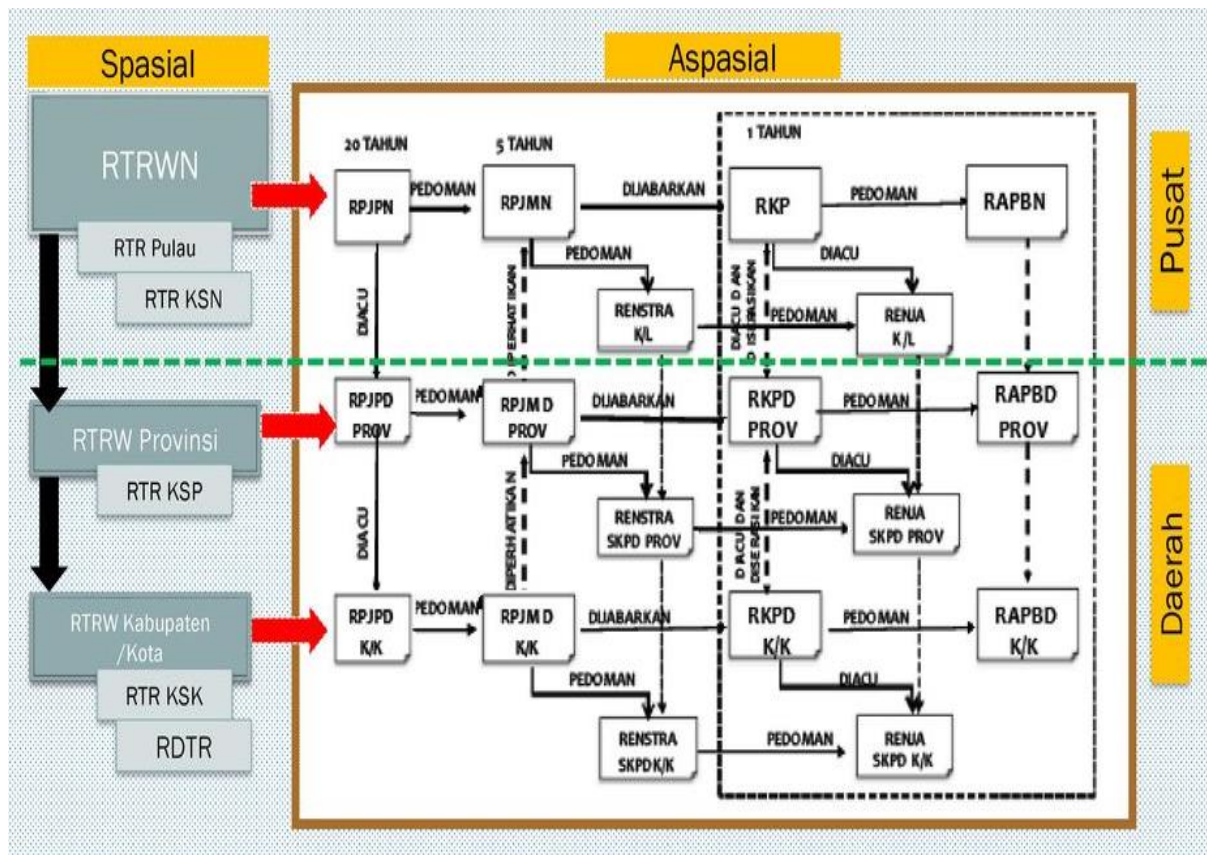
NASIONAL	KABUPATEN KUNINGAN	JAWA BARAT
<p>“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem ▪ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ▪ Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan ▪ Penguatan daya saing ▪ Pembangunan rendah katbon dan transisi energy ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas ▪ Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ▪ Pelaksanaan pemilihan umum 2024 	<p>“Menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul dan produktif”</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien ▪ Pengembangan dan percepatan daya saing daerah menuju daerah unggul ▪ Peningkatan perekonomian daerah yang unggul dan kompetitif ▪ Peningkatan pemetataan pembangunan daerah 	<p>“Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat disegala bidang”</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia ▪ Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan ▪ Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan ▪ Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 adalah tahun pertama dari RPD Tahun 2024-2026. Seluruh Perangkat Daerah pengampu urusan pembangunan harus memastikan target dan sasaran kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan mewujudkan pencapaian indikator RPD sekaligus menjadi pendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kuningan.

Dari matrik sanding pada gambar 1.2 secara umum terdapat sinergi antara tema pembangunan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta prioritas pembangunannya.

RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan daerah sekitar juga Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1.2 Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penyusunan RPD Kabupaten Kuningan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kuningan, dengan memperhatikan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RTRW Kabupaten Kuningan. Penyusunan RPD Kabupaten Kuningan ini diselaraskan pula dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, RPJMN dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 adalah menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

- T1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024;
- T.2 Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- T.3 Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024;
- T.4 Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- T.5 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran:
 - S1. Menurunnya Tingkat kemiskinan

- S2. Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan Kawasan perdesaan
- T.6 Membangun SDM Unggul dan Kompetitif, dengan 4 (empat) sasaran:
- S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - S2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga
 - S3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 - S4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
- T.7 Terwujudnya Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul, dengan 3 (tiga) sasaran:
- S1. Meningkatnya investasi daerah
 - S2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja
 - S3. Meningkatnya kualitas infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup, dan ketahanan bencana
- T.8 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif, dengan 2 (dua) sasaran:
- S1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis agribisnis, industri, industri pariwisata ekonomi kreatif dan sektor lainnya
 - S2. Meningkatnya Tata Kelola dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Sumberdaya Alam secara lestari dan Kajian Pemanfaatan Sumber Energi Ramah lingkungan
- T.9 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, dengan 2 (dua) sasaran:
- S1. Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya sistem dan kualitas pelayanan publik
 - S2. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan, kedudukan, tahapan, prinsip, pendekatan penyusunan RKPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memuat hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, uraian penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022

Memuat telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Evaluasi Inovasi Daerah

Menjelaskan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat arahan pembangunan ekonomi dalam dokumen RKP, RKPD provinsi dan kebijakan di bidang ekonomi

dalam dokumen RPD. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program/kegiatan dalam menjawab isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2024 pada RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dengan turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

4.2. Isu Strategis Tahun 2024

Memuat penentuan isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Memuat rumusan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

4.4. Program Inovasi Daerah

Memuat inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk Tahun 2023.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

5.2 Rencana Kerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Memuat rumusan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2024

Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah pusat.

5.4 Usulan Rencana Kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah provinsi.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

Bab VII Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

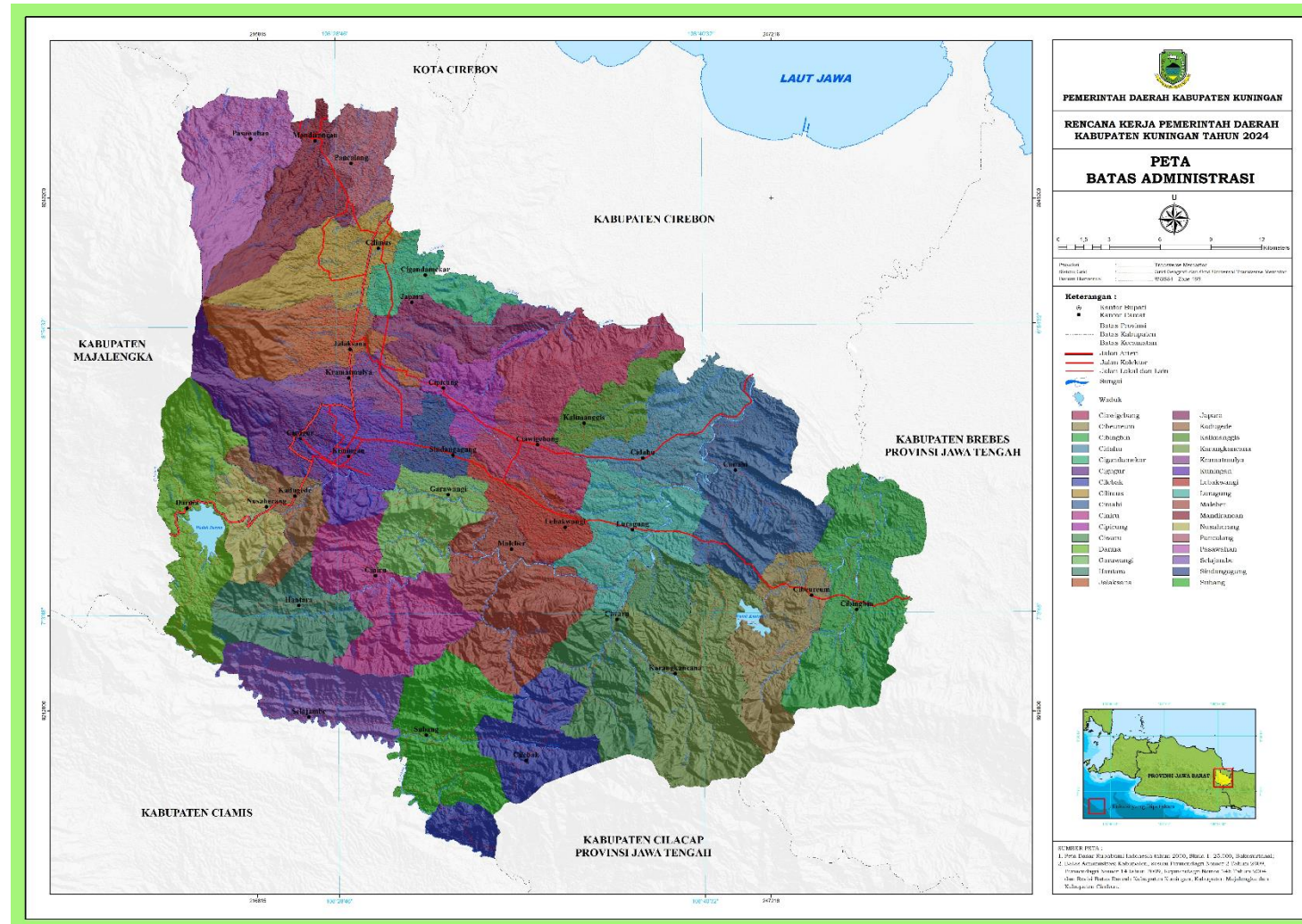
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kuningan terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 6°46'51,92" Lintang Selatan - 7°11'44,02" Lintang Selatan dan 108°23'2,07" Bujur Timur - 108°47'40,12" Bujur Timur. Sementara itu, apabila dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang cukup strategis yang berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional Cirebon dengan Pusat Kegiatan Wilayah Pangandaran dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah. Selain itu, berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisanggarung, Ciberes-Bangkaderes dan Cijolang, sehingga mempunyai keterkaitan erat dalam pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati, rencana pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) dan jalan tol Cikampek-Cirebon.

Secara administrative, Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004 serta arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai ± 119.409,31 hektar dengan kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Cibingbin seluas ± 7.091 hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas ± 1.312 hektar.

Gambar 2.1Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kuningan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.040,81	5,06%
2	Cibeureum	3.919,78	3,28%
3	Cibingbin	6.972,51	5,84%
4	Cidahu	3.704,72	3,10%
5	Cigandamekar	2.242,54	1,88%
6	Cigugur	3.529,15	2,96%
7	Cilebak	4.268,78	3,57%
8	Cilimus	3.529,69	2,96%
9	Cimahi	5.838,75	4,89%
10	Ciniru	4.976,49	4,17%
11	Cipicung	1.902,09	1,59%
12	Ciwaru	5.197,64	4,35%
13	Darma	5.449,36	4,56%
14	Garawangi	2.984,57	2,50%
15	Hantara	3.537,40	2,96%
16	Jalaksana	3.920,57	3,28%
17	Japara	2.707,49	2,27%
18	Kadugede	1.810,55	1,52%
19	Kalimanggis	2.017,75	1,69%
20	Karangkencana	6.529,53	5,47%
21	Kramatmulya	1.687,29	1,41%
22	Kuningan	2.994,24	2,51%
23	Lebakwangi	1.969,69	1,65%
24	Luragung	4.073,77	3,41%
25	Maleber	5.736,20	4,80%
26	Mandirancan	3.500,00	2,93%
27	Nusaherang	1.809,45	1,52%
28	Pancalang	1.919,88	1,61%
29	Pasawahan	4.927,49	4,13%
30	Selajambe	3.661,44	3,07%
31	Sindangagung	1.300,91	1,09%
32	Subang	4.748,84	3,98%
	Jumlah	119.409,3	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Batas wilayah Kabupaten Kuningan dengan kabupaten tetangganya diuraikan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- b) Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

- c) Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- d) Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

Topografi dan Morfologi

Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami (bulan dan sejenisnya), serta asteroid. Salah satu yang dikaji dalam topografi yaitu mengenai elevasi atau ketinggian suatu wilayah. Ketinggian pada suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl, 2.000 – 3.000 mdpl dan > 3000 mdpl. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kuningan disajikan Tabel 2.2, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

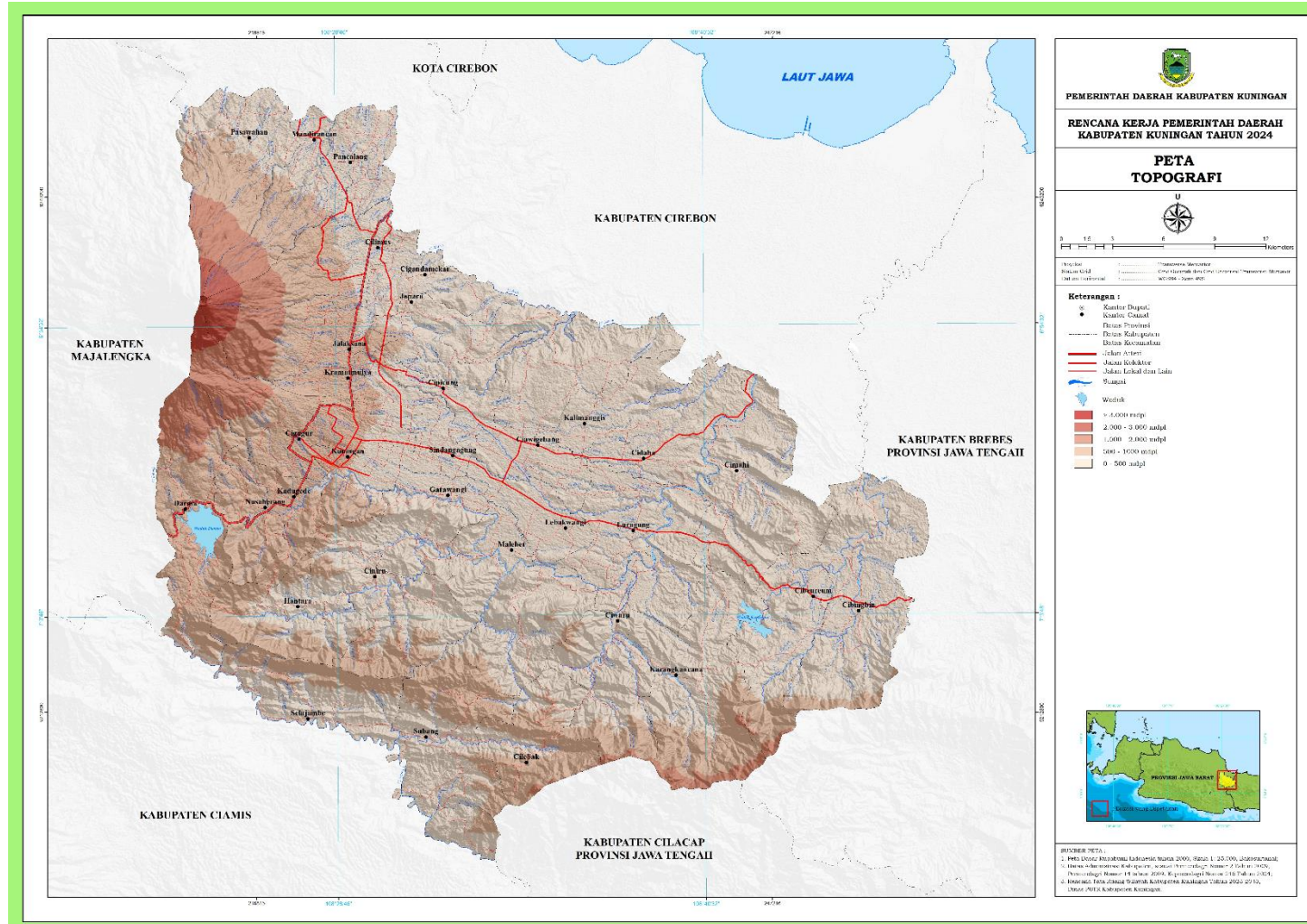
**Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi
Kabupaten Kuningan**

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	0 - 500 mdpl	79.634,00	66,69
2	500 – 1.000 mdpl	32.451,44	27,18
3	1.000 – 2.000 mdpl	6.232,08	5,22
4	2.000 – 3.000 mdpl	1.083,88	0,91
5	> 3000 mdpl	7,92	0,01
	Jumlah	119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2. dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kuningan didominasi pada ketinggian diantara 0 – 500 mdpl sebesar 66,69 % berada di wilayah tengah, timur, dan utara. Sementara itu, ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl yakni seluas 7,92 hektar yang merupakan puncak dari Gunung Ciremai.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Dalam konteks kewilayahan, morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk permukaan bumi. Morfologi dapat diklasifikasikan menjadi datar, landai, berombak, berbukit/bergelombang dan bergunung. Luasan wilayah berdasarkan morfologi di Kabupaten Kuningan disajikan Tabel 2.3, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

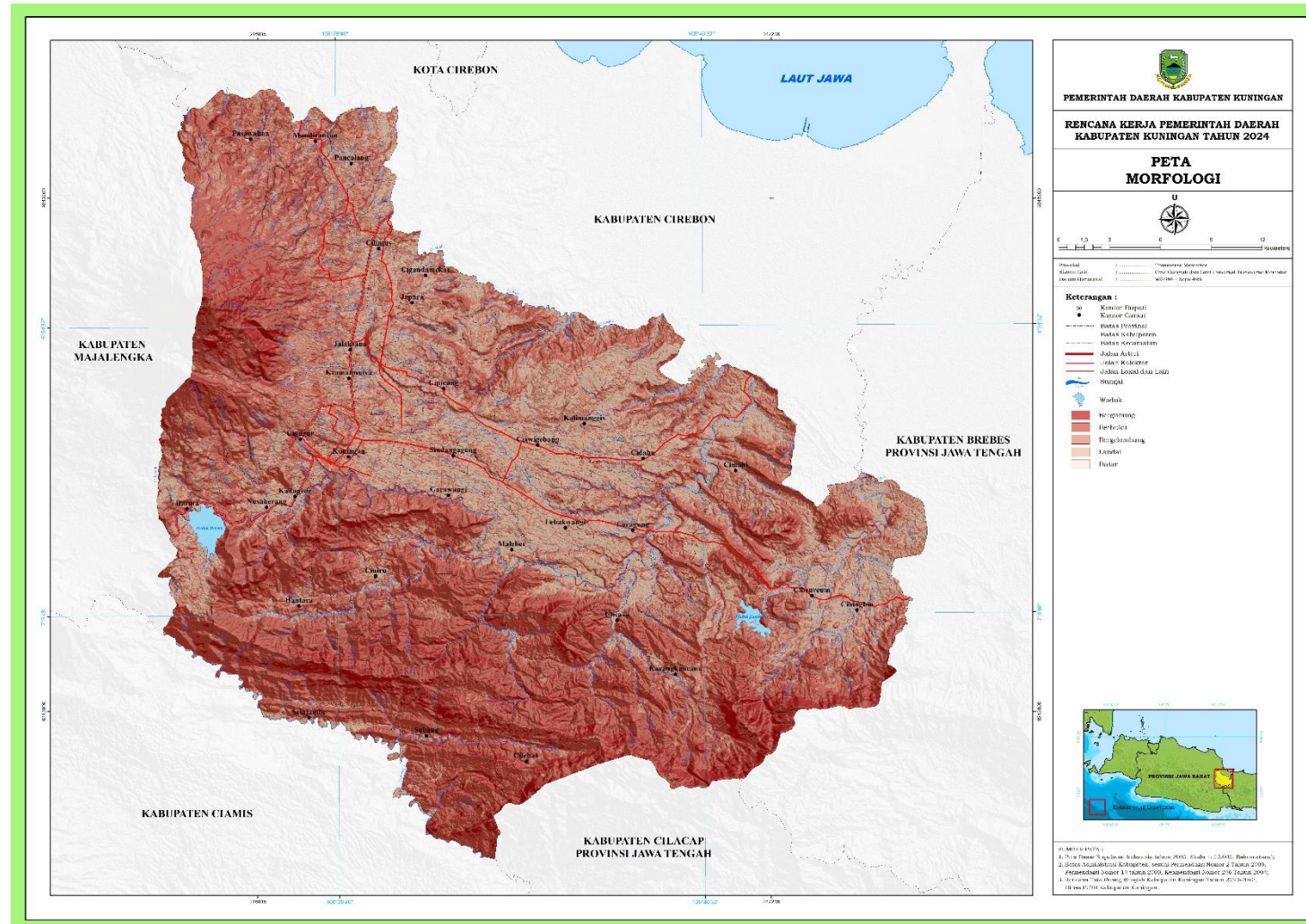
Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi Kabupaten Kuningan

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1.	Datar	3.718,47	3,11
2.	Landai	26.093,89	21,85
3.	Berombak	32.383,29	27,12
4.	Berbukit/Bergelombang	49.195,99	41,20
5.	Bergunung	8.017,68	6,71
Jumlah		119.409,31	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3. dapat dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Kuningan didominasi oleh morfologi berbukit/bergelombang dengan luasan sebesar 49.195,99 hektar (41,20 persen), sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.718,47 hektar (3,11 persen) yang berada di bagian tengah.

Gambar 2.3 Peta Morfologi Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Klimatologi

Secara harfiah klimatologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai sifat iklim di suatu tempat dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun mencapai 26,9°C, dengan suhu minimum sebesar 19,8°C di Bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 36,2°C di Bulan September (Kuningan Dalam Angka tahun 2023). Untuk curah hujan, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan 2.000 sampai dengan lebih dari 3.000 mm/tahun. Berikut ini disajikan luasan wilayah berdasarkan curah hujan di Kabupaten Kuningan.

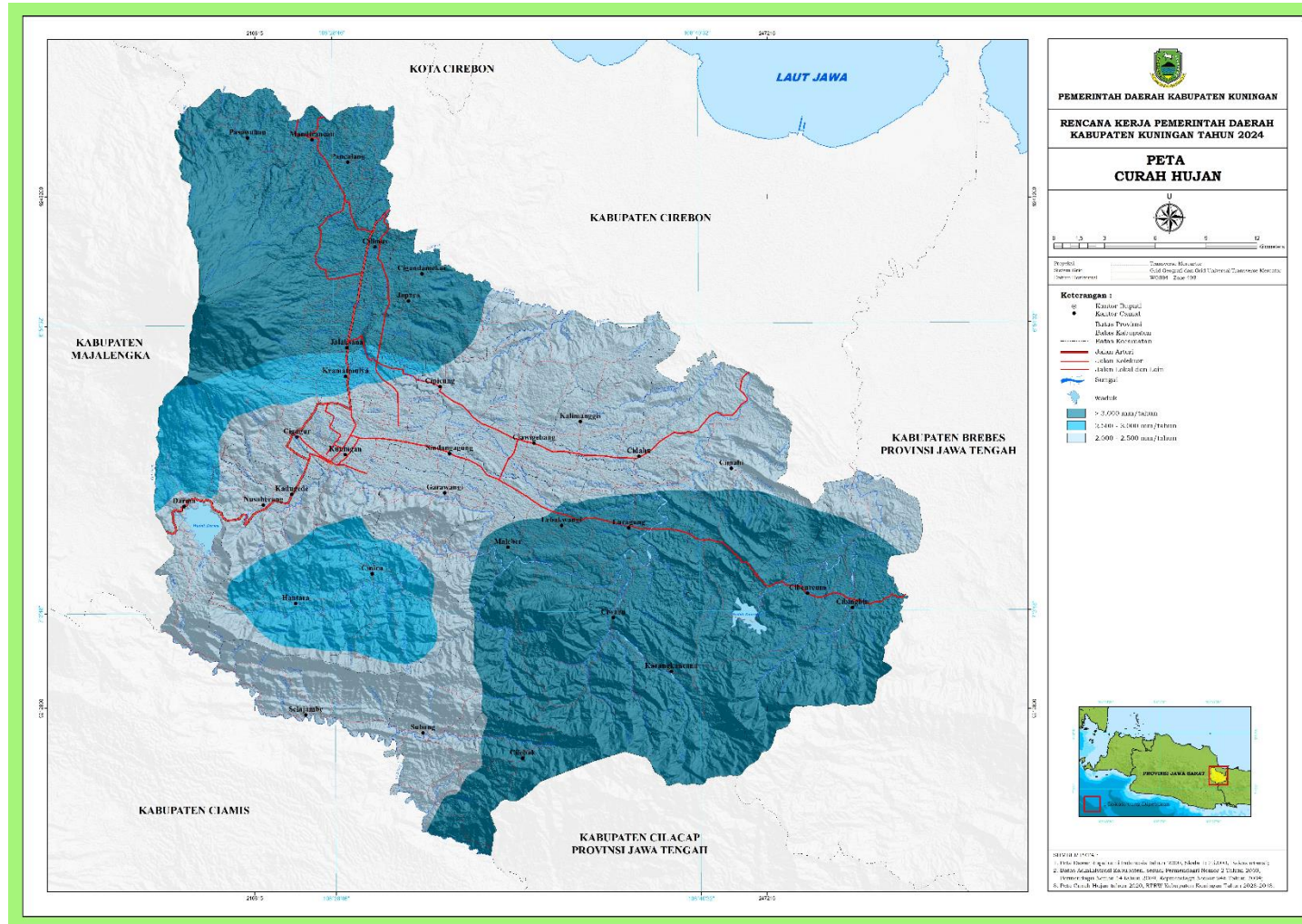
Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan Kabupaten Kuningan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2.000 - 2.500 mm/tahun	47.705,59	39,95%
2	2.500 - 3.000 mm/tahun	12.637,70	10,58%
3	> 3.000 mm/tahun	59.066,03	49,47%
Jumlah		119.409,31	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.4. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan >3.000 mm/tahun yaitu seluas 49,47% di wilayah bagian barat laut dan tenggara.

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Potensi Wilayah

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumberdaya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan:

Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.¹

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016; SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017; SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis

¹ Arief, Arifin. 2011. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan hutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Kuningan

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,82
2	Taman Nasional	8.837,02
3	Taman Wisata Alam	8,90
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,73
5	Hutan Kota	71,50
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel 2.5 di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2022).

Perkebunan

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan produksi di Kabupaten Kuningan sebagaimana ditampilkan Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Kabupaten Kuningan Tahun 2022

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
1	Kelapa	4.570,29	3.035,77
2	Karet	-	-

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
3	Kopi	1.566,49	327,55

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2023

Tanaman Pangan

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut². Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Kuningan memiliki luas sekitar 27.415 hektar. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani terutama untuk menanam padi, jagung kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Adapun kuantitas produksi tanaman pangan yang sudah terdata sebagaimana di tabel bawah ini.

Tabel 2.7 Produksi Tanaman Pangan

No	Tanaman Pangan	Ton
1	Padi	366.160
2	Jagung	17.353
3	Kedelai	875
4	Kacang Tanah	298
5	Kacang Hijau	94
6	Ubi Kayu	6.757
7	Ubi Jalar	100.099

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2023

Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak di Kabupaten Kuningan sebagaimana diperlihatkan Tabel 2.8.

² Aartsen, J. V., 1953. *Ekonomi pertanian Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

Tabel 2.8 Jumlah Komoditas Ternak Kabupaten Kuningan

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Ternak Besar	
	a. Sapi Potong	30.631
	b. Sapi Perah	7.278
	c. Kerbau	4.674
	d. Kuda	365
2	Ternak Kecil	
	a. Domba	136.620
	b. Kambing	7.950
	c. Kelinci	8.050
	d. Babi	1.710
3	Ternak Unggas	
	a. Ayam Buras	634.796
	b. Ayam Ras Petelur	1.908.399
	c. Ayam Ras Pedaging	3.814.651
	d. Puyuh	133.542
	e. Itik	74.710
	f. Itik Manila/Entog	20.661
	g. Merpati	14.188

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2023

Perikanan

Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Menurut Kuningan dalam Angka Tahun 2023, Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada Tahun 2022 sebesar 368,35 ton dengan nilai Rp.8.095 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Kuningan.

Pertambangan

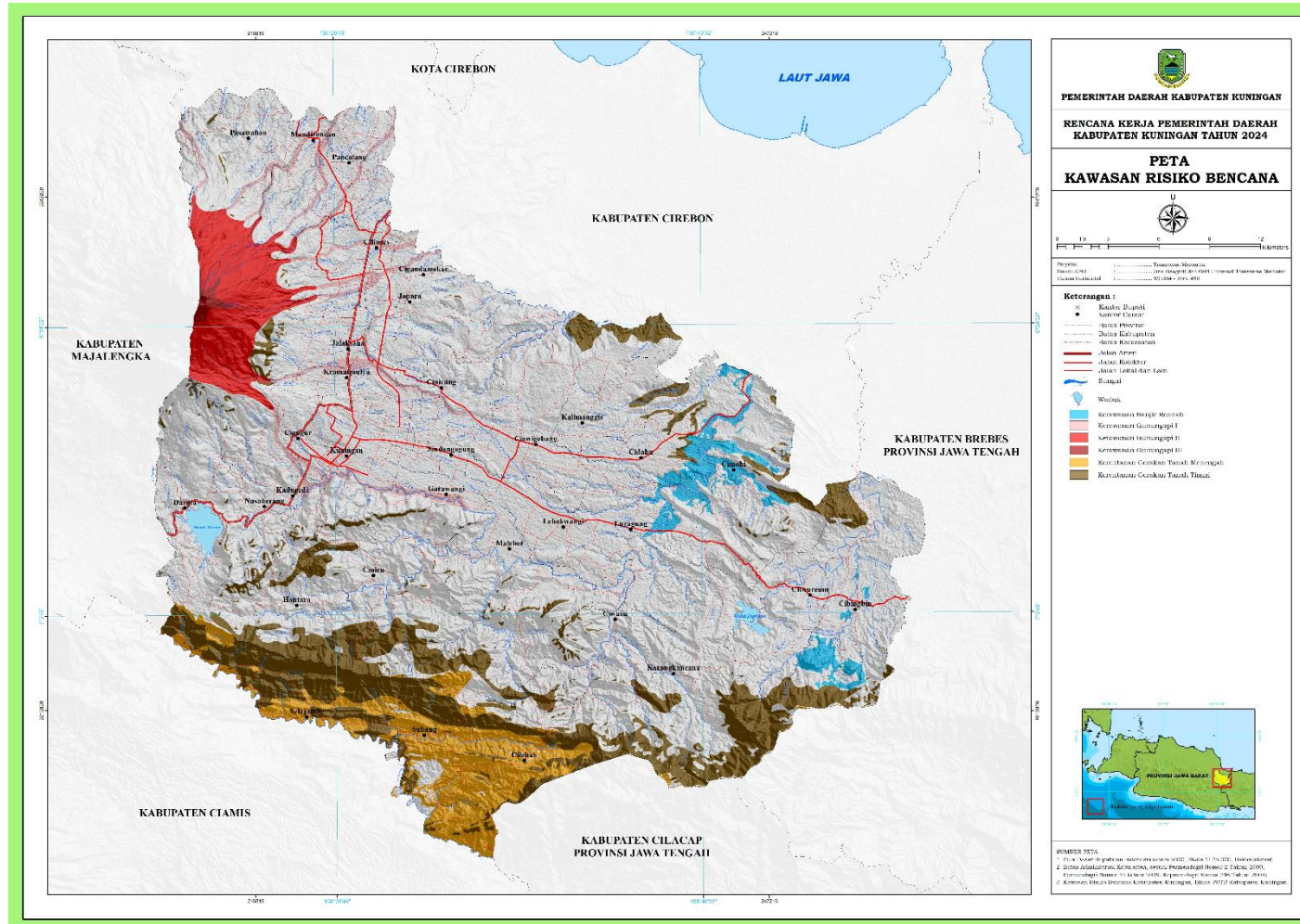
Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

serta kegiatan pasca tambang³. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya adalah gerakan tanah, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, dan banjir.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Kerentanan Gerakan Tanah

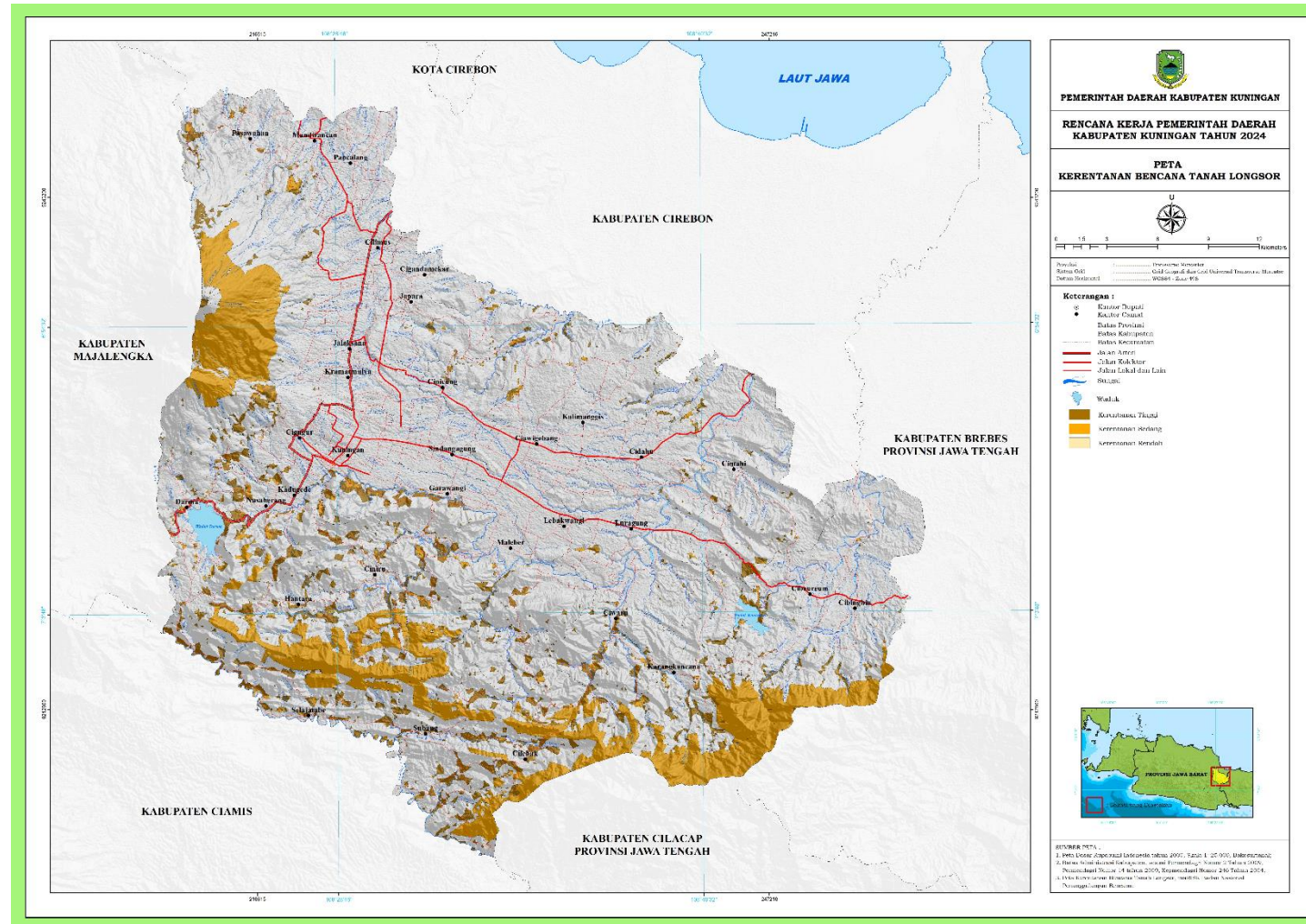
Pengertian gerakan tanah dan longsor mempunyai kesamaan. Gerakan tanah adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukan semula, gerakan tanah mencakup gerak rayapan dan aliran maupun longsor. Berdasarkan Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Kuningan

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sangat Rendah	6.843,67	5,73%
2.	Rendah	42.138,68	35,29%
3.	Menengah	53.368,90	44,69%
4.	Tinggi	15.893,92	13,31%
5.	Alur Aliran Bahan Rombakan	814,17	0,68%
6.	Danau	349,97	0,29%
Jumlah		119.409,31	100,00%

Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM

Gambar 2.6 Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

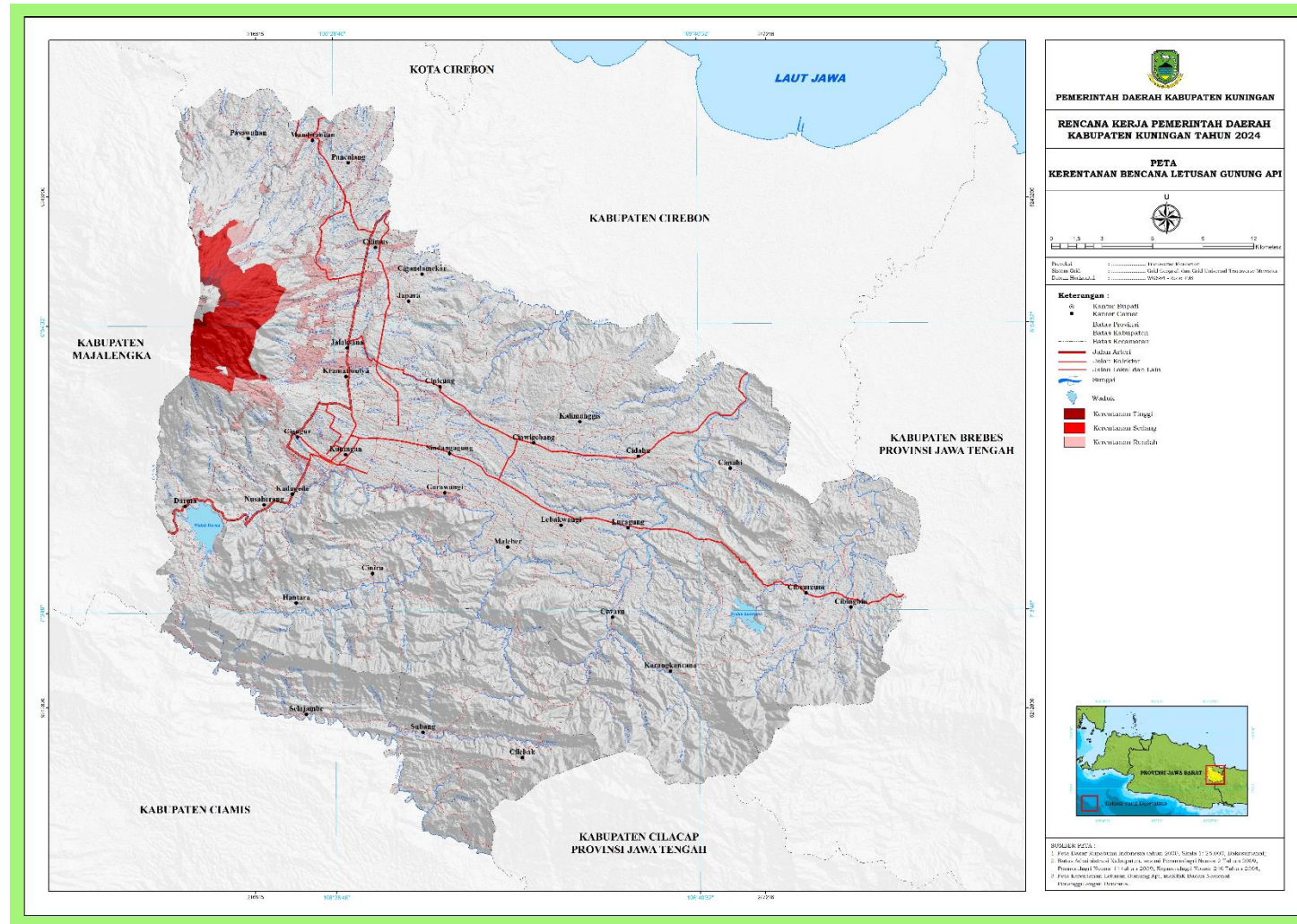
Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terlanda bahaya erupsi baik langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder). Keberadaan Gunung api Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif memiliki potensi alam sekaligus risiko bencana alam letusan gunung api (*erruption*), sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada Tabel 2.10. berikut ini.

Tabel 2.10 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api Ciremai

No	Tipologi Rawan Gerakan Gunung Api	Luas (ha)
1.	Kawasan Rawan Bencana I : berpotensi terlanda aliran lahar hujan	2.503,86
2.	Kawasan Rawan Bencana II : berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan	4.461,09
3.	Kawasan Rawan Bencana III : berpotensi selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun	232,10
Jumlah		7.197,05

Sumber : Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi.

Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai Kabupaten Kuningan

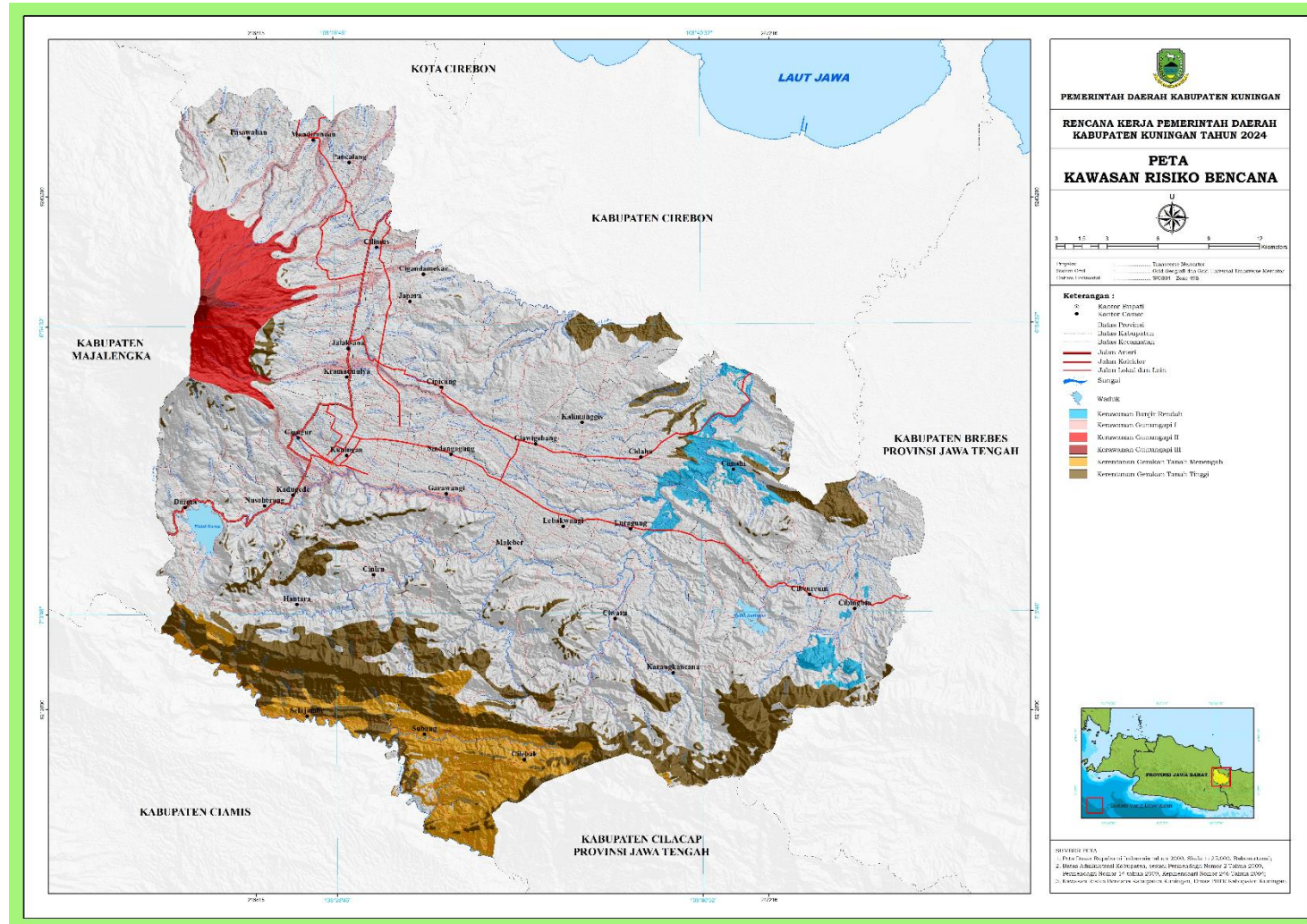


Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Kawasan Rawan Banjir

Banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan. Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor-faktor kerusakan lingkungan seperti kurangnya daerah resapan air, pendangkalan sungai, maupun sarana dan prasarana lingkungan yang kurang berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peta Kerawanan Banjir, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, lokasi potensi banjir akibat luapan air sungai berpotensi terjadi di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung seluas 2.320,80 Hektar.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Risiko Bencana Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

Tabel 2.11 Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian			
		2019	2020	2021	2022
1	Tanah Longsor	69	158	161	228
2	Gerakan Tanah	7	15	3	6
3	Tanah Amblas	-	2	-	-
4	Gempa Bumi	3	2	-	1
5	Banjir	20	15	9	28
6	Abrasi	-	1	-	-
7	Angin Kencang / Putting Beliung	33	24	26	26
8	Sambaran Petir	1	1	2	2
9	Kebakaran Hutan/Lahan	24	6	-	3
10	Kekeringan	24	1	-	-
11	Kebakaran Rumah / Gedung	26	14	8	16
12	Bangunan Ambruk	13	21	13	20
13	Orang Hanyut	-	-	2	-
14	Orang Tenggelam	-	-	2	4
	TOTAL	220	260	226	334

Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan

2.1.1.2 Gambaran Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka 2023 Badan Pusat Statistik, jumlah penduduknya mencapai 1.196.017 jiwa (Laki-laki: 605.970 jiwa; perempuan: 590.047 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32%. Kepadatan penduduk pada tahun 2022 tercatat 1.002 jiwa per km².

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Kuningan tergolong kedalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2022

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021	2022
Demografi			
1. Jumlah Penduduk	1.167.686	1.180.391	1.196.017
a. Laki-laki	592.009	598.254	605.970
b. Perempuan	575.677	582.137	590.047
c. Rasio	102,84	102,77	102,70
2. Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	978	989	1,002
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,17	1,09	1,32
4. Jumlah Rumah Tangga	277.855	301.470	305.336

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021	2022
5. Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)			
a. 0-14	277.965	276.433	275.713
b. 15-64	798.083	806.294	816.115
c. 65+	91.638	97.664	74.347
6. Angka Beban Tanggungan (ABT)	46,31	46,40	46,55

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Dari data di atas, pada tahun 2022 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 275.713; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 816.115 dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 74.347.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM metode baru, selama kurun waktu tahun 2020-2022 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pengeluaran mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.12.

Tabel 2.13 Indikator Umum Kesejahteraan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		2020	2020	2021	2021	2022	2022
UHH	Tahun	73,28	73,59	73,37	73,78	73,45	74,03
Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu orang	22	27	22	42	21	24
Angka Kematian Bayi	kasus per 1000	4,05	4,14	4,04	2,95	4,03	5,13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,10	12,22	12,14	12,23	12,19	12,24
Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,41	7,57	7,46	7,80	7,52	7,88
Pengeluaran	000 Rp	8.967- 9.003	9.459	9.042- 9.092	9.409	9.116- 9.181	9.620
Indeks Kesehatan	Poin	81,97	82,45	82,23	82,74	82,45	83,12
Indeks HLS	Poin	67,22	67,22	67,89	67,56	67,78	68,00
Indeks RLS	Poin	49,4	49,4	50,47	50,24	50,47	52,53
Indeks Pendidikan	Poin	58,31	59,18	60,41	59,97	60,58	60,27
Indeks Daya Beli	Poin	66,12- 66,39	68,44	66,22- 66,59	68,27	66,23- 66,70	68,95
IPM	Poin	68,39	69,38	69,26	69,71	69,45	70,16

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi penduduk. Menurut angka UHH Tahun 2022, sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 73,78 tahun, untuk capaian angka kematian ibu dan kematian bayi cenderung fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal. Semakin besar mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP. Pengeluaran per kapita Kabupaten Kuningan mencapai 9.459 juta rupiah pada Tahun 2020, 9.409 juta rupiah pada Tahun 2021 dan 9.620 juta rupiah pada Tahun 2022. Pengeluaran per kapita Kabupaten Kuningan cenderung meningkat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Sisi pengeluaran memberikan dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada komoditas-komoditas yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk.

2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)							
a. Nilai PDRB							
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Triliun Rupiah		25,62		26,92		29,52
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar Rupiah	15.980,11	16.882,76	16.680,70	17.483,56*	17.412,00	18.450,34**
b. PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah		21,996		22,805*		24,682**

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2023

Tabel 2.15 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018–2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.511,08	6.113,44	6.302,21	6.435,08	7.026,81
B	Pertambangan dan Penggalian	305,31	303,55	312,73	369,59	375,77
C	Industri Pengolahan	508,87	561,95	577,69	610,72	663,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,43	22,89	22,38	25,49	27,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,84	23,88	26,32	28,56	30,01
F	Konstruksi	2.022,81	2.237,71	2.090,20	2.342,69	2.533,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.238,07	3.578,48	3.586,95	3.785,58	4.106,71
H	Transportasi dan Pergudangan	3.351,58	3.574,37	3.591,64	3.673,81	4.353,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	420,08	466,02	466,23	484,72	568,47
J	Informasi dan Komunikasi	813,89	880,41	1.094,15	1.154,70	1.211,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	1.275,98	1.392,98	1.414,09	1.557,61	1.667,16
L	Real Estat	590,34	646,47	655,42	732,08	798,74
M,N	Jasa Perusahaan	94,66	113,55	112,74	123,82	145,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	913,75	962,35	940,97	932,41	919,34
P	Jasa Pendidikan	2.579,72	2.986,53	3.182,13	3.374,44	3.638,16

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359,68	404,72	401,02	440,21	473,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	735,13	823,84	842,00	847,60	980,84
	Produk Domestik Regional Bruto	22.764,23	25.093,15	25.618,87	26.919,10	29.519,83

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2017 sd 2022

Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018–2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.379,29	3.540,57	3.591,62	3.675,49	3.812,90
B	Pertambangan dan Penggalian	229,36	223,47	217,43	245,14	243,51
C	Industri Pengolahan	376,81	411,82	416,25	430,15	453,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,55	15,09	14,79	16,77	17,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,53	14,99	16,32	17,36	17,85
F	Konstruksi	1.452,84	1.543,85	1.433,51	1.534,20	1.579,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.541,67	2.737,99	2.655,96	2.751,05	2.862,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2.190,20	2.323,00	2.287,91	2.293,42	2.580,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296,44	320,06	307,84	310,70	349,94
J	Informasi dan Komunikasi	841,97	919,42	1.142,56	1.223,60	1.304,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	823,96	855,98	859,97	903,64	894,50
L	Real Estat	507,04	553,01	554,89	618,42	653,07
M,N	Jasa Perusahaan	71,74	78,04	75,83	82,81	92,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	537,05	561,60	540,31	531,67	525,34
P	Jasa Pendidikan	1.663,63	1.812,97	1.843,53	1.896,95	2.020,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	277,91	302,65	292,77	314,78	333,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	603,00	649,64	631,27	636,86	708,17
	Produk Domestik Regional Bruto	15.821,99	16.864,15	16.882,76	17.483,02	18.450,32

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2018 sd 2022

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, diantaranya adalah:

1. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
 - e) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan
 - f) Diversifikasi usaha pertanian.
2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.
3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.
4. Peningkatan promosi pariwisata.

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Tabel 2.17 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	6,56	-2,42 – 1,51	1,75-2,65	1,90-3,00
Capaian	6,59	0,11	3,56	5,53

Sumber : BPS Kab. Kuningan,2023

Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan terhitung selalu meningkat sejak tahun 2020 sebesar 0,11 persen samapai tahun 2022 senilai 5,53, dengan demikian capaian LPE Kabupaten Kuningan diatas capaian LPE Provinsi Jawa Barat (5,45) dan Nasional (5,03), dan ada di posisi ke 5 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Barat 2022



Tabel 2.18 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	2020	2021	2022
LPE Kuningan	0,11	3,56	5,53
LPE Jabar	-2,52	3,74	5,45
LPE Nasional	-2,07	3,69	5,03

Sumber : BPS, Kab. Kuningan,2023

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang

berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Kuningan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Cirebon, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 4,86 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2022 tersebut di bawah inflasi Jawa Barat sebesar 6,04 persen, dan juga dibawah Nasional sebesar 5,51persen.

Tabel 2.19 Target dan Capaian Indikator Inflasi Kabupate Kuningan Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Capaian	2	1,16	1,81	4,86

Sumber : BPS Kab. Kuningan,2023

Data Infasi Kabupaten Kuningan diperoleh dari BPS dengan menggunakan pendekatan data inflasi Kota Cirebon. Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2022 inflasi di Kabupaten Kuningan selalu dibawah 5 persen sebagai mana tabel diatas.

Tabel 2.20 Perbandingan Inflasi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	2020	2021	2022
Inflasi Kuningan	1,16	1,81	4,86
Inflasi Jabar	2,18	1,69	6,04
Inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51

Sumber : BPS, 2023

Inflasi Kabupaten Kuningan selalu lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Jawa Barat dan Nasional masing-masing pada Tahun 2022 berturut-turut sebesar 4,86 persen, 6,04 persen dan 5,51 persen. Pada Tahun 2022 inflasi mengalami peningkatan yang cukup besar baik di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Hal ini diperkirakan terjadi karena adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan

pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

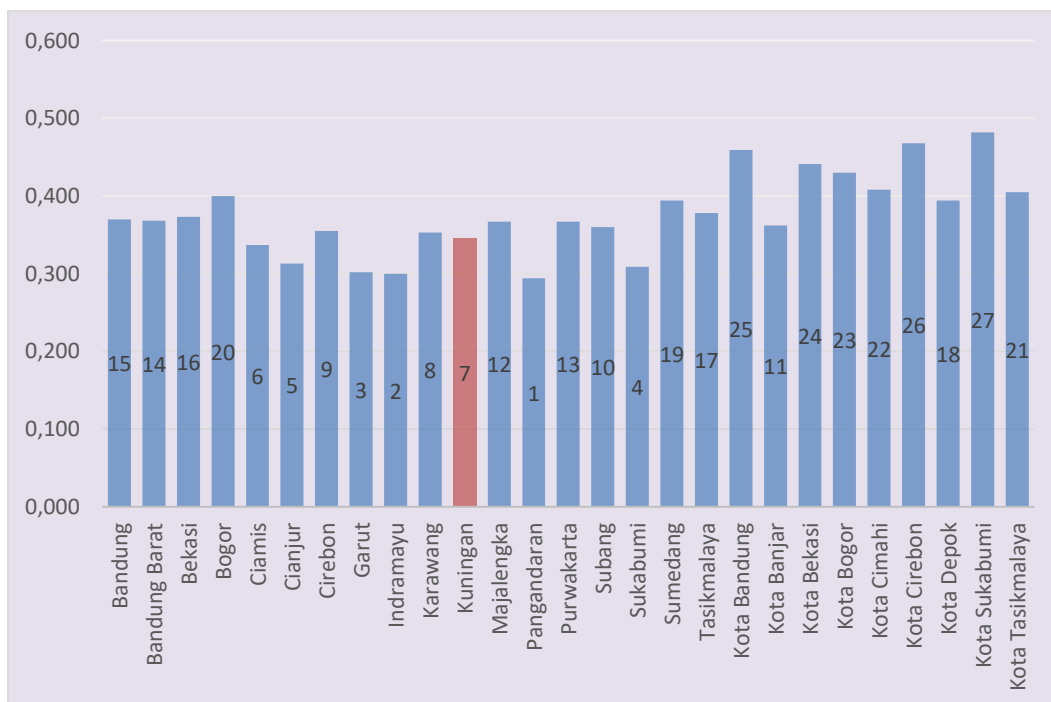
Tabel 2.21 Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	0,34	< 0,38	< 0,38	< 0,38	< 0,38
Capaian	0,435	0,361	0,349	0,345	

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,345, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 0,349 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional sebesar 0,381 dan posisinya ada ke 7 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Gambar 2.10 Gini Rasio Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2022



Tabel 2.20 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	2020	2021	2022
Indeks Gini Ratio Kuningan	0,361	0,349	0,345
Indeks Gini Ratio Jabar	0,403	0,412	0,417
Indeks Gini Ratio Nasional	0,385	0,381	0,381

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2023

Kabupaten Kuningan berada pada level menengah dengan besaran 0,35 yang masih cukup jauh dibawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,42. Kondisi tersebut menggambarkan pendapatan masyarakat Kuningan masih relatif lebih merata dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kuningan cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit diatas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin).

Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (redistribution with growth). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Kuningan. Selain itu, pengembangan industry pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM di Kabupaten Kuningan, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang masih banyak terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah tersebut. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

Indeks Gini Ratio di Kabupaten Kuningan selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2022 indeks gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,345, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 0,417 dan 0,381.

Penduduk Miskin

Tabel 2.22 Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	352.358	358.069	371.665
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	139,20	143,35	140,25
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,82	13,10	12,76

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Kuningan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, namun persentase penduduk miskin mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 12,82 persen, mengalami Peningkatan pada tahun 2021 menjadi 13,10 persen, lalu mengalami penurunan pada Tahun 2022 sebesar 12,76 persen.

Tabel 2.23 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Persentase Kemiskinan Kuningan	12,82	13,10	12,76
Persentase Kemiskinan Jabar	7,88	8,40	8,06
Persentase Kemiskinan Nasional	10,19	9,71	9,57

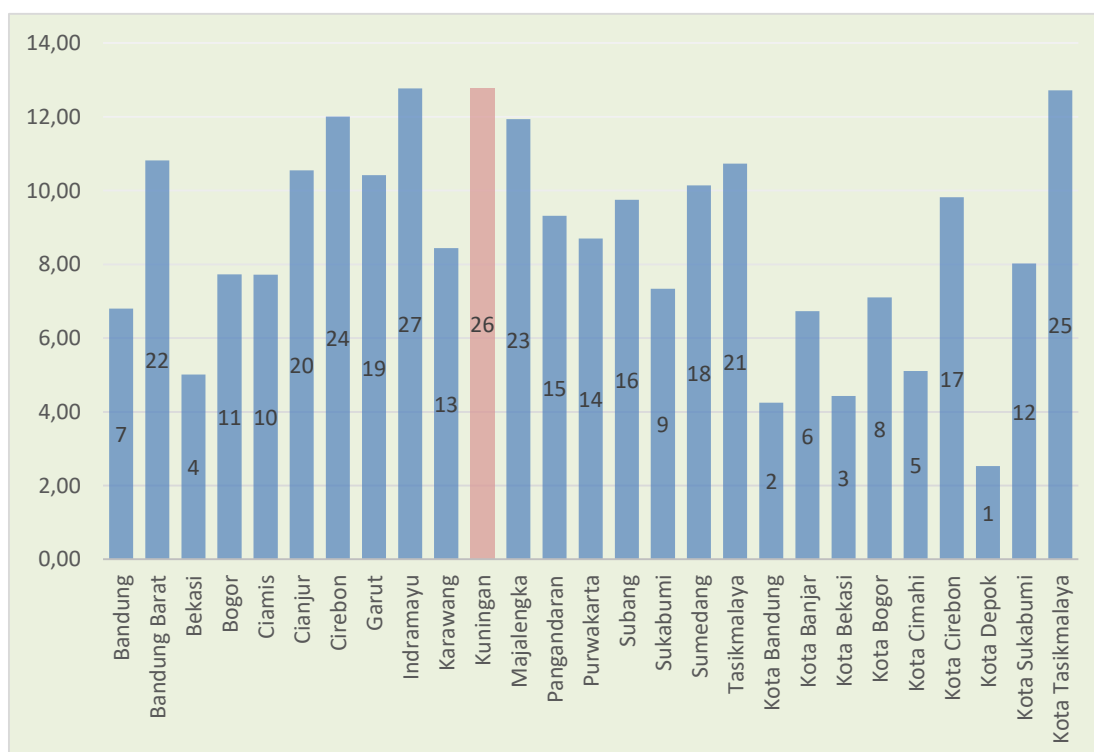
Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2023

Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 16.040 jiwa, atau dari semula 123.160 jiwa menjadi 139.200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang berada dibawah garis kemiskinan tahun 2020 dan menjadi 13,10 persen pada tahun 2021.

Memasuki tahun 2022, walau masih sangat terasa dampak kenaikan harga barang di Kabupaten Kuningan namun pergerakan perekonomian membuat jumlah penduduk miskin mengalami sedikit menurun. Menurut catatan BPS, pada tahun 2022 terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 3 ribu jiwa lebih, sehingga terjadi penurunan yang cukup persentase penduduk Kabupaten Kuningan yang berada di bawah GK, yakni menjadi sebesar 12,76 persen. pada tahun 2020, penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan persentase penduduk miskin ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan namun juga terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kenaikan ini dipicu oleh kondisi Pandemi Covid-19 baik secara lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan perbandingan penduduk miskin dengan Provinsi Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa penduduk miskin Kabupaten Kuningan sudah lebih melambat

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan Kabupaten Kuningan sebesar 12,76 persen, sedangkan di provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 8,06 persen dan 9,57 persen, serta ada di posisi ke 26 di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2022



2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Pendidikan

Kondisi pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
	Jumlah penduduk	1.179.793	1.180.391	1.196.017
1.	PAUD			
	Jumlah Sekolah	877	924	939
	Jumlah Murid	23144	31694	33828
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	2347	2338	2432
2.	Sekolah Dasar (SD)			
	Jumlah Sekolah			
	- Negeri	640	637	635
	- Swasta	18	21	21
	Jumlah Murid			
	- Negeri	96.628	95.045	93.610
	- Swasta	3.901	4.301	4.631
	Jumlah Guru			
	- Negeri	5.662	6.285	6.417
	- Swasta	210	285	306
	Rasio Jumlah Murid dan Guru			
	- Negeri	17,06	15,12	14,59
	- Swasta	18,57	15,09	15,13
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)			
	Jumlah Sekolah	92	93	93
	Jumlah Murid	14.437	14.631	15.111
	Jumlah Guru	950	1.037	1.014
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	15,20	14,11	14,90
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	Jumlah Sekolah			
	- Negeri	79	78	78
	- Swasta	29	31	33
	Jumlah Murid			
	- Negeri	35.550	36.207	35.404
	- Swasta	4.528	4.938	4.822
	Jumlah Guru			
	- Negeri	2.018	2.118	2.155
	- Swasta	321	376	388
	Rasio Jumlah Murid dan Guru			
	- Negeri	17,61	17,09	16,43
	- Swasta	14,10	13,13	12,43
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)			
	Jumlah Sekolah	63	64	64
	Jumlah Murid	19.182	18.668	18.574
	Jumlah Guru	1.373	1.634	1.377
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	13,97	11,42	13,49
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)			
	Jumlah Sekolah	27	27	29
	Jumlah Murid	18.494	19.065	19.757
	Jumlah Guru	964	1.017	1.139

	Rasio Jumlah Murid dan Guru	19,18	18,75	17,19
6.	Madrasah Aliyah (MA)			
	Jumlah Sekolah	29	33	33
	Jumlah Murid	6.358	6.121	6.235
	Jumlah Guru	638	719	672
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	9,97	8,51	9,72
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
	Jumlah Sekolah	42	43	43
	Jumlah Murid	27.752	29.776	29.776
	Jumlah Guru	1.515	1.597	1.597
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	18,32	18,64	18,64
8.	PKMB	82	89	89
	Jumlah Paket A	3	5	7
	Jumlah Paket B	82	89	89
	Jumlah Paket C	82	89	89
	Jumlah Murid	7228	9815	11601
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	187	268	312

Sumber :BPS Kab. Kuningan, 2023

Kesehatan

Kondisi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Jumlah Rumah Sakit	11	12	12
2.	Jumlah Puskesmas,	37	37	37
	Terdiri dari :			
	Jumlah Puskesmas tanpa perawatan	31	31	31
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan	6	6	6
	Jumlah Puskesmas tanpa Perawatan + Poned	18	18	18
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + Poned	6	6	6
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	69	69	68
4.	Jumlah Puskesmas Keliling	37	37	37
5.	Jumlah Posyandu	1.429	1433	1435
6.	Jumlah Poskesdes	252	251	226
7.	Jumlah Polindes	0	0	0
8.	Jumlah Balai Pengobatan	27	27	35
9.	Jumlah Apotek	108	110	166
10.	Jumlah Toko Obat	46	48	45
11.	Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit	98.828	91.287	91.741
12.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas	29.381	29.607	29.754
13.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Pembantu	15.755	15.876	16.190
14.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Keliling	29.381	29.607	29.754
15.	Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes	4.314	4.364	4.871
16.	Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu	761	764	767
17.	Rasio Jumlah Penduduk Per Polindes	0	0	0

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
18.	Rasio Jumlah Penduduk Per Balai Pengobatan	49.263	40.572	31.454
19.	Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat	23.633	22.822	24.464

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2023

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1.	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	82,9	76,50	83,9	79,063	84,9	80,699
2.	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	62	56,91	64	62,27	67	62,23
3.	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	72	259,843	72	282,82	72	202,56
4.	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	600	817	600	906,63	600	741,3
5.	Akses Air Minum Layak (%)	85,15	88,12	88,12	91,09	94,06	91,10
6.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	89,87	89,89	83,3	94,93	96,62	81,44
7.	Akses Air Minum Perpipaan (%)	32,29	34,65	34,65	37,01	39,37	35,87

Sumber : Dinas PUTR Kab. Kuningan, 2023

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi pelayanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun
		2020	2021	2022
1	Persentase rumah layak huni	95,57 %	97%	97,21%
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	-	18	16
3	Lingkungan Pemukiman kumuh	2,55%	2,78%	2,70%

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Kawasan Kumuh	-	0,0154%	0,0030%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuningan, 2023

Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi pelayanan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban (%)	84%	84%
2	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	109 orang	115 orang
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	80 %	80%
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota (%)	14,7	14,7
5	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) (%)	100%	100%
6	Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	52 %	
7	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK (%)	14,3	14,3

Sumber : Satpol PP, BPBD Kab. Kuningan, 2023

Sosial

Kondisi pelayanan di bidang Sosial di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2 Panti	92 Panti
2.	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	13,39 %	24,09%
3.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	10,29 %	86,82%

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
4.	Jumlah pelatihan /Gladi Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	220 orang	orang
5.	Rata-rata waktu penanganan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	1 hari/24 jam	1 hari/24 jam
6.	Cakupan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)	72,57%	81,00%

Sumber : Dinas Sosial, BPBD Kab. Kuningan, 2023

Tenaga Kerja

Kondisi pelayanan di bidang Tenaga Kerja di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	14,06%	9,81%
2.	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	76,94	131,39
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	55,78	65,37

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kuningan, 2023

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,6 %	41,00
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	98,56 %	97,50 %
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	52,03 %	45,41%
4.	Rasio KDRT	1 : 0000025	1 : 0000040
5.	Jumlah PMKS yang ditangani	53.423	10.223
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan san Perlindungan Anak Kab. Kuningan, 2023

Pangan

Kondisi pelayanan di bidang Pangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	274,21 (Kg/kap/th)	293,61 (Kg/kap/th)
3.	Penanganan daerah rawan pangan	-	17
4.	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	40%	45%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2023

Pertanahan

Kondisi pelayanan di bidang Pertanahan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Luas lahan bersertifikat	69,61 %	73,89%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, 2023.

Lingkungan Hidup

Kondisi pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,91 Poin	66,93 Poin
2.	Indeks Kualitas Air	50 Poin	51,11 Poin
3.	Indeks Kualitas Udara	86,52 Poin	86,96 Poin
4.	Indeks Tutupan Lahan	68,80 Poin	57,05 Poin
5.	Penanganan Sampah	103.888 Ton (60,11)	107.441 Ton (61,09)
6.	Pengurangan Sampah	10.120,64 Ton (18,10)	11.200 Ton (22)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan, 2022

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kepemilikan KTP	98,53 %	99,40 %
2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	84,21 %	85 %
3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	94,60 %	100 %
4.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	54,68 %	43,46 %
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	44,88 %	37,95 %
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	100 %	44,52 %
7.	Kepemilikan Akta Kematian	57,89 %	29,69 %
8.	Penduduk Datang	7.735	20,04 %
9.	Penduduk Pindah	10.285	27,33 %
10.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan, 2023

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	PKK aktif	100 %	100 %
2.	Posyandu	100 %	100 %
3.	Jumlah Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal	Mandiri : 35 Maju : 161 Berkembang : 165 Tertinggal : 0	Mandiri : 62 Maju : 183 Berkembang : 116 Tertinggal : 0
4.	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	189 Desa	207 Desa
5.	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100 %
6.	Prosentase Desa Tertinggal	0	0
7.	Prosentase Status Desa mandiri	9,6 %	17,17%

Sumber : Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kuningan, 2023

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Prevalensi Pemakaian Kontraserpsi/Contraceptive Prevalance (CPR)	71,60 %	6,24 %
2.	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	17,49 %	20,86 %
3.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	19,00 %	20,00 %

Sumber : Dinas PPKBPP&PA Kab. Kuningan, 2023

Perhubungan

Kondisi pelayanan di bidang Perhubungan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Jumlah Prasarana Perhubungan:		
	- PJU	810 Titik	496 Titik
	- Terminal	10	10
	- Terminal Penumpang Wisata Terpadu	1	1
2.	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :		
	- Traffic light	10 Titik	1 Titik
	- Warning Light	0 Unit	1 Unit
	- Rambu Lalulitas	0 Unit	148 Unit
	- Marka Zoss	0 Lokasi	1 lokasi
	- Cermin Tikungan	4 Unit	0 Unit
	- Velican Crossing	0 Unit	2 Unit
	- ATCS	0 Paket	8 Paket
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala	42.124 Unit	51.361 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kuningan, 2023

Komunikasi dan Informatika

Kondisi pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	Tidak Ada	Ada
3.	Prosentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	75%	80%
4.	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	10 Buah	20 Buah
5.	Jumlah kelompok informasi masyarakat	1.165	1.165
6.	Jumlah BTS	319	325
7.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	6	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2023

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kondisi pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Koperasi aktif	491 koperasi	492 koperasi
2.	Jumlah Usaha Mikro	150 umk	200 umk

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2022

Penanaman Modal

Kondisi pelayanan di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1.800.363.869.952	
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (milyar rupiah)	1.800.363.869.952	7.004.865.478.704
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	22.149	119.148

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan, 2023

Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pelayanan di bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (kecamatan)	32	32
2	Jumlah sarana prasarana olahraga (buah)	39	32

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2023

Statistik

Kondisi pelayanan di bidang Statistik di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada edisi tahunan	Ada edisi tahunan
2.	Buku "PDRB kabupaten"	-	-
3.	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah	55 Dokumen	65 Dokumen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2023

Persandian

Kondisi pelayanan di bidang Persandian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	27,8%	99,70%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2022

Kebudayaan

Kondisi pelayanan di bidang Kebudayaan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 Sarana	2 Sarana
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%

Sumber : Dimas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2023

Perpustakaan

Kondisi pelayanan di bidang Perpustakaan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Koleksi Buku di Perpustakaan	24.742 Judul Buku	24.742 Judul Buku
2.	Pengunjung perpustakaan	4.290 Orang	13.719 Orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2023

Kearsipan

Kondisi pelayanan di bidang Kearsipan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100 %	80%
2.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan	1 Kegiatan

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Kondisi pelayanan di bidang Pariwisata di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kunjungan wisata	2.668.442 Orang	3.124.763 Orang

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2023

Pertanian

Kondisi pelayanan di bidang Pertanian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha):		
	- Padi	62,56	61,92
	- Jagung	56,62	62,32
	- Kedelai	15,36	9,80
	- Kacang Tanah	15,65	14,33
	- Kacang Hijau	10,28	9,95
	- Ubi Kayu	167,72	180,19
	- Ubi Jalar	216,23	214,80
2	Produksi Daging, Susu dan Telur : Meningkatnya Produksi Daging (Ton)		
	- Sapi	2.193	1.773
	- Domba	1.375	994
	- Ayam Buras	560	444
	- Ayam Ras	28.991	26.172
	- Itik	56	50
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)		
	- Ayam Buras	1.290	1.024
	- Ayam Ras Petelur	17.120	21.823
	- Itik	443	408
	- Produksi Susu	19.780	16.008
3	Pertumbuhan Populasi Ternak (ekor):		
	- Sapi Perah	7.945	7.181
	- Sapi Potong	29.972	26.700
	- Domba	130.114	104.350
	- Kambing	7.603	7.630
	- Ayam Ras Petelur	1.497.136	1.900.399

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
	- Ayam Ras Pedaging	3.685.653	3.327.297
4	Tingkat Kemampuan Kelompok (%):		
	- Kelompok Pemula	1.028	1.028
	- Kelompok Lanjut	1.240	1.240
	- Kelompok Madya	103	103
	- Kelompok Utama	3	3
5	Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)	30,87	23,83
6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kw/Ha) :		
	- Bawang Merah	98	109,86
	- Tomat	194,86	199,23
	- Cabe Besar	63,76	65,04
	- Cabe rawit	70,64	64,96
	- Mangga	304.330	261.523
	- Rambutan	18.563	10.560
	- Durian	32.706	14.787

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2023

Perdagangan

Kondisi pelayanan di bidang Perdagangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$ 6.731.360	\$6.861.579
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	2	4
3.	Daerah Tertib Ukur	7.511	6.392

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2023

Perindustrian

Kondisi pelayanan di bidang Perindustrian di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Pertumbuhan Industri	12,2%	13
2.	Penerapan Standar Industri Hijau dan Penerapan Industri 4.0	47 Perusahaan	65 Perusahaan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
3.	Peningkatan daya saing untuk produk Home Industri	145 IKM	135 IKM

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2023

Kelautan dan Perikanan

Kondisi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	102,25%	102,95%
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	321,65 Ton	350,95 Ton
3	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	22.981,60 Ton	24.567,65 Ton
4	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	25	25

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Kuningan, 2023

2.1.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

Perencanaan Pembangunan

Kondisi pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %
5.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	9	9
6.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kab. Kuningan, 2023

Keuangan

Kondisi pelayanan di bidang Keuangan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54 Kondisi Pelayanan Penunjang Usan Aspek Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP
2.	Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung:		
	- Jml Belanja Langsung/Total APBD	40,2 %	39%
	- Jml Belanja Tidak Langsung/Total APBD	59,8 %	61%
3.	Penetapan APBD	Tepat Waktu 28 Desember 2021	Tepat Waktu 27 Desember 2022
4.	Prosentase SILPA	1,18%	2,41%

Sumber : BPKAD Kab. Kuningan, 2023

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi pelayanan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja	
		2021	2022
1.	Jumlah Pegawai yang difasilitasi (Org)	64	940
2.	Jumlah Aparatur yang terbina (%)	100	100
3.	Tingkat Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat (%)	10.575	11.864
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76,51	85
5.	Prosentase Pegawai yang dilayani (%)	100	100
6.	Prosentase Layanan (%)	100	100
7.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (Kegiatan)	1	1

Sumber : BKPSDM Kab. Kuningan, 2023

Pengawasan

Kondisi pelayanan di bidang Pengawasan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	82,31%	82,01%
2.	Prosentase Pelanggaran Pegawai	0,09%	0,07%
3.	Jumlah Temuan BPK	315	330

Sumber : Inspektorat dan BKPSDM Kab. Kuningan, 2022

Sekretariat Dewan

Kondisi pelayanan di Sekretariat Dewan Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kuningan, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah. Gambaran pencapaian kinerja

selama tahun 2020-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.58 Kondisi Aspek Daya Saing Daerah

No.	Aspek Daya Saing Daerah	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	35	-
2.	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	35	-
3.	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	-	-
4.	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	-	-
5.	Nilai tukar petani (NTP)	Poin	96,45	100,83
6.	Desa agro pinunjul	Desa	42	39
7.	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	5	-
8.	Desa pinunjul tematik	Desa	Industri: 18 UKM: 3 Koperasi: 3 Agro: 25 Pendidikan: 7 Budaya: 1 Kuliner Tradisional: 0 Wisata: 18	Industri: 20 UKM: 5 Koperasi: 3 Agro: 39 Pendidikan: 7 Budaya: 1 Kuliner Tradisional: 1 Wisata: 20
9.	Desa wisata	Kajian desa wisata	8	2
10.	Indeks desa membangun	Desa	Mandiri: 35 Maju: 161 Berkembang: 165 Tertinggal: 0	Mandiri: 62 Maju: 183 Berkembang: 116 Tertinggal: 0
11.	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100%	100%
12.	Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	79,063	80,699
13.	Kondisi Baik Irigasi	Persen	60,93	62,93
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,91	66,93
15.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	76,51	85,00
16.	Indeks toleransi beragama	Poin	72,39	78,27
17.	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	n/a	n/a

2.1.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yaitu:

A. Urusan Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jml Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	178.348	97,73%	174.371	97,77%
			Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Buku Teks Pelajaran		138.444	139.814	0	100%
2	Perlengkapan Belajar		138.444	139.814	0	100%
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		135.006.394.316	135.006.394.316	0	100%
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		8.411	8.098	313	96,28%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		712	711	2	99,85%
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		1252	917	0	73,24%
7	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		5.969	5.781	280	96,85%
8	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C		768	756	13	98,44%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jml Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.639	2,95	4.414	95,15
			Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Modul Belajar		4.130	4.130	0	100%
2	Perlengkapan Belajar		4.130	4.130	0	100%
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		10.217.900.000	10.217.900.000	0	100%
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		295	250	258	84,75%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		37	27	11	72,97%
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		36	15	0	41,67%
7	PKBM Terakreditasi minimal C		86	35	32	40,70%
8	Jumlah rombongan belajar di PKBM		752	480	46	63,83%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jml Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
3	Pendidikan Anak Usia Dinin	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	45.980	90,05%	43.028	93,58%
			Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Buku Gambar		37.583	36.526	0	100%
2	Alat Mewarnai		37.583	36.526	0	100%
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		21.056.350.000	21.056.350.000	0	100%
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		2.400	1.630	756	67,92%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		849	578	266	68,08%
6	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C		918	603	319	65,69%
7	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan		3.024	2.118	735	70,04%

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.

2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia
(Human Immunodeficiency Virus / HIV Hasil Capaian).

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	17.684	15.917	1.767	90,01
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Vaksin Tetanus Difetri (Td)	1.768	1.497	530	84,67
	2. Tablet Tambah Darah	530.520	244.039	286.481	46,00
	3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	17.684	10.086	7.598	57,03
	4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	17.684	11.010	6.674	62,26
	5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.684	11.344	6.340	64,15
	6. Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	86	86	-	100
	7. Bidan	754	754	-	100
	8. Perawat	376	376	-	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	16.880	16.500	380	97,75

Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Formulir Fotograf	16.880	11.236	4.227	72,66
	2. Kartu Ibu / Rekam Medis Ibu	16.880	11.094	4.037	73,32
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.880	10.903	5.977	64,59
	4. Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	86	86	-	100
	5. Bidan	754	754	-	100
	6. Perawat	376	376	-	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	15.703	16.248	545	103,47
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Vaksin Hepatitis B0	15.703	11.208	4.495	71,37
	2. Vitamin K1 Injeksi	15.703	11.252	4.451	71,66
	3. Salep / Tetes Mata Antibiotik	15.703	11.036	4.667	70,28
	4. Formulir Bayi Baru Lahir	15.703	11.238	4.465	71,57
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	47.109	11.170	35.939	23,71
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.684	11.356	6.328	64,22
	7. Dokter/Dokter Spesialis Anak	86	63	-	100
	8. Bidan	754	754	-	100
	9. Perawat	376	376	-	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	61.980	60.204	1.776	97,13
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan				

Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku	61.980	37.413	24.567	60,36
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	61.980	33.776	28.204	54,49
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	63.168	40.153	23.015	63,57
	4. Vitamin A Biru	16.076	16.076	-	100
	5. Vitamin A Merah	45.904	43.311	2.593	94,35
	6. Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT-HB-Hib, Campak, rubella	48.448	15.941	32.507	32,90
	7. Vaksin Imunisasi Dasar : HB0, BCG, Polio, IPV, DPT -HB-Hib, Campak, Rubella	48.448	35.941	12.507	74,18
	8. Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	54.149	32.215	21.934	59,49
	9. Peralatan Anafilaktik	36.172	23.591	12.581	65,22
	10. Bidan	754	754	-	100
	11. Dokter	86	86	-	100
	12. Perawat	376	376	-	100
	13. Ahli gizi	45	45	-	100
	14. Guru Paud	181	181	-	100
	15. Kader Kesehatan	1380	1380	-	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	151.862	137.034	14.828	90,24
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Buku Raport Kesehatanku	151.862	64.749	87.113	42,64

2	Buku Pemantauan Kesehatan	151.862	71.076	80.786	46,80
3	Kuisisioner Skrining Kesehatan	151.862	76.008	75.854	50,05
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia sekolah dan Remaja di dalam Sekolah	151.862	58.682	93.180	38,64
5	Kesehatan usia sekolah dan Remaja di luar Sekolah	158.957	58.957	100	37,09
6	Dokter/Dokter Gigi	24	24	-	100
7	Bidan	754	754	-	100
8	Perawat	376	376	-	100
9	Ahli gizi	45	45	-	100
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
11	Guru	523	523	-	100
12	Kader Kesehatan	269	269	-	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	678.867	454.053	224.814	66,88
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
	1. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	74	74	-	100
	2. Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	480.240	206.717	273.523	43,04
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	516.784	236.302	280.482	45,73
	4. Dokter	86	86	-	100
	5. Bidan	754	754	-	100
	6. Perawat	376	376	-	100

	7. Ahli Gizi	45	45	-	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	361	361	-	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	178.852	141.055	37.797	78,87
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
	1. Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	178.852	73.731	105.121	41,22
	2. Instrumen Geriatric, Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	178.852	67.108	111.744	37,52
	3. Buku Kesehatan Lansia	178.852	96.639	82.213	54,03
	4. Dokter	86	86	-	100
	5. Bidan	754	754	-	100
	6. Perawat	376	376	-	100
	7. Ahli Gizi	45	45	-	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	361	361	-	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	87.230	70.000	17.230	80,25
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum	Total Pencapaian

				Tersedia	
	1. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	74	74	-	100
	2. Tensimeter	524	524	-	100
	3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	65.588	34.147	31.441	52,06
	4. Dokter	86	86	-	100
	5. Bidan	754	754	-	100
	6. Perawat	376	376	-	100
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	18.441	16.197	2.244	87,83
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alcohol, Lancet	18.441	14.607	3.834	79,21
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	13.887	8.166	5.721	58,80
	3. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	74	74	-	100
	4. Dokter	86	86	-	100
	5. Bidan	754	754	-	100
	6. Perawat	376	376	-	100
	7. Ahli Gizi	45	45	-	100
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total	Jumlah Total	Jumlah Yang	Total

	(80%)	Yang Harus dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	Pencapaian
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2.200	2.021	179	91,86
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (bila sudah tersedia)		74	74	-	100
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi		846	443	403	52,36
3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan		1.033	741	292	71,73
4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		934	639	295	68,42
5. Dokter dan/atau Perawat Terlatih Jiwa dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya		86	86	-	100
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		14.207	12.428	1.779	87,48
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)		74	74	-	100
2. Reagen Zn TB		14.207	7.287	6.920	51,29
3. Masker jenis Rumah Tangga dan Masker N95		14.207	10.779	3.428	75,87
4. Pot Dahak, Kaca slide, bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering		14.207	14.207	-	100

5. Catridge Tes Cepat Molekuler	14.207	14.207	-	100
6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	14.207	8.593	5.614	60,48
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	10	10	-	100
8. Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	86	86	-	100
9. Perawat	376	376	-	100
10. Analis Teknis Laboratorium Medik (ATML)	7	7	-	100
11. Penata Rontgen	-	-	-	-
12. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
13. Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	361	361	-	100
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	20.953	20.781	172	99,18
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu barang / Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian
1. Media KIE (Leaflet, Lembar balik, Poster, Banner)	20.953	18.113	2.840	86,45
2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	20.953	12.285	8.668	58,63
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plaster, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum sesuai	20.953	10.865	10.088	51,85
4. Alat Tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	20.953	10.360	10.593	49,44
5. Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam / Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	86	86	-	100

6. Perawat	376	376	-	100
7. Bidan	754	754	-	100
8. Ahli Teknologi Medis (ATLM)	7	7	-	100
9. Tenaga Kesehatan Masyarakat	5	5	-	100
10. Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau mempunyai Kualifikasi Tertentu	361	361	-	100

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jml Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	285.629 rumah	91,09	260.194 rumah	91,10
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan SPAM jaringan perpipaan		7,037	7,037	0	100
2	Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan					
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jml Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	393.002 KK	94,93	368.036 KK	93,65
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Sub-Sistem pengolahan setempat		1,532 KK	1,465 KK	67 KK	95.63
2	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)		150 KK	150 KK	0	100

D. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jml Total Yang Harus Dilayani	Target (%)	Jumlah Total Yang Terlayani	Realisasi (%)
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	88	100	87	98,86
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		88	87	1	98,86 %
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana		-	-	-	-
3	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana		-	-	-	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		-	-	-	-

E. SATPOL PP

1. Jenis Pelayanan Dasar

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.
2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Satpol PP dapat dilihat sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	260	260	0	100%	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		
1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0%	
2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0%	
3. Standar operasional prosedur Satpol PP	192	192	0	100%	
4. Standar sarana prasarana Satpol PP	20	20	0	100%	
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	284	284	0	100%	
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0	0%	
JUMLAH	496	496	0	100%	

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR				
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	38	38	0	100%
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	38	38	0	100%
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	17	17	0	100%
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	8	8	0	100%
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	33	33	0	100%
JUMLAH	91	91	0	100%

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Tahun 2022 meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

2. Untuk Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang sosial dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80	230/230x100%	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80	103/103x100%	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	80	77/77x100%	100
4	Rehabilitasi sosial dasar	Persentase (%)			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi	Capaian (%)
	tuna sosial khususnya gelandangan	gelandangan dan pengemis			
	dan pengemis di luar panti	yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	80	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.	Persentase (%) korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80	$200/200 \times 100\%$	100

Tabel 2.59 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2020		2021		2022	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1.	IPM (metode baru)	Poin	68,39	69,38	69,26	69,71	69,45	70,16
2.	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,28	73,59	73,37	73,78	73,45	74,03
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	7,57	7,46	7,80	7,52	7,88
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1	12,22	12,14	12,23	12,19	12,24
5.	Pengeluaran	000 Rp	8.967-9.003	9.459	9.042-9.092	9.409	9.116-9.181	9.620
6.	Pendapatan Asli Daerah	Rp		2.776.498.025.041		2.778.572.170.843		2.679.853.810.091
7.	PDRB Per Kapita (adhk)	Rp. juta rupiah	15.980,11	16.879,45	16.680,7	17.483,02	17.412,00	18.450,34
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,42-1,51	0,09	1,75-2,65	3,56	1,90 - 3,00	5,53
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	60,61	61,98	61,62	63,82	62,64	61,80
10.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,75	85,71	92,12	88,32	92,49	86,07
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	15,25	11,22	13,80	11,68	11,01	9,81
12.	Jumlah penduduk miskin	000 jiwa		139,20		143,35		140,25
13.	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,58	12,82	13,38	13,10	13,06	12,76
14.	Indeks Gini	Poin	< 0,38	0,361	< 0,38	0,349	< 0,38	0,345
15.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		80,04		76,51		85,00

16.	Inflasi (kota Cirebon)	Persen	≤ 5	1,16	≤ 5	1,81	≤ 5	4,68
17.	Angka Kematian Bayi	per 1000 kasus	4,05	4,14	4,04	2,95	4,03	5,13
18.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kasus	22	27	22	42	21	24

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2023

2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam kerangka RPJMD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi misi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2018-2023, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2022 dan evaluasi terhadap capaian indikator. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.60 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kab. Kuningan 2018 – 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2022		2023	KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN (CAPAIAN TAHUN 2022)	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-12		-13	-14	-15	
MISI 1 Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajadi												
1,1	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	1.1.1.	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	1	Opini BPK	Katagori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
		1.1.2.	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	2	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	74,82	85,00	75,52	75,52	Tercapai
		1.1.3.	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik									
		1.1.4.	Meningkatnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah									

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2022		2023	KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN (CAPAIAN TAHUN 2022)	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-12		-13	-14	-15	
MISI 2 Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan												
2,1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama	2.1.1.	Terwujudnya masyarakat yang agamis	3	Indeks toleransi beragama	Poin	N/A	69,5-69,80	78,27	69,9-70,2	69,9 – 70,2	Tercapai
2,2	Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	2.2.1.	Terwujudnya penegakan perundang undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	4	Indeks Rasa Aman	Poin	n/a	71-73,5	74,75	73,6-76	73,6 - 76	Tercapai
		2.2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah									
MISI 3 Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu Sajati												
3,1	Mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas	3.1.1.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69,45	70,16	69,66	69,66	Tercapai

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2022		2023	KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN (CAPAIAN TAHUN 2022)	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-12		-13	-14	-15	
3,2	Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	3.2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan									
3,3	Menciptakan sumberdaya manusia yang Santana, Basajan, Santika dan Unggul	3.3.1.	Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan									
		3.3.2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk									
		3.3.3.	Meningkatnya PUG									
		3.3.4.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga									
MISI 4 Mewujudkan pembangunan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi local untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat												
4,1	Terbangunnya desa pinunjul/unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	4.1.1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan Ekonomi Tematik Desa Pinunjul	6	Perencanaan Sektoral Terintegrasi berbasis Desa	Buah	-	1	1	1	1	Tercapai
		4.1.2.	Terbangunnya sentra unggulan pertanian									
		4.1.3.	Terbangunnya sentra unggulan wisata dan budaya									

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2022		2023	KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN (CAPAIAN TAHUN 2022)	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-12		-13	-14	-15	
		4.1.4.	Terbangunnya sentra unggulan lokal lainnya									
4,2	Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja	4.2.1.	Meningkatnya investasi skala desa	7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	1,90-3,00	5,53	2,00-3,45	2,00 - 3,45	Tercapai
		4.2.2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pangan desa									
		4.2.3.	Meningkatnya lapangan kerja di desa									
		4.2.4.	Menurunnya tingkat pengangguran									
		4.2.5.	Terciptanya wirausaha baru berbasis pesantren									
4,3	Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4.3.1.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,645	0,665	0,7446	0,670	0,670	Tercapai
MISI 5 Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari												
5,1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	5.1.1.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	9	Kemantapan Jalan	Persen	80,9	84,9	80,699	85,9	85,9	Tidak Tercapai Tetapi Naik dari Capaian Tahun Lalu

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SATUAN	KONDISI AWAL 2018	2022		2023	KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KETERANGAN (CAPAIAN TAHUN 2022)	
							TARGET	CAPAIAN	TARGET			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-12		-13	-14	-15	
		5.1.2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan									
5,2	Mewujudkan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	5.2.1.	Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	66.798	66,93	67.142	68,40	Tercapai
		5.2.2.	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari									
		5.2.3.	Meningkatnya upaya mitigasi bencana									

Tabel 2.61 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2022

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,28	69,1	69,12	68,39	69,38	69,26	69,71	69,45	70,16	69,66	Bappeda
2	Persentase Penduduk Miskin (PPM)	Persen	12,22	11,41	12,22	13,58	11,41	13,38	13,1	13,06	12,76	12,74	Bappeda
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,58	0,6	1,17	0,60	1,09	0,6	1,32	0,60	Bappeda
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,99	9,83	9,68	15,25	11,22	13,80	11,68	11,01	9,81	10,14	Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,45	6,56	6,59	-2,42-1,51	0,11	1,75-2,65	3,56	1,90-3,00	-	2,00-3,45	Bappeda
6	Indeks Gini	Poin	0,32	0,34	0,435	< 0,38	0,361	< 0,38	0,349	<0,38	-	< 0,38	Bappeda
7	Indeks Pendidikan	Poin	58,57	58,12	58,21	58,31	59,18	60,41	59,97	60,58	60,27	60,77	Bappeda
8	EYS/Harapan lama sekolah	Tahun	12,07	12,08	12,1	12,10	12,22	12,14	12,23	12,19	12,24	12,23	Bappeda
9	MYS/Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,51	7,37	7,38	7,41	7,57	7,46	7,80	7,52	7,88	7,60	Bappeda
10	Indeks EYS	Poin	67,06	67	67	67,22	67,22	67,89	67,56	67,78	68	68,04	Bappeda
11	Indeks MYS	Poin	50,08	49	49	49,40	49,4	50,47	50,24	50,47	52,53	50,61	Bappeda
12	UmurHarapan Hidup (UHH)	Tahun	73,01	73,23	73,35	73,28	73,59	73,37	73,78	73,45	74,03	73,53	Bappeda
13	Indeks Kesehatan	Persen	81,55	81,89	82,08	81,97	82,45	82,23	82,74	82,45	83,12	82,67	Bappeda
14	Persentase balita stunting	Persen	29	27	-	20	-	15	6,21	5	-	2,5	Dinkes
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	86,92	87,32	86,81	87,82	86,81	88,32	87,17	88,82	DPPKBP3A
16	Indeks Pengeluaran	Poin	66,64	69,31	69,12	66,12 – 66,39	68,44	66,22 – 66,59	68,27	66,23-66,70	-	66,33 – 66,91	Bappeda
17	Pengeluaran perkapita per Tahun (Ribu Rupiah)	Rp.	8.918	9.731	9.673	8.967 – 9.003	9.459	9.042- 9.092	9.409	9.116-9.181	9.620	9.190-9.271	Bappeda
18	Laju inflasi	Persen	2,8	≤ 5	2	≤ 5	1,16	≤ 5	1,81	≤ 5	4,68	≤ 5	Bappeda
19	PDRB per kapita (adhk)	Rp. (ribu)	14665,97	15308,94	16864,15	15980,11	16879,45	16680,7	17.483,02	17.412,00	-	-	Bappeda
20	Garis Kemiskinan	Rp.	332483	347850	340775	363217	352358	378584	358069	393951	-	409318	Bappeda

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
21	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	475284	488544	502051	502175	521677	516185	542782	530587	530825	545390	Bappeda
22	Rasio penduduk yang bekerja /Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	91,01	91,38	90,39	91,75	88,78	92,12	88,32	92,49	-	92,86	Bappeda
23	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,39	74,42	-	76,50	-	78,64	-	80,84	-	83,10	DPPKBP3A
24	Keluarga pra sejahtera	Persen	5,26	5,24	3,92	5,22	3,97	5,20	4,07	5,16	-	5,12	DPPKBP3A
25	Keluarga sejahtera I	Persen	64,03	64,03	58,02	64,03	57,56	64,02	57,60	64,02	-	64,02	DPPKBP3A
26	Keluarga sejahtera II	Persen	30,71	30,73	38,06	30,75	38,47	30,78	38,33	30,81	-	30,86	DPPKBP3A
B	ASPEK PELAYANAN UMUM												
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR												
	BIDANG PENDIDIKAN												
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Persen	74,05	74,10	74,1	74,20	78,53	74,35	78,7	74,55	93,58	74,80	Disdikbud
2	Eys/ Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,08	12,1	12,1	12,22	12,14	12,23	12,19	12,27	12,23	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	99,85	99,88	95,57	99,89	95,21	99,90	95,26	99,91	99,9	99,93	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	91,17	91,21	79,60	91,22	79,90	91,24	79,82	91,26	93,25	91,27	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100,11	100,12	100,35	100,13	98,60	100,14	100,72	100,15	100,01	100,16	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,99	99,04	96,43	99,05	97,63	99,07	96,55	99,07	99,35	99,08	Disdikbud
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Disdikbud
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,26	0,15	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,17	0,15	0,12	Disdikbud
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Ke SMP/MTs	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	Disdikbud
12	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	Persen	95,23	96	95,35	96	95,88	96,77	95,98	96,77	96,53	97,54	Disdikbud

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
13	Prosentase Guru PAUD Terlatih/ Bersertifikat	Persen	0,05	0,15	1,6	0,25	2,07	0,35	3,45	0,45	23,37	0,55	Disdikbud
14	Prosentase Ruang Kelas SD Dalam Kondisi Baik	Persen	84,47	84,72	84,73	84,97	84,87	85,22	84,92	85,47	85,56	85,72	Disdikbud
15	Prosentase Ruang Kelas SMP Dalam Kondisi Baik	Persen	97,60	97,70	97,65	97,80	97,72	97,90	97,81	98	97,95	98,10	Disdikbud
16	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/ Kursus Yang Legal	Jumlah	1,023	1,033	62	1,04	62	1,048	47	1,053	61	1,063	Disdikbud
17	Rasio Guru Terhadap Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Rasio	1:0,06	1:0,08	1:0,08	1:0,08	1:0,08	1:0,09	1:0,08	1:0,10	1:0,08	1:0,10	Disdikbud
18	Rasio Jumlah Murid Dan Guru SMP Negeri/ Swasta Non Tsanawiyah	Rasio	1:0,055	1:0,053	1:0,053	1:0,052	1:0,052	1:0,051	1:0,052	1:0,050	1:0,052	1:0,050	Disdikbud
19	MYS/Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,37	7,38	7,41	7,57	7,46	7,8	7,52	7,88	7,6	Disdikbud
20	Indeks EYS / Harapan Lama Sekolah	Poin	67,06	67	67,22	67,22	67,89	67,56	67,94	67,78	68	68,04	Disdikbud
21	Indeks MYS / Rata-rata Lama Sekolah	Poin	50,08	49	49,2	49,4	50,47	50,24	52	50,47	52,53	50,61	Disdikbud
22	Rehabilitasi ruang kelas (1.000 RK)	Ruang	110	238	276	162	479	200	244	200	213	1000	Disdikbud
23	Pembangunan ruang kelas baru (300 RKB)	Ruang	37	9	15	70	40	75	10	75	14	300	Disdikbud
24	Pembangunan perpustakaan (100 ruang)	Ruang	10	20	6	20	6	20	14	20	11	100	Disdikbud
25	Pemberian beasiswa (1.000 orang)	Orang	485	200	260	200	687	150	-	150	-	1000	Disdikbud
BIDANG KESEHATAN													
1	Nilai Akreditasi Rumah Sakit di atas 80	Persen	75	81	73,3	88	73,3	80	73,3	94	100	100	RSUD Linggajati
2	BOR		66	70	64	72	45	74	40	76	49	80	RSUD 45
3	LOS		3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
4	GDR		34	34	41	33	51	32	72	31	54	30	
5	NDR		22	22	20	21	25	20	38	19	29	18	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
6	BTO		79	69	74	69	51	69	78	69	52	69	
7	TOI		2	1	2	1	4	1	5	1	4	1	
8	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,23	73,35	73,28	73,59	73,37	73,78	73,45	74,03	73,53	Dinas Kesehatan
9	Persentase Balita Stunting	Persen	29	27	8,39	20	7,38	15	6,21	5	6,6	2,5	
10	Ketersediaan ambulance gratis	Unit	40	0	1	8	0	8	1	8	-	72	
11	Revitalisasi 1.423 posyandu	Unit	N/A	284	100%	287	100%	284	100%	284	100%	1,423	
12	Angka Kematian Ibu	Kasus	23	23	23	22	27	22	42	21	23	21	
13	Angka Kematian Bayi	Poin/1.000 kelahiran	4,06	4,05	3,55	4,05	4,14	4,04	2,95	4,03	5,13	4,02	
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganani	Persen	100	100	140,97	100	132	100	98,10	100	147,7	100	
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	87,07	90	104,13	91	103,3	92	83,29	93	98,16	93	
16	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Persen	91,49	92	96,01	80	75,00	85	61,07	87	94,59	90	
17	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/TBA	Persen	69,52	70	76,54	71,40	59,78	72,20	38,22	73,10	88	74,15	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
21	Cakupan kunjungan bayi	Persen	92,78	93	106,36	93	97,09	40	68,14	94	114,4	95	
22	Prosentase Penduduk yang menggunakan jamban keluarga	Persen		85	83,3	86	87,96	87	82,70	88	92,86		

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
23	Jumlah sarana prasarana Puskesmas, Pustu dan jaringannya dalam kondisi baik	Unit	28 Puskesmas, 52 Pustu	4 Puskesmas,	3 Puskesmas,	8 Puskesmas,	4 Puskesmas,	10 Puskesmas,	2 Puskesmas,	8 Puskesmas	0	7 Puskesmas,	
				10 Pustu	0 Pustu	10 Pustu	0 Pustu	7 Pustu	0 Pustu	5 Pustu	0	5 Pustu	
24	Jumlah puskesmas dengan perawatan	Unit	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
25	Prosentase penduduk yang mempunyai BPJS/KIS	Persen	43,42	57,34	83,78	58,12	86,21	59,06	75,87	60,19	93,33	61,54	
26	Jumlah PBI BPKJS/KIS	Orang	520,283	616,15	603,298	624,55	605,18	634,63	423,231	646,726	619,894	661,241	
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	Persentase Kemandapan Jalan dan Jembatan	Persen	80,9	81,9	75,43	82,9	76,5	83,9	79,063	84,9	80,699	85,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	59,01	60	59,77	62	60,93	64	62,27	67	62,23	70	
3	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia/ tersusun	Dokumen	N/A	3	-	9	19	14	9	3	0	32	
4	Capaian RTH (Penataan RTH)	Unit	8	2		-		-		-	0	10	DLH
5	Penanganan jalan & jembatan (target 1.000 Km)	Km	640	72	251,153	72	259,843	72	282,82	72	0	1000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Penanganan jaringan irigasi (target 18.000 Hektar)	Hektar	15000	600	823,99	600	817	600	906,63	600	741,3	18,000	
7	Penanganan Jalan dan Jembatan (1.000 Km)	Km	1,025	200		200		200		200	0	2000	
8	Akses Air Minum Layak	Persen	90,85	85,15	85,15	85,15	88,12	88,12	91,09	94,06	91,1	97,03	
9	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	87,77	89,87	89,87	89,87	93,25	83,3	94,93	96,62	81,44	98,31	
10	Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persen	36,00	32,29	32,29	32,29	34,65	34,65	37,01	39,37	35,87	41,73	
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	Persentase rumah layak huni	Persen	94,92	95,63	95,5	95,85	95,57	96,56	97	96,56	97,21	96,92	DPKPP

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	Dokumen	N/A	3		0		26	18	26	16	71	
3	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	2,67	2,52	2,6	2,83	2,55	2,66	2,78	2,66	2,70	2,57	
4	Kawasan kumuh	Persen	0,05	0,03	0,03	0,296	0	0,199	0,0154	0,199	0,030	0,152	
BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Petugas	106	107	107	108	108	109	109	110	115	111	Satpol-PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Persen	80	82	82	83	83	84	84	84	84	85	
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
4	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab./Kota	Persen	75	76	76	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	
5	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	Persen	0,2	0,2	0,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
7	Persentase Penegakan Perda	Persen	90	91	91	92	92	93	93	94	95	95	
8	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	90	90	90	95	95	95	95	95	96	98	
9	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	85	85	85	85	90	92,31	95	92	100	BPBD
10	Respons time penanganan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Hari/24 jam	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
11	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	80	85	85	90	80	95	81	100	
12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,60	0,62	0,66	0,63	0,86	0,64	0,88	0,65	0,68	0,66	
13	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	63	80	80	85	85	90	90	95	100	100	
14	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	3	-	-	1	2	2	2	2	30	7	
16	Persentase kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna)	Persen	91	92	92	80	80	85	72,57	90	81	95	
BIDANG SOSIAL													
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	38	10	38	10	35	10	2	10	92	10	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	8,80	9,20	77,25	10,00	80,02	10,00	13,39	10,00	24,09	10,00	
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	29,08	30,00	39,9	32,00	70,8	32,00	10,29	32,00	86,82	33,00	
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	113,127	130	45.647	68,926	53.423	68,926	10.223	68,926	126,779	79,578	
5	Persentase penduduk miskin	Persen	12,22	11,41	11,41	13,58	12,82	13,38	13,1	13,06	12,76	12,74	
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR													
BIDANG TENAGA KERJA													
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,99	9,83	12,29%	15,25	14,29	13,88	14,06	11,01	9,81	10,14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
2	Jumlah lapangan kerja di desa	Paket	N/A	4	4	0		1	2	2	5	9	
3	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di desa	Orang	N/A	80	80	0		20	40	40	110	180	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	58,65	59,62	61,31	60,61	61,98	61,62	63,82	62,64	61,80	63,68	
5	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	-	15	-	15	-	25	-	25	
6	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh	Persen	65,72	10,67	42,37	13,84	47,07	16,8	76,94	16,80	131,39	22,16	
7	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	99,36	74,22	72,99	30	45,44	50	55,78	57,4	65,37	68,5	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK													
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	49,52	49,52		49,54		49,54	41,00	49,54		49,54	DPPKBP3A
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,40	37,42		37,42		37,42		37,44		37,44	DPPKBP3A
3	Rasio KDRT	Persen	0,01	0,02		0,02	1:0000025	0,02	1:0000040	0,02		0,02	DPPKBP3A
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	113,127	130.000	45.647	68,926	53.423	68,926	10.223	74.000	126.779	79,578	Dinsos
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	70	100	70	100	80	100	90		100	DPPKBP3A
6	Dokumen profil gender	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		1	DPPKBP3A
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,34	86,83	86,92	87,32	86,81	87,82	86,81	88,32		88,82	DPPKBP3A
BIDANG PANGAN													
1	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	268,85	270,40	281,56	271,84	261,17	274,50	274,21	277,31	293,61	280,08	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	59	10	10	10	0	10	0	10	17	10	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
4	Penanganan Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani	Jiwa	6,511	1300	75	823	16.459	500	1021	500	470	500	
5	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	25	30	36	35	37	40	40	45	45	50	
6	Lumbung Pangan	Buah	N/A	1	1	0	0	3	1	3	3	10	
7	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	81,20	82,80	83,5	83,11	82,4	84,35	82,4	85,27	93,20	86,73	
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
1	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	52.279,27	122598	85393,4	116196,89	105613,68	115554,73	115554,64	114.881,47	118641	114124,74	Dinas Lingkungan Hidup
		Persen	75,29	82,74	0	80,25	72,49	81,09	77,11	81,91	83,09	81,91	
	- Penanganan Sampah	Ton	43.719,27	112.621,32	81545	106.078,97	95637	105.294,71	103888	104.480,21	107441	103.652,44	
		Persen	60,4	66,19	47,93	62,05	55,94	61,23	60,11	60,4	61,09	59,57	
	- Pengurangan Sampah	Ton	8560,00	9976,68	3848,4	10117,92	9976,68	10260,02	10120,64	10.401,26	11200	10472,3	
		Persen	14,89	16,55	0	18,2	16,55	19,86	18,1	21,51	22	22,34	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68,22	67,8	66,11	67,04	66,45	68,91	66.798	66,93	68,40	
	- Indeks Kualitas Air	Poin	65	65,25	99,62	48,5	48,89	49	50	49,5	51,11	50	
	- Indeks Kualitas Udara	Poin	86,83	86,88	83,59	87,25	88,94	87,5	86,52	87,75	86,96	88	
	- Indeks tutupan lahan	Poin	56,48	56,5	58,06	57,25	57,73	57,5	68,8	57,75	57,05	58	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	75,50	76,53	76,65	78	89,14	79	94,6	79,50	100	80	Disdukcapil
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL)	Persen	96,10	97,76	98,96	97,77	99,5	97,78	98,53	97,79	99,4	98	
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	17,95	22,48	27,05	22,75	40,62	23	54,68	23,15	43,46	23,25	
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	77,52	78,45	79,38	80	82,97	81	84..21	82	85	83	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	81,28	84	84,65	85	91,86	86	92,67	87	94,21	88	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			YA		YA		YA	YA	YA	YA	YA	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2	Jumlah BUMDES	Unit	180	14	165	5	185	5	229	10	349	10	DPMD
3	Status Desa :	DESA											
	- Tertinggal		42	21	13	9	4	0	0	0	0	0	
	- Berkembang		255	255	255	35	220	55	165		116	82	
	- Maju		61	61	90	25	115	45	160		183	75	
	- Mandiri		3	2	3	2	22	2	36	2	62	15	
4	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berdaya	Desa		73	189	73	189	189	189		207		
7	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
1	Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	70,68	70,87	71,03	70,21	71,56	71,61	71,6	71,94	67,24	72,24	DPPKBP3A
2	Prosentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	14,88	14,63	14,04	16,39	13,25	15,16	17,49	13,94	20,86	13,73	DPPKBP3A
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita		18,02	18,5	18,02	18,7	19	19	19	19,2	20	19,5	DPPKBP3A
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,59	0,59	0,58	0,6	1,17	0,60	1,09	0,60	1,32	0,6	DPPKBP3A
BIDANG PERHUBUNGAN													
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	55	55	59	40	58	40	59			65	Dinas Perhubungan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
2	Jumlah Prasarana Perhubungan:												
	- PJU	Titik	7482	1022	659	1022	607	1022	810	1022	496	12258	
	- Terminal	Unit	8	2	2	0	0	0	0	0	0	10	
	- Terminal Penumpang Wisata Terpadu	Unit	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
	- Kawasan/Area Parkir Terpadu	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan :												
	- Traffic light	Unit	9	9	0	0	0	0	1	1	1	0	
	- Warning Light	Unit	35	35	2	2	1	1	0	0	1	0	
	- RPPJ	Unit	114	114	0	0	0	0	22	22	21	45	
	- Rambu Lalu Lintas	Unit	2820	2820	69	69	50	50	0	0	148	0	
	- Marka Jalan	Meter	52177,71	52177.71	0	0	0	0	0	0,000	5,5	0	
	- Marka Zoss	Lokasi	4	4	3	3	2	2	0	0	1	0	
	- Guardrail	Meter	3.988	3988	1300	0	0	0	0	0	60	0	
	- Patok Pengaman Jalan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
	- Cermin Tikungan	Unit	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
	- Velican Crossing	Unit	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	
	- Rambu Elektronik	Unit	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	4	
- ATCS	Paket	0	1	1	0	0	0	0	0	8	2		
4	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala	Unit	11.000	11000	11359	10000	10202	10000	9563	10500	9237	11000	
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
1	Website Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pameran Expo		Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Prosentase Jaringan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi	Persen	100	100	65	100	70	100	75	100	80	100	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
4	Jumlah Informasi Publik yang Dipublikasikan	Buah	10	10	10	15	10	20	10	25	20	30	
5	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,165	1165	1165	1165	1165	1203	1165	1,211	1165	1,219	
6	Jumlah BTS	BTS	272	272	272	312	283	322	319	334	325	346	
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda		8	9	1	9	3	10	2	10	2	10	
8	Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persen	n/a	n/a	13,8	3,04	18	3,09	27,8	3,14	3,14	3,14	
PERTANAHAN													
1	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	81	50	78	75	60	50	46	150		69,61	BPKAD
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
1	Koperasi Aktif	Koperasi	463	480	453	490	460	500	491	510	492	520	DKUKMPerd agin
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UKM	N.A	100	470	60	90	100	150	100	200	460	
3	Desa UKM	Desa	N.A	0	2	0	1	1	1	1	2	3	
4	Desa Koperasi	Desa	N.A	0	0	0	4	1	10	1	10	3	
5	Desa Kuliner Tradisional	Desa	N.A	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
6	Wirausaha baru berbasis pesantren	Pesantren/Orang	N.A	0	24	2/40	19	2/40	18	2/40	8/40	8/160	
BIDANG PENANAMAN MODAL													
1	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDM (milyar rupiah)	Persen	42,67	30,5	113,7	20,3	45	17,3	182,78	21,4	122	22,4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Jumlah	1.719.593.858.571	637.500.000.000	725.118.137.143	165.000.000.000	251.512.406.831	897.750.000.000	1.800.363.869.952	1.115.000.000.000	7.004.865.478.704	6.416.906587.075	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	4.105	3.105	8.392	3.400	4,415	3.700	22.149	4,200	119,148	19,005	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
4	Nilai Investasi yang Ada di Desa	Jumlah	5.950.300.000	6.854.345.000	-	7.882.496.759	0	9.064.871.262	0	10.424.601.951	-	39.488.308.666	
5	Jumlah Desa dengan Nilai Investasi >200 juta	Desa	N.A	2	2	0	0	3	3	5	5	15	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
1	Prestasi Olahraga Tingkat Regional:												Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
	PORDA	Peringkat	9	-	0	-	0	-	0	8	-	8	
	POPDA	Peringkat	15	-	0	12	0	-	0	10	-	10	
BIDANG STATISTIK													
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Buku "PDRB" Kabupaten		Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	
3	Jumlah Dokumen Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen	23	23	30	50	50	70	55	70	65	70	
BIDANG PERSANDIAN													
1	Prosentase Informasi Daerah yang Wajib diamankan dengan Persandian	Persen	2,99	2,99	13,8	2,99	18	2,99	27,8	2,99	2,8	2,99	Dinas Komunikasi dan Informatika
BIDANG KEBUDAYAAN													
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	18	20	12	12	12	12	12	13	12	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	11	12	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
BIDANG PERPUSTAKAAN													

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	7000	7650	7650	5900	3032	8500	4290	8750	13719	9000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	18,15	20150	20849	22150	22802	24150	24742	26,150	24742	28150	
BIDANG KEARSIPAN													
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	65	70	70	75	75	80	80	85	85	90	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	1	1	3	1	3	1	2	5	14	
URUSAN PILIHAN													
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN)	Persen	106,72	106,5	103,64	100,5	105,31	101,65	102,25	101,95	102,95	103,25	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	285,5	302,12	311,16	326,29	315,61	355,66	321,65	387,66	350,95	419,57	
3	Cakupan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Tangkap (KUB)	Kelompok	11	13	9	15	9	17	10	19	13	21	
4	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	1250	1372	1,86	1500	1,95	1620	2.148	1.700	1.850	1835	
5	Tingkat Kesejahteraan Pembudidaya Ikan		104,47	104,25	108,35	102,60	99,35	102,75	98,8	103,50	102,75	103,95	
6	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17822,06	18638,95	20.070,90	21451,85	21.627,20	23261,55	22.981,60	25.068,65	24.567,65	26875,67	
7	Defisit Swasembada Ikan	Ton	8	7,6	8,7	5,7	7,42	3,8	6,29	1,9	2,9	-	
8	Cakupan Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	530	560	520	600	634	650	665	700	700	800	
9	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya)	Orang	17	18	21	22	21,15	22,5	22.026	23	12,238	23,5	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
10	Tingkat Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar		102,85	102,72	110,81	102,47	115,31	102,1	107,52	101,95	102,1	101,5	
11	Tingkat Produksi Pegolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	160,65	174,96	202,86	188,96	210,86	204,07	245,52	220,40	210,59	236,03	
12	Tingkat Konsumsi Ikan	(kg/kap /Tahun)	24,5	24,5	25	25	25	25	25	25	25	25	
13	Cakupan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	28	34	32	36	36	40	38	44	37	48	
14	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	Orang	2,400	2,500	2,660	2,600	2,310	2,700	22.026	2,800	1.750	3	
15	Rasio kawasan perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	199	200	150	201	200	202	200	203	200	204	
16	Prosentase Kasus Perusakan Sumberdaya Perikanan	Persen	15	14	11	13	11	12	10	11	14	10	
17	Cakupan Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	1	2	4	2	4	3	2	4	3	5	
BIDANG PARIWISATA													
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.124.948	3.187.447	4.735.408	956.234	2.480.718	975.359	2.668.442	994.864	3.124.763	1.014.762	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
2	Kampung Budaya	Desa	N/A	-	0	1	0	-	0	-	0	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BIDANG PERTANIAN													
1	Tersedianya data dan informasi Sektor Pertanian	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Nilai Tukar Petani (NTP)		n.a	103,69	101,33	103,99	101,2	104,29	96,45	104,59	100,83	104,89	NTF Prov. Jabar

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
3	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Unit	274	27	27	30	30	33	33	36	36	440	
4	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan:												
	- Padi	Kw/Ha	60	60,12	62,07	60,24	61,9	60,36	62,56	60,48	61,92	60,6	
	- Jagung		61,35	61,35	55,26	61,71	58,77	61,89	56,62	62,07	56,32	62,25	
	- Kedelai		14,5	14,57	10,35	14,64	10,66	14,71	15,36	14,78	9,8	14,85	
	- Kacang Tanah		14,71	14,86	15,16	15,01	17,52	15,16	15,65	15,31	14,33	15,46	
	- Kacang Hijau		11	11,13	10,75	11,26	10,38	11,39	10,28	11,52	9,95	11,65	
	- Ubi Kayu		160,68	162,29	169,73	163,9	177,27	165,51	167,72	167,12	180,19	168,73	
	- Ubi Jalar		212,99	213,03	121,91	213,07	215,84	213,11	216,23	213,15	214,8	213,19	
	- Porang		-	-	-	-	-	200	-	213,15	-	213,19	
5	Produktivitas Komoditas Perkebunan												
	- Pala		344,06	350,1	369	350,1	158,63	357,1	499	364,24	238,24	367,89	
	- Cengkeh		622,32	753,66	609	899,47	702,57	1049,85	604,77	1.203,70	506,66	1360,28	
	- Kopi Robusta		1247,45	1272,39	1.228	1285,11	1531,31	1285,11	855,6	1.310,82	1590,39	1310,82	
	- Kopi Arabika		192,31	900,00	1.000	909,00	1033,64	918,09	840	918,09	1077,94	927,27	
	- Tembakau		1.292,31	1.318,15	863	1.331,33	787,5	1.344,64	1039,5	1.358,09	970	1.371,67	
	- Tebu		3.722,47	3.796,91	3.242	3.834,88	3313,97	3.873,23	4970	3.873,23	3.539	3.911,96	
	- Nilam		465,00	474,30	240	479,04	240	483,83	240	488,67	-	493,56	
	- Kelapa		1.083,00	1.115,49	1.425	1.115,49	1560,95	1.183,42	1.542	1.218,93	1.129	1.255,49	
6	Produktivitas Komoditas Hortikultura												
	- Bawang Merah	Kw/Ha	98,8	93,46	104,32	94,32	102,11	95,18	98	96,04	109,86	96,90	
	- Tomat	Kw/Ha	134,5	198,41	190,85	206,93	178,83	193,83	194,86	195,77	199,23	198,71	
	- Cabe Besar	Kw/Ha	23,53	83,41	68,85	92,91	98	91,69	63,76	92,60	65,04	93,72	
	- Cabe Rawit	Kw/Ha	94,04	69,84	87,59	71,5	115,85	89,64	70,64	90,81	49,96	92,17	
	- Jamur	Kw/Ha	1.215	1.227	2.127	1.251	1.614	1.287	2.773	2	5.245,00	2,516	
	- Sayuran Lainnya	Kw/Ha	-	-	0	-	0	40	0	45	-	50	
	Produksi Buah-buahan:												

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
-	Mangga	Kw	101.288	200.000	302.941	348.490	246.464	304.330	157.301	306	261.523	309.524	
-	Rambutan	Kw	15.201	200.000	31.146	15.200	14.631	31.150	18.563	32	10.560	31.994	
-	Durian	Kw	36.918	40541	53.107	44595	35.284	53.470	32.706	54	14.787	58865	
-	Markisa	Kw	-	-	-	0,963	50	19360	60	-	75		
-	Jahe	Kw	4.259	-	1.622	-	6.786	5.693	6.872	160	3.634	175	
	Jumlah Latihan dan Kunjungan Penyuluh	Kunjungan	51.150	51.672	51.800	55.672	56.200	60.192	60.250	65	60.250	70272	
	Tingkat Kemampuan Kelompok :												
-	Kelompok Pemula	Kelompok	999	924	906	970	970	1019	1028	1,07	1028	1,123	
-	Kelompok Lanjut	Kelompok	880	1122	1140	1234	1234	1358	1240	1,493	1240	1,643	
-	Kelompok Madya	Kelompok	59	105	105	116	116	127	103	140	103	154	
-	Kelompok Utama	Kelompok	-	2	2	3	3	4	3	6	3	8	
	Cakupan Binaan Kelompok Tani	Persen				27,82		30,87			2374		
	Prosentase Kelompok Tani yang difasilitasi		10,32	12,19		12,65		25,00		30,00	26,83	40,00	
	Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Kelompok	-	-		-		25		30	30	95	
	Penguatan Kelembagaan Hortikultura	Kelompok	-	-		-		10		15	15	45	
	Produksi Daging, Susu dan Telur :												Dinas Perikanan dan Peternakan
	Meningkatnya Produksi Daging (Ton)												
	Sapi	Ton	1.280	1,286	1,835	1,181	1,494	1,216	2,193	1,252	1773	1,29	
	Domba	Ton	774	789	777	716	1,349	737	1,375	759	994	782	
	Ayam Buras	Ton	476	486	524	446	491	468	560	482	444	496	
	Ayam Ras	Ton	24.551	25,042	24,576	17,88	25,804	19,668	28,991	20,651	26.172	22,716	
	Itik	Ton	50	52	51	50	53	51	56	55	50	56	
	Meningkatnya Produksi Telur (Ton)	Ton											
-	Ayam Buras	Ton	284	290	1,094	266	1,132	279	1,290	287	1024	288	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
	- Ayam Ras Petelur	Ton	6.437	6,566	8,112	5,358	17,143	5,626	17,1200	5,907	21.823	6,202	
	- Itik	Ton	425	434	411	398	431	423	443	440	408	458	
	Produksi Susu Sapi	Ton	21.317	22,384	18,934	19,787	19,262	20,776	19,780	21,607	16.008	22,687	
	Pertumbuhan Populasi Ternak												
	- Sapi Perah		5.274	5,353	7,605	5,432	7,737	5,511	7,945	5,59	7.181	5,67	
	- Sapi Potong		29.162	29,599	28,657	27,033	29,533	27,884	29,972	28,442	26.700	29,011	
	- Domba		120.720	122,531	121,021	118,125	125,652	120,448	130,114	122,898	104.350	125,356	
	- Kambing		7.217	7,325	7,014	6,691	7,489	6,825	7,603	6,962	7.630	7,101	
	- Ayam Ras Petelur		613.905	623,114	709,393	505,858	1.499.167	556,444	1.497.136	590	1.900.399	625,221	
	- Ayam Ras Pedaging		1.692.974	3.166.381	3.124.301	2.271.879	3.280.516	2.430.911	3.685.653	2.576.766	3.327.297	2.705.604	
	BIDANG PERDAGANGAN												
1	Expot Bersih Perdagangan (Nilai Ekspor perdagangan)	(US\$)	874.774.550	4.958.558	4.186.576	4.958.558	5.099.831	4.958.558	6.731.360	4.958.557,88	6.861.579	874.774.550	DKUKMPerd agin
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (Jumlah Pasar yang direvitalisasi standar SNI)	Pasar	-	3	6	1	2	1	2	1	4	3	
3	Daerah Tertib Ukur (Jumlah UTP yang ditera/Tera Ulang)	UTTP	2,5	5.000	4.601	14.000	3.923	3.924	7.511	5.350	6.392	4.500	
4	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Jumlah produk IKM/UKM yang dipromosikan)	Produk	100	30	65	65	100	30	140	30	250	40	
5	Sentra Perdagangan	Desa	N.A	5	6	5	2	5	5	5	9	25	
	BIDANG PERINDUSTRIAN												
1	Pertumbuhan Industri	Persen	4,83	4,97	15'2	4,97	9,2	4,97	12,2	4,97	13	4,97	DKUKMPerd agin
2	Kajian dan Pengawasan Izin Usaha Industri, Standar Industri Hijau, dan Industri 4.0	Perusahaan	100	5	0	25	40	40	47	40	65	250	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
3	Peningkatan Daya Saing untuk Produk Home Industri dan kemasan	IKM	580	90	32	32	30	30	145	130	135	145	
4	Desa Industri	Desa	N.A	2	8	8	5	5	8	4	2	8	
BIDANG TRANSMIGRASI													
1	Persentase Transmigrasi	Persen	15	15	-	15	-	15	-	25	-	25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Transmigran Swakarsa	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
PERENCANAAN													
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, online, pajak online	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	Bappeda, BPKAD, Bag PBJ, Bag Organisasi, Bag. Adbang, BKPSDM, DPMPSTSP, Bapenda
2	Regulasi Desa Pinunjul	Regulasi	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Perencanaan Ekonomi Desa Pinunjul berbasis sistem	Persen	N/A	10	40	30	60	30	0	20	-	100	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	8	8	2 (SIMPEG dan e-Kinerja)	9	2 (SIMPEG dan e-Kinerja)	9	2 (SIMPEG dan e-Kinerja)	9	2	9	
10	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
KEUANGAN													
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	BL 60	BL 58	BL 33	BL 56	BL 64	BL 54	BL 40	BL 52	BL 39	BL 50	
			BTL 40	BTL 42	BTL 62	BTL 45	BTL 62	BTL 46	BTL 60	BTL 48	BTL 61	BTL 50	
4	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5	Prosentase SILPA	Persen	18	17	1,9	16	1,2	15	1,18	14	2,41	13	
6	Penerapan e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	-	-	-	50	50	50	50	20	18	50	BPKAD
		Aplikasi	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	
11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	-	20	20	20	20	75	62	50	
		Aplikasi	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
12	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	Bappenda

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
13	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	BPKAD
14	Nilai Target PAD	Milyar	344,43	336,09	301,40	311,53	298,73	341,03	343,83	356,52	157,98	369,67	Bappeda
15	Penerapan e-SAKIP	Jenis Aplikasi	2	2	-	2	-	2	-	2	-	20	Bagian Organisasi
16	Nilai SAKIP	Level	B	BB-	B	BB	B	BB+	B	A-	B	A	
17	Skor LPPD	Poin	34.975	35.035	0	3.511	0	3.412	0	3.493		3.522	
18	Persentase lembaga / organisasi keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	N/A	20	20	5	5	35	35	20	20	20	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
1	Penerapan e-planning, e-Report, e-budgeting, e-procurement, e-Sakip, e-monev, Simpeg, perijinan online, pajak online, e-SIPKD, e-ATISISBADA, e-SIM Gaji	Jenis Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	BKPSDM
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	2,98	5,58	6,1	5,86	0,41	5,86	4,84	5,86		5,86	
3	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	4,41	0,95	0,83	6,26	0,88	6,26	6,4	6,26		6,26	
PENGAWASAN													
1	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	Inspektorat
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	73	70	90	73	84,17	75	85	82	82,31	85	
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,25	0,17		0,17		0,17	0,09	0,17	0,05	0,17	

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
4	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persentase	n/a	50	57,71	55	63,37	65	68,4			75	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	68,78	71,52	74,11	-	n/a	-	n/a	-	n/a	75,52	Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Persentase lembaga keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	20	5	5	35	35	20	20	20	Bag. Kesra
2	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibina & difasilitasi	Persen	n/a	20	20	5	5	35	35	20	20	20	Bag. Kesra
3	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	9	-	-	-	-	-	-	8	-	8	Disporapar
4	Prestasi olahraga tingkat Regional (Popda)	Peringkat	15	-	-	-	-	-	-	10	-	10	Disporapar
5	NilaiTukar Petani (NTP)	Poin	n/a	<100	101,33	<100	101,2	<100	96,45	>100		>100	DKPP
6	Desa agro pinunjul	Desa	n/a	4	7	9	9	10	12	10	11	42	DKPP
7	Jumlah sentra unggulan pertanian	Desa	n/a	5	5	5	5	10	5	10		40	DKPP
8	Desa pinunjul tematik	Desa	n/a	5	8	5	5	5	8	10	15	33	DKUKMPerd agin&DKPP
9	Desa wisata	Desa	n/a	-	6	7	5	7	8	2	2	25	Disporapar
10	Indeks desa membangun	Poin	0,645	0,65	0,68	0,655	0,7019	0,66	0,7229	0,665	0,7446	0,67	DPMD
11	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
12	Kemantapan Jalan	Persen	80,9	81,9	75,43	82,9	76,5	83,9	79,063	84,9	80,699	85,9	DPUTR
13	Kondisi Baik Irigasi	Persen	59,01	60	59,77	62	56,91	64	60,93	67	62,93	70	DPUTR

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN								KONDISI AKHIR RPJMD 2023	KET
				2019		2020		2021		2022**			
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN**		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9	-10
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68	68,22	67,8	66,11	67,04	66,45	68,91	66.798	66,93	68,40	DLH
15	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	82,08	83,62	83,4	74	80,04	74,12	76,51	74,82	85,00	75,52	Bappeda
16	Indeks toleransi beragama	Poin	n/a	68.3 – 68.6	73,83	68.7 – 69.0	67,46	69.1 – 69.4	72,39	69,5 – 69,80	78,27	69.9 – 70.2	Badan Kesbangpol
17	Indeks gotong royong (aksi bersama)	Poin	n/a	n/a	n/a	0,45	n/a	0,46	n/a	0,48	n/a	0,5	Badan Kesbangpol

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan maupun Indikator Kinerja Utama pembangunan, terdapat permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya spesifik pada Tahun 2024. Penentuan permasalahan pembangunan daerah selain memperhatikan data sebagaimana telah diuraikan di atas, juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dan hasil penjarangan permasalahan tim monitoring dan evaluasi musrenbang Tahun 2024.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan-permasalahan pada bagian ini diperoleh dari hasil analisis data pada bagian sebelumnya dan telaahan terhadap permasalahan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Permasalahan tersebut kemudian dikaji atas dasar sasaran pembangunan daerah dan arah pembangunan untuk Tahun 2024. Menurut dokumen RPD Kabupaten Kuningan, terdapat 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah. Adapun arah pembangunan di Tahun 2024 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara menciptakan Sumberdaya Manusia baik SDM birokrasi, tenaga teknis maupun masyarakat yang sehat, unggul, produktif serta berintegritas yang akan mempengaruhi produktivitas dan memunculkan inovasi-inovasi sebagai modal awal menumbuhkan ekonomi kreatif yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

Tabel 2.62 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran RPD	Permasalahan
1. Menurunnya Tingkat kemiskinan	1) Masih tingginya angka kemiskinan; 2) Masih rendahnya akurasi data dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin.
2. Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	1) Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri; 2) Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM; 3) Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal; 4) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar; 5) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6) Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi; 7) Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan.
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan 2) Masih adanya Penanganan pasien tidak mampu yang belum tercover jaminan kesehatan 3) Belum terjaminnya penyelesaian biaya bagi pasien tidak mampu oleh program jaminan kesehatan 4) Masih kurangnya Jumlah SDM jabatan fungsional Kesehatan dan dokter spesialis 5) Masih terbatasnya sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan pelayanan
4. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	1) Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pendidikan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah; 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan;

Sasaran RPD	Permasalahan
bidang pendidikan dan olahraga	3) Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai.
5. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan; 2) Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender; 3) Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan; 4) Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan/rehabilitasi; 5) Belum optimalnya penyelenggaraan UPTD PPA sebagai One Stop Service bagi pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak.
6. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB; 2) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern masih stagnan; 3) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); 4) Masih banyaknya perkawinan usia muda (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
7. Meningkatnya investasi daerah	1) Masih rendahnya tingkat investasi sehingga berpengaruh pada sedikitnya serapan tenaga kerja; 2) Belum optimalnya nilai investasi pada berbagai sektor; 3) Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 4) Masih belum berkembangnya sentra industry.
8. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	1) Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha; 2) Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang professional; 3) Masih tingginya angka pengangguran; 4) Rendahnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat; 5) Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan.
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur,	1) Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata diseluruh daerah terutama disentra produksi pangan daerah;

Sasaran RPD	Permasalahan
<p>Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air; 3) Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan; 4) Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan; 5) Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal; 6) Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah; 7) Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan; 8) Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah; 9) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastuktur daerah; 10) Masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum; 11) Belum ditetapkannya regulasi penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku; 12) Alokasi ruang untuk pengembangan Investasi Daerah; 13) Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik; 14) Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan; 15) Belum tersedianya fasilitas parkir yang aman, nyaman, tertib dan teratur; 16) Belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan;

Sasaran RPD	Permasalahan
	<p>17) Kurang efektifnya kinerja pelayanan uji KIR, dan perparkiran;</p> <p>18) Meningkatnya fenomena ODOL (Over Dimension Over Load);</p> <p>19) Mulai menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;</p> <p>20) Cakupan pelayanan persampahan masih rendah baik ditinjau dari luasan wilayah maupun besaran timbulan sampahnya;</p> <p>21) Potensi ancaman bencana di Kabupaten Kuningan yang cukup tinggi;</p> <p>22) Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum didukung optimal oleh sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan anggaran;</p> <p>23) Masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>
<p>10. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya</p>	<p>1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya minat berusaha di bidang pertanian;</p> <p>2) Masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu;</p> <p>3) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi;</p> <p>4) Minimnya generasi penerus muda yang bergerak disektor pertanian;</p> <p>5) Menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian;</p> <p>6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian;</p> <p>7) Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian;</p> <p>8) Besarnya potensi kepariwisataan belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana;</p> <p>9) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kepariwisataan;</p> <p>10) Belum maksimalnya aksesibilitas dan amenities untuk kaum lansia dan difabel di jasa usaha pariwisata;</p> <p>11) Kemudahan investasi sektor pariwisata belum optimal;</p> <p>12) Sadar wisata masyarakat di sekitar destinasi pariwisata belum optimal;</p>

Sasaran RPD	Permasalahan
	<p>13) Masih rendahnya kompetensi pekerja pada sektor kepariwisataan;</p> <p>14) Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan pariwisata baik pada aturan maupun kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata;</p> <p>15) Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;</p> <p>16) Belum optimalnya event kepariwisataan sebagai promosi wisata dan pameran kepariwisataan yang berbasis audio visual;</p> <p>17) Akses permodalan bagi pelaku ekraf belum optimal;</p> <p>18) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual belum terbangun.</p>
<p>11. Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>1) Belum optimalnya profesionalitas ASN;</p> <p>2) Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik;</p> <p>3) Belum optimalnya ketercapaian nilai SAKIP;</p> <p>4) Kurangnya Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;</p> <p>5) Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah.</p>
<p>12. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah</p>	<p>1) Tahun 2024 merupakan tahun politik yang dapat mempengaruhi masalah ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Kuningan.</p>

2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan-permasalahan pada bagian ini selain didasarkan pada hasil analisis data dan telaahan terhadap permasalahan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, juga didasarkan pada hasil penjaringan permasalahan dari seluruh perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan maupun penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.2.1 Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu:

- 1) Kurangnya sarana prasarana dan Tenaga Pendidik PAUD;
- 2) Belum optimalnya angka partisipasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Distribusi guru belum merata;
- 4) Partisipasi Sekolah untuk jenjang SD dan SMP belum 100%;
- 5) Masih ada Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD 0,01 dan SMP 0,15;
- 6) Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM Perpustakaan;
- 7) Kurang memadainya fasilitas perpustakaan yang dapat mengurangi kinerja dalam pengelolaan perpustakaan;
- 8) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah (Putus Sekolah), dan belum meratanya penerima bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin/ Berprestasi.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama urusan kesehatan, yaitu:

- 1) Penemuan kasus stunting yang masih tinggi;
- 2) Masih ditemukannya balita gizi buruk (Sangat kurus dan Kurus);

- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Aktif di Desa/Kelurahan;
- 4) Masih tingginya kasus kematian bayi;
- 5) Masih tingginya kasus kematian Ibu;
- 6) Belum terpenuhinya 9 tenaga dasar di puskesmas;
- 7) Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan yang update;
- 8) Masih terdapatnya kasus komplikasi kebidanan;
- 9) Masih ada persalinan yang di tolong oleh non nakes;
- 10) Belum seluruh desa/kel menjadi desa UCI;
- 11) Masih ditemukannya kasus AFP setiap tahunnya;
- 12) Masih meningkatnya kasus TB;
- 13) Peningkatan kasus DBD;
- 14) Masih terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS setiap tahunnya;
- 15) Masih terjadi kasus kematian bayi;
- 16) Masih ada ibu hamil yang ditemukan pada kunjungan kehamilan K4;
- 17) Masih terdapat bayi baru lahir dengan komplikasi;
- 18) Masih rendahnya capaian penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
- 19) KLB yang ditangani;
- 20) Masih terdapat sumber air minum yang belum memenuhi syarat;
- 21) Cakupan desa ODF yang belum mencapai target;
- 22) Belum terpenuhinya sarana prasarana kesehatan dengan kondisi baik;
- 23) Masih rendahnya capaian UHC (Universal Health Coverage);
- 24) Masih rendahnya intervensi keluarga program PISPK;
- 25) Rendahnya tata kelola kesehatan masyarakat yang baik;
- 26) Belum semua puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional (baru 10%);
- 27) Program layad rawat tidak terencana (PSC 119) belum dilaksanakan di kab Kuningan;

- 28) Masih rendahnya cakupan penderita HT yang dilayani sesuai standar;
- 29) Masih tingginya penduduk yang merokok;
- 30) Masih tingginya proporsi cacat tingkat 2 pada kasus baru kusta;
- 31) Belum terukurnya tingkat kepuasan layanan Rumah Sakit Linggajati;
- 32) Belum optimalnya pelayanan RSUD 45;;
- 33) Belum terukurnya tingkat kepuasan layanan RSUD 45;
- 34) Belum terpenuhinya dokter spesialis bedah mulut;
- 35) Belum optimalnya mutu pelayanan rumah sakit.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

- 1) Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata diseluruh daerah terutama disentra produksi pangan daerah;
- 2) Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air;
- 3) Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan;
- 4) Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan;
- 5) Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- 6) Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah;
- 7) Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan;
- 8) Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkaran yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah;

- 9) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastruktur daerah;
- 10) Masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum;
- 11) Belum ditetapkannya regulasi penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Alokasi ruang untuk pengembangan Investasi Daerah.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu :

- 1) Pendataan Rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku;
- 2) Belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan pemukiman kumuh secara menyeluruh dan mendalam;
- 3) Penentuan kawasan perdesaan dan perkotaan dalam penentuan SK Kumuh;
- 4) Dokumen perencanaan sektoral (RPKP, RP2KP, RP3KP, RP2KPKPK, RPLP, MASTERPLAN Kawasan Kumuh dll) belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru;
- 5) Penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor;
- 6) Masih banyak masyarakat bermukim dilokasi yang tidak sesuai tata ruang;
- 7) Masih banyaknya warga yang bermukim dilokasi rawan bencana.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, yaitu :

- 1) Masih kurang optimalnya penegakan peraturan daerah yang berlaku;
- 2) Kurang memadainya sarana, prasarana serta SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar;
- 3) Rendahnya pendidikan berpolitik dan wawasan kebangsaan;
- 4) Masih terdapatnya konflik yang belum terselesaikan;
- 5) Belum optimalnya pelayanan pra bencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana sehingga tingginya risiko bencana;
- 6) Belum optimalnya ketercapaian nilai ketahanan daerah;
- 7) Potensi ancaman bencana di Kabupaten Kuningan yang cukup tinggi;
- 8) Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum didukung optimal oleh sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan anggaran;
- 9) Masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

f. Urusan Sosial

Permasalahan utama urusan sosial, yaitu :

- 1) belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar di luar panti;
- 2) belum optimalnya pelayanan pasca tanggap darurat bencana;
- 3) Masih banyaknya PMKS yang belum tersentuh penanganan;
- 4) Data Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar perangkat daerah;
- 5) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial;
- 6) Belum tersedianya rumah singgah dan/atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan PPKS terlantar, jalanan dan anak berhadapan dengan hukum.

4.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan utama urusan tenaga kerja, yaitu :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran;
- 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
- 5) Kompetensi pencari kerja relatif belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- 6) Kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah;
- 7) Pertumbuhan pencari kerja tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja;
- 8) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

- 1) Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- 2) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 3) Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender;
- 4) Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan.

c. Urusan Pangan

Permasalahan utama urusan pangan, yaitu :

- 1) Ketersediaan pangan cenderung menurun;
- 2) Belum meratanya Distribusi pangan;
- 3) Belum terjaminnya Keamanan Pangan;
- 4) Belum optimalnya konsumsi pangan local.

d. Urusan Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanahan, yaitu masih terdapat tanah negara yang belum jelas legalitas kepemilikannya.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup, yaitu :

- 1) Pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong terus upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber;
- 2) Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang terbuka hijau serta upaya penyedia fasilitas umum di RTH;
- 3) Pencemaran air yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama dari limbah domestik perumahan dan limbah kotoran hewan yang belum terkendali dan terkelola dengan baik sehingga mencemari DAS yang dijadikan sumber air untuk kegiatan sehari-hari;
- 4) Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagaimana mestinya, sedangkan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian lingkungan;
- 5) Rendahnya kesadaran Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengujian secara berkala.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

- 1) belum optimalnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Finger Print, Card Reader, Camera, Iris Scanner, Signature Pad, Printer KRp-eL Printer KIA dan Komputer, Mobil Pelayanan);
- 3) Kurangnya informasi mengenai pembuatan dokumen administrasi kependudukan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, yaitu belum optimalnya keberdayaan masyarakat dan desa.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan utama urusan perhubungan, yaitu:

- 1) Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik;
- 2) Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan;
- 3) Rendahnya kesadaran Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengujian secara berkala;
- 4) Belum tersedianya fasilitas parkir yang aman, nyaman, tetib dan teratur;
- 5) Rendahnya kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap PAD;
- 6) Belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan;
- 7) Belum tersedianya sistem transportasi cerdas.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika, yaitu :

- 1) Belum terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika perangkat daerah;
- 2) Masih adanya desa/kelurahan Blank Spot.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan utama urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, yaitu :

- 1) belum optimalnya peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah;
- 2) Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadi anggota koperasi;
- 3) Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian daerah, tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal, yaitu :

- 1) Masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 2) Belum memadainya sarana prasarana yang mendukung pengembangan investasi.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olah raga, yaitu:

- 1) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumberdaya kepeloporan;
- 3) Belum optimalnya peran Organisasi kepemudaan;
- 4) Masih kurangnya wirausahawan-usahawan muda;
- 5) Belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda;
- 6) Belum adanya pendamping pengembangan kepemudaan;
- 7) Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai.

n. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama urusan kebudayaan, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah;
- 2) Rendahnya apresiasi terhadap seni, karya, dan budaya daerah;
- 3) Terbatasnya kapasitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.

o. Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan, yaitu:

- 1) belum optimalnya sarana prasarana dan SDM Perpustakaan;
- 2) rendahnya minat baca masyarakat.

p. Urusan Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan, yaitu :

- 1) Kurangnya sarana prasarana dan SDM kearsipan;
- 2) Belum terselamatkannya Arsip Statis.

4.1.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat produksi perikanan;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan hasil perikanan.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan utama urusan pariwisata, yaitu:

- 1) Belum optimalnya penataan Daya Tarik Wisata;
- 2) Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanian, yaitu :

- 1) Menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian;
- 2) Masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian;
- 4) Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian;
- 5) Belum optimalnya pendampingan secara intensif kepada petani;
- 6) Belum optimalnya produksi peternakan baik daging, telur, maupun susu, dan produk turunannya untuk meningkatkan pendapatan peternak;
- 7) belum termanfaatkannya kotoran ternak yang siap pakai untuk kebutuhan pertanian;
- 8) Belum tersedianya Rumah Potong Unggas.

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama urusan perdagangan, yaitu kenaikan inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan (Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi covid-19.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum optimalnya pemberdayaan transmigrasi lokal.

4.1.1.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu :

- 1) Data sektoral yang tidak *up to date*;
- 2) Mekanisme usulan perencanaan daerah yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para mitra pembangunan;
- 3) Belum optimalnya perencanaan yang partisipatif;
- 4) Masih rendahnya ketersediaan data sektoral yang berkualitas;
- 5) Kurangnya pemahaman terkait mekanisme usulan perencanaan daerah.

b. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum berkembangnya penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

c. Keuangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu

- 1) masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Belum maksimalnya Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- 4) Belum optimalnya penyusunan / pembuatan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan program aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya profesionalitas ASN

e. Pengawasan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan public.

4.1.1.4 Fungsi Penunjang Lainnya

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- 1) Terbatasnya Sarana Prasarana Kerja Untuk Mendukung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Minimnya Informasi Hasil Pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Kurangnya Pemahaman Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah;
- 4) kurangnya pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 5) Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah;
- 6) Adanya Perkara Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang harus ditindak lanjuti di Daerah;
- 7) Belum optimalnya pembangunan Jaring Pengaman Sosial (Keagamaan, Pangan, Kesehatan, Kepemudaan dan Pendidikan) dalam Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan;
- 8) Masih rendahnya penggunaan Produk Lokal dalam kegiatan belanja pemerintah;
- 9) Belum optimalnya kualitas Pengendalian Kegiatan Pembangunan, Pelaporan Hasil Kinerja Pembangunan dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan;
- 10) Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
- 11) Belum optimalnya Pengendalian Stabilitas Harga Komoditas Bahan Pokok;

- 12) Masih belum optimalnya penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponomi (alam, buatan, dan budaya).

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tidak bisa maksimal sesuai target dikarenakan terkendala lama waktu pembahasan yang sangat variatif dan bahan bahan pendukung dari perangkat daerah yang bersangkutan masih banyak kekurangan.

c. Kecamatan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- 1) Adanya konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 2) Belum optimalnya partisipasi demokrasi;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan ekonomi;
- 4) Belum optimalnya koordinasi perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- 5) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan.

2.3.3 Permasalahan Utama Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang ingin ditangani di Tahun 2024 pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) permasalahan utama, yaitu :

1. Permasalahan daya saing sumberdaya manusia

Permasalahan ini antara lain masih rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan di mana TPAK-nya hanya sebesar 61,80% pada Tahun 2022, masih relatif tingginya kasus

stunting, kematian bayi dan kematian ibu masing-masing sebesar 6,21% (Tahun 2021), 5,13% (Tahun 2022), dan 24 kasus (Tahun 2022).

2. Permasalahan daya saing perekonomian

Permasalahan ini antara lain belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah yang baru mendorong TKK sebesar 86,07% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 119.148 orang, belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dengan angka kemiskinan sebesar 12,76% Tahun 2022 (terbesar kedua di Jawa Barat), dan masih tingginya angka pengangguran sebesar 9,81% Tahun 2022 (tertinggi keenam di Jawa Barat).

Pembangunan ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur wilayah dan layanan dasar yang memadai serta menjamin adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Beberapa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 masih di bawah target seperti persentase kamantapan jalan baru mencapai 80,699% dari target 84,9%, persentase jaringan irigasi kondisi baik baru mencapai 62,23% dari target 67%, persentase akses air minum layak sebesar 91,10% dari target 94,06%, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 81,44% dari target 96,62%, dan persentase akses air minum perpipaan sebesar 35,87% dari target 39,37%.

3. Permasalahan kebencanaan dan lingkungan hidup

Permasalahan ini disebabkan karena sebagian wilayah Kabupaten Kuningan merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana alam khususnya bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti banjir bandang, banjir geomorfologis, kebakaran hutan, dan gerakan tanah/longsor. Kejadian bencana di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami peningkatan dari 220 kejadian di Tahun 2019 menjadi 334 kejadian di Tahun 2022. Kurang optimalnya penanganan

kebencanaan dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur, menurunnya produktivitas pembangunan, dan kemungkinan banyaknya korban jiwa.

4. Tantangan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tahun 2024 merupakan tahun dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan selain harus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi khususnya dalam pelaksanaan sistem merit kepegawaian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga harus menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilukada tersebut. Integrasi dari ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat yang sudah mencapai angka 85% di Tahun 2022.

2.3.4 Isu Strategis Pembangunan

Dengan mempertimbangkan isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran, serta memperhatikan permasalahan utama pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka isu strategis untuk pembangunan Tahun 2024, yaitu:

1. belum optimalnya penanggulangan kemiskinan
2. masih tingginya angka pengangguran
3. masih rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan
4. masih tingginya kasus stunting, kematian bayi & kematian ibu
5. tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah
7. belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar
8. tantangan perubahan iklim dan potensi bencana
9. tantangan pelaksanaan pemilukada yang aman

2.4 Inovasi Daerah

2.4.1 Pelaksanaan Desa Pinunjul

Pembentukan desa pinunjul dimaksudkan untuk mewujudkan strategi pembangunan yang mengacu pada keunggulan karakteristik lokal dan menjadi pendorong percepatan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kegiatan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis desa di kabupaten kuningan.

Tabel 2.63 Capaian Desa Pinunjul Sampai Dengan Tahun 2022

NO	BIDANG/KEGIATAN	TARGET	2020		2021		2022	
		RPJMD	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Desa Pinunjul Wisata	25	7	5	7	8	2	2
	75 Desa Pinunjul Tematik:							
2	- Desa Pinunjul Agro	42	9	9	10	12	10	11
	- Desa Pinunjul Industri	18	5	4	4	6	4	2
	- Desa Pinunjul UMKM	3	0	1	1	1	1	2
	- Desa Pinunjul Koperasi	3	0	4	1	8	1	10
	- Desa Pinunjul Budaya	1	1	1	0	0	0	0
	- Desa Pinunjul Kuliner Tradisional	1	0	0	1	0	0	1
	- Desa Pinunjul Pendidikan	7	7	7	3	0	0	0

Sumber: Bappeda Tahun 2023

Desa Pinunjul Wisata :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 25 desa pinunjul wisata, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 21 desa. Untuk itu, masih terdapat selisih 4 desa yang harus dicapai di Tahun 2023. Dengan mempertimbangkan kecenderungan hasil dan kinerja dari tahun sebelumnya, target 25 desa wisata diperkirakan akan bisa dicapai.

Desa Pinunjul Agro :

Berdasarkan target capaian sesuai RPJMD sebanyak 42 desa pinunjul agro, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 28 desa. Dengan demikian, sisa capaian target masih sebanyak 14 desa dan tersisa waktu 1 tahun sesuai dengan target RPJMD, dan apabila melihat hasil dan kinerja dari tahun sebelumnya, target 42 desa pinunjul agro diperkirakan akan bisa dicapai.

Desa Pinunjul Industri :

Berdasarkan target RPJMD, jumlah desa pinunjul industri sudah tercapai di Tahun 2022 yakni sebanyak 18 desa.

Desa Pinunjul UMKM :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 3 desa pinunjul UMKM, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 6 desa. Adanya capaian yang melebihi target tersebut terjadi karena ada perubahan lokasi yang dilakukan oleh dinas teknis dengan menyesuaikan terhadap kondisi yang berkembang.

Desa Pinunjul Koperasi :

Dari target capaian sesuai RPJMD sebanyak 3 desa pinunjul koperasi, capaian sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 22 desa. Adanya capaian yang melebihi target tersebut terjadi karena ada perubahan lokasi yang dilakukan oleh dinas teknis dengan menyesuaikan terhadap kondisi yang berkembang.

Desa Pinunjul Budaya :

Hingga Tahun 2022, jumlah desa pinunjul budaya sudah mencapai target RPJMD yakni sebanyak 1 desa.

Desa Pinunjul Kuliner Tradisional :

Hingga Tahun 2022, jumlah desa pinunjul kuliner tradisional sudah mencapai target RPJMD yakni sebanyak 1 desa.

Desa Pinunjul Pendidikan :

Sebagaimana tipologi desa pinunjul di atas, hingga Tahun 2022, jumlah desa pinunjul Pendidikan pun sudah mencapai target RPJMD yakni sebanyak 7 desa.

2.4.2 Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang menjadikan sektor pertanian termasuk peternakan di dalamnya sebagai sektor basis dan memegang peranan penting perekonomian daerah. Pembangunan peternakan merupakan bagian dari reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan program Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa).

Kabisa Desa merupakan suatu konsep pengembangan pertanian terpadu antara sektor pertanian (tanaman sorgum, cabe jawa, hortikultura dan padi organik) dengan agribisnis ternak (domba, ayam, pengolahan pakan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik) dan dengan agribisnis ikan (ikan nila dengan sistem bioplok). Program Kabisa Desa mulai dilaksanakan pada Tahun 2023.

2.4.2.1 Pelaksanaan Inovasi Gerakan Pengembangan Kambing dan Ayam (Gerbang Kaya)

Gerbang Kaya selaras dengan konsep *integrated farming system* yang dicirikan dengan adanya interaksi dan keterkaitan yang sinergis antar berbagai aktivitas pada sektor pertanian (padi organik, sorgum, Cabe jawa dan hortikultura) dalam mewujudkan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Adanya keterkaitan dalam sistem produksi dapat

mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada masukan produksi eksternal baik berupa pupuk, pestisida dan benih. Berkurangnya masukan eksternal dapat mendatangkan nilai tambah yang menjadi pendapatan petani.

Gerbang Kaya di arahkan pada desa desa miskin ekstrim di kecamatan darma, yaitu Desa Tugumulya, Desa Karang Sari, Desa Cageur, Desa Situsari dan Desa Paninggaran. Gerbang Kaya suatu upaya penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi usaha ternak yang lebih efisien dan produktif yang ramah lingkungan. Nilai kebaruan kegiatan ini yaitu pengembangan usaha ternak domba yang terintegrasi dengan unit pengolahan pakan dan unit pengolahan pupuk organik dari limbah ternak padat dan cair. Dengan adanya unit pengolahan pakan dari limbah silase dan rumput odod, para peternak akan lebih efisien dalam pemberian pakan yang lebih efisien dan efektif karena tidak perlu mencari rumput setiap hari. Selanjutnya, para peternak juga dilatih dan diberi bantuan sarana prasarana untuk pengolahan pupuk organik padat dan cair dari limbah ternak domba. Berdasarkan rangkaian tersebut para peternak selain mendapat pendapatan dari usaha ternak domba juga mendapat penghasilan dari usaha pupuk organik dan silase (pakan ternak) Ternak ayam yang dikembangkan jenisnya adalah ayam sentu diberikan pada sasaran manfaat pada keluarga miskin sebanyak 2.600 orang yang tersebar pada 5 desa miskin ekstrim di Kecamatan Darma, Kebaruan kegiatan ternak ayam diantaranya adalah jenis ayam unggul yang mempunyai produktivitas pedaging dan memiliki potensi ayam telur yang diarahkan para penerima manfaat selain bisa mengkomsumsi telur dan daging juga dikembangkan pada pengembangan usaha menjual DOC ayam sentul yang saat ini harga dan pasarannya sangat prospektif.

2.4.2.2 Pelaksanaan inovasi sistem kolam bioflock optimalisasi ideal naikan ekonomi keluarga pelaku budidaya pondasi nikmat illahi (si kobo naek kuda poni)

Produk pangan berbasis ikan menjadi andalan pemerintah dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui teknik bioflock yang banyak diterapkan pada budidaya perikanan. Teknologi budidaya ikan sistem bioflock adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai pencernaan pakan.

Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting, karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%. Di sisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga akan menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini dipicu karena keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga industri masih sangat tergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan. Dengan mekanisme Kegiatan KABISA Desa pembudidaya ikan akan dibekali juga dengan keterampilan pembuatan pakan ikan dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitarnya.

Kegiatan Sistem Kolam *Bioflock* Optimalisasi Ideal Naikkan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmat Illahi (Si Kobo Naek Kuda Poni) adalah sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial pada sektor kelautan dan perikanan. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan yaitu meliputi:

1. Pengadaan prasarana budidaya perikanan, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan beton, pekerjaan pemasangan bak bulat, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan instalasi air,

- pekerjaan instalasi aerasi, pekerjaan saluran outlet dan pekerjaan lain-lain;
2. Pengadaan sarana budidaya perikanan, meliputi pengadaan benih ikan nila ukuran 8-10 cm, pengadaan pakan *starter* ukuran 1 mm, pakan pembesaran ukuran 2 mm dan pakan pembesaran ukuran 3 mm.
 3. Pengadaan obat ikan dan vitamin, meliputi pengadaan probiotik serbuk, gara, gula pasir, kapur
 4. Pengadaan mesin meliputi pengadaan timbangan duduk digital, Hiblow LW 240 Yasunaga, Genset 1.5 KVA setara krisbow, dan Pompa air in/out dia 1 inc 200 watt Sanyo.
 5. Biaya Penunjang untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat persiapan, atk kegiatan, persiapan kontraktual, *monitoring* dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada bab ini akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Didalamnya termasuk estimasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan anggaran. Tujuan utamanya adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2024 memuat penjelasan capaian ekonomi tahun 2022 dan target capaian pada akhir tahun 2023, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam perekonomian. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan tersebut memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan ekonomi Nasional Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang yang menitikberatkan pada 1) Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024 (Percepatan Transformasi Ekonomi, Pembangunan Inklusif, Pembangunan Berkelanjutan, dan Mewujudkan Stabilitas Ekonomi); 2) Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi; 3) Stabilitas Eksternal; 4) Arah Kebijakan Fiskal (Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Defisit dan Pembiayaan Anggaran); 5) Stabilitas Moneter; 6) Stabilitas Sistem Keuangan; 7) Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Pemerataan Pembangunan).

Adapun arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang bertema “**Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di segala Bidang**”. Pelaksanaannya ditetapkan melalui beberapa arah kebijakan yaitu:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan;
- Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing;
- Pengelolaan pertanian dan perikanan;
- Energi baru dan terbarukan;
- Industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif;
- Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Tema dan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat didukung dengan komitmen untuk (1) pencapaian target indikator makro pembangunan yang belum terselesaikan pada Tahun 2023; (2) pemulihan dan pementapan ekonomi Jawa Barat setelah masa pandemi Covid-19; (3) penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan dan stunting; dan (4) penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan.

Selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan merumuskan arah kebijakan ekonomi selaras dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, yakni:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah;
2. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif; dan
5. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Penetapan tujuan daerah dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja yang mencerminkan penuntasan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel pencapaian indikator makro pembangunan berikut:

Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,71	70,16	0,45
2	Angka Kemiskinan	13,10%	12,76%	0,34
3	Angka Pengangguran	11,68%	9,81%	1,87
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,56%	5,53%*	1,97
5	Pengeluaran perkapita	Rp9.409.000,-	Rp9.620.000,-	211.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,349	0,345	0,004

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan 2022

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju pertumbuhan produk dari seluruh kegiatan ekonomi pada suatu kawasan berdasarkan harga konstan yang telah ditetapkan. Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mencapai 18.450,32 miliar rupiah, meningkat 5,53 persen dibandingkan Tahun 2021 senilai 17.483,56 miliar rupiah. Pertumbuhan sektor dalam PDRB Tahun

2022 mengalami kenaikan hampir di semua sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Sektor utama perekonomian masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,67 persen); sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,52 persen), dan Sektor Transportasi dan Pergudangan (13,98 persen). Secara rinci data dari penjabaran diatas tersaji pada tabel 3.2-3.4 dibawah ini.

Tabel 3.2 Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*)	2022**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.379,29	3.540,57	3.591,62	3.675,49	3.812,90
B	Pertambangan dan Penggalian	229,36	223,47	217,43	245,14	243,51
C	Industri Pengolahan	376,81	411,82	416,25	430,15	453,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,55	15,09	14,79	16,77	17,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	14,53	14,99	16,32	17,36	17,85
F	Konstruksi	1.452,84	1.543,85	1.433,51	1.534,20	1.579,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.541,67	2.737,99	2.655,96	2.751,05	2.862,89
H	Transportasi dan Pergudangan	2.190,20	2.323,00	2.287,91	2.293,42	2.580,10
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	296,44	320,06	307,84	310,70	349,94
J	Informasi dan Komunikasi	841,97	919,42	1.142,56	1.223,60	1.304,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	823,96	855,98	859,97	903,64	894,50
L	Real Estate	507,04	553,01	554,89	618,42	653,07
M.N	Jasa Perusahaan	71,74	78,04	75,83	82,81	92,48
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	537,05	561,60	540,31	531,67	525,34
P	Jasa Pendidikan	1.663,63	1.812,97	1.843,53	1.896,95	2.020,36

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*)	2022**)
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	277,91	302,65	292,77	314,78	333,66
R,S, T,U	Jasa lainnya	603,00	649,64	631,27	636,86	708,17
PDRB		15.821,9 9	16.864, 15	16.882,7 6	17.483,02	18.450,32

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018-2023

*) : Angka Sementara **) : Angka Sangat Sementara

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (%) Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2022

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,70	4,77	1,44	2,34	3,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,54	-2,57	-2,70	12,75	-0,66
3.	Industri Pengolahan	5,30	9,29	1,07	3,34	5,54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,34	3,74	-1,99	13,34	3,52
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	7,36	3,21	8,85	6,39	2,82
6.	Konstruksi	8,86	6,26	-7,15	7,02	2,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	4,11	7,72	-3,00	3,58	4,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,42	6,06	-1,51	0,24	12,50
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	7,97	-3,82	0,93	12,63
10.	Informasi dan Komunikasi	9,04	9,20	24,27	7,09	6,64
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,21	3,89	0,47	5,08	-1,01
12.	Real Estate	8,87	9,07	0,34	11,45	5,60
13.	Jasa Perusahaan	9,59	8,78	-2,83	9,21	11,68
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,55	4,57	-3,79	-1,60	-1,19
15.	Jasa Pendidikan	10,21	8,98	1,69	2,90	6,51
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	8,90	-3,26	7,52	6,00
17.	Jasa Lainnya	9,03	7,73	-2,83	0,89	11,20
PDRB		6,43	6,59	0,11	3,56	5,53

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2022 (%)

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,21	24,36	24,60	23,91	23,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,47	1,34	1,21	1,22	1,27

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
3.	Industri Pengolahan	2,24	2,24	2,25	2,27	2,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
6.	Konstruksi	8,78	8,89	8,92	8,16	8,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	14,22	14,26	14,00	14,06	13,91
8.	Transportasi dan Pergudangan	15,17	14,72	14,24	14,02	14,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,85	1,86	1,82	1,80	1,93
10.	Informasi dan Komunikasi	3,63	3,58	3,51	4,27	4,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,61	5,55	5,52	5,79	5,56
12.	Real Estate	2,61	2,59	2,58	2,56	2,71
13.	Jasa Perusahaan	0,42	0,45	0,44	0,46	0,49
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,01	3,84	3,67	3,11
15.	Jasa Pendidikan	11,33	11,90	12,42	12,54	12,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,58	1,61	1,57	1,60
17.	Jasa Lainnya	3,23	3,28	3,29	3,15	3,32
PDRB		100	100	100	100	100

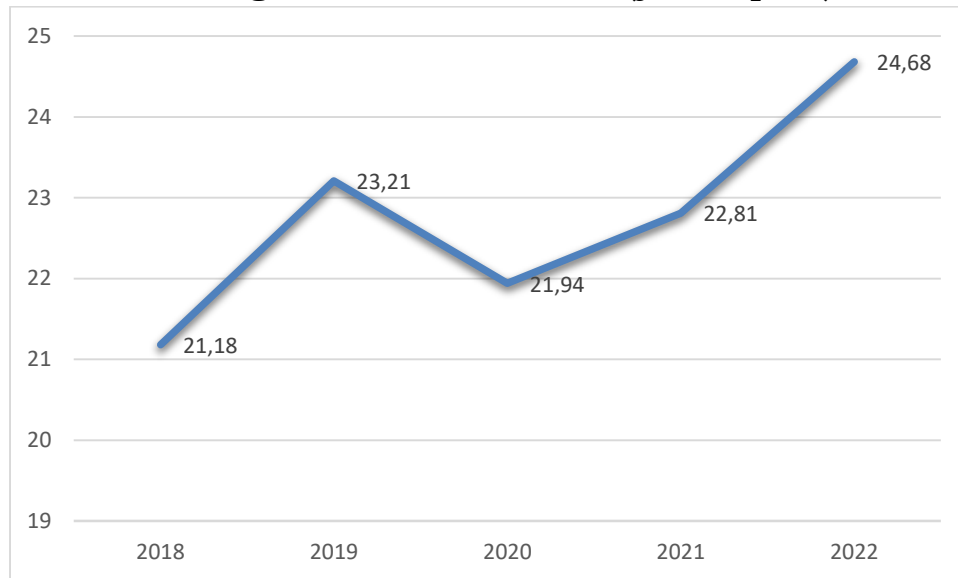
Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu dilakukan melalui perhitungan PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini masih mengabaikan faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.

PDRB perkapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas” suatu wilayah karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Gambar 3.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang dicirikan dengan PDRB perkapita di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 sebesar 24,68 juta rupiah yang mengalami kenaikan 1,87 juta rupiah atau setara 8,20% dari PDRB perkapita tahun 2021. Hal ini juga sekaligus menunjukkan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 berjalan sesuai dengan rencana pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Tabel 3.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2022 (juta rupiah)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	21,19	23,15	22,00	22,81	24,68
Peningkatan PDRB Perkapita	10,56%	9,28%	-4,99%	3,68%	8,21%

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023 (diolah)

Pada periode tahun 2018 - 2022 perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Kuningan secara konstan meningkat, kecuali koreksi pada tahun 2022 sebagai dampak pandemi yang secara bertahap pulih kembali pada tahun 2021 dan 2022. Titik terendah pertumbuhan ada pada angka -4,99 persen (kondisi pandemi) dan titik tertinggi ada pada 10,56 persen. Peningkatan dalam PDRB Perkapita belum sepenuhnya menggambarkan

peningkatan daya beli masyarakat, karena masih harus mempertimbangkan inflasi dan pola distribusi pendapatan regional yang ada di Kabupaten Kuningan.

Tabel 3.6 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2022 (juta rupiah)

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
PDRB perkapita ADHK (Juta Rupiah)	21.996	22.805*	24.682**
Peningkatan PDRB Perkapita	5,67%	3,68%	8,23%

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023 (diolah)

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Capaian pertumbuhan pada PDRB atas dasar harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berdasarkan harga konstan maka kenaikan PDRB Perkapita pada Tahun 2022 mencapai 1,88 juta rupiah atau setara dengan 8,23%.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui: a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2022 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan telah mencapai 61,80 persen. Pada Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 9,81 persen, mengalami penurunan sebesar 1,87 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang berada pada angka 11,68 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka sejalan dengan mulai pulihnya sektor ekonomi

produktif yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja produktif di Kabupaten Kuningan.

Menurut BPS Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022, dari 920.304 jiwa penduduk usia kerja, 530.825 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran terbuka) dan 328.136 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 478.750 jiwa.

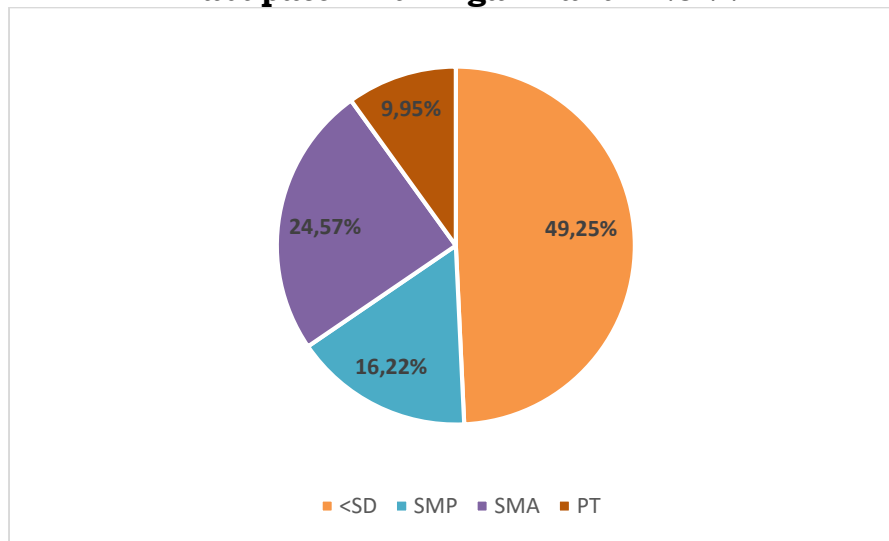
Tabel 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	810.422	884.516	936.247	987.056	920.304
Angkatan Kerja	475.284	502.051	521.677	542.782	530.825
- Bekerja	432.549	453.781	463.164	479.405	478.750
- Pengangguran Terbuka	42.735	48.270	58.513	63.377	52.075
- Bukan Angkatan Kerja	335.138	316.757	320.072	307.770	328.136
Sekolah	68.123	59.944	55.411	53.583	58.196
Mengurus Rumah Tangga	225.996	219.099	205.229	193.093	216.398
Lainnya	41.019	37.714	59.432	61.094	53.542
TPAK (%)	58,65	61,31	61,98	63,82	61,80
TPT (%)	8,99	9,61	11,22	11,68	9,81
TKK (%)	91,01	90,39	88,78	88,32	90,19

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

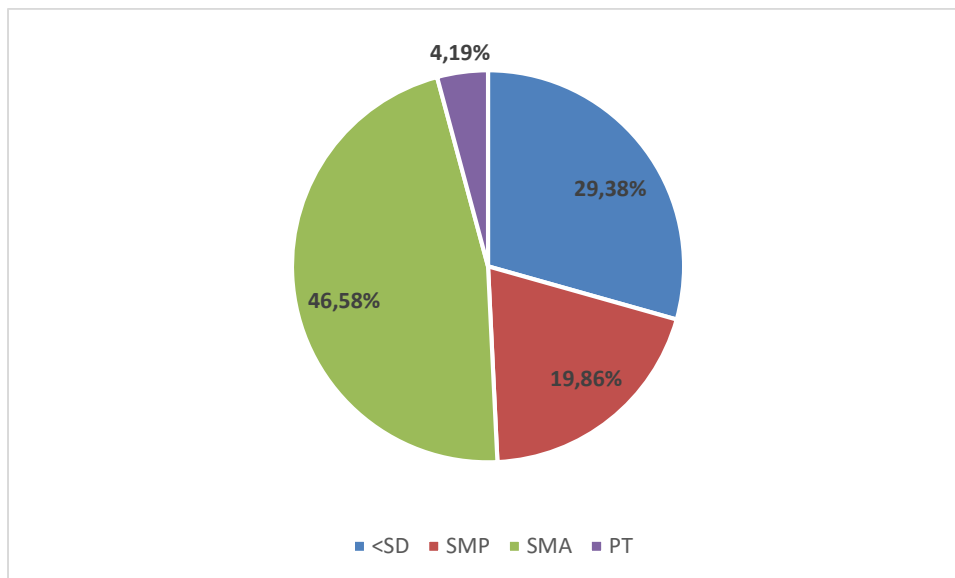
Disusun berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja untuk tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (49,25 persen), SLTP (16,22 persen), SLTA (24,57 persen), dan Diploma/Sarjana (9,95 persen). Sedangkan Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat Pendidikan diperoleh data sebagai berikut Sekolah Dasar (29,38 persen) , SLTP (19,86 persen), SLTA (46,58 persen), dan berpendidikan Diploma/Sarjana (4,19 persen).

Gambar 3.2 Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Kuningan Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023 (diolah)

Gambar 3.3 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Di Kabupaten Kuningan Tahun 2022



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022 (diolah)

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi untuk melihat tingkat beban ekonomi individu dan rumah tangga. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang

semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.8 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2018	2019	2020	2021	2022
1	0 – 14	24,70	n.a	23,80	23,42	23,64
2	15 – 64	66,30	n.a	68,35	68,31	69,98
3	65+	9,00	n.a	7,85	8,27	6,38
4	Angka Beban Tanggungan	50,83	n.a	46,31	46,40	46,55

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan yang mengindikasikan program pembangunan berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 50,83 persen di Tahun 2018, terus mengalami penurunan sampai Tahun 2021 dan sedikit naik di Tahun 2022 menjadi sebesar 46,55 persen yang menandakan bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 46 - 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

2. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.

Sedangkan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan pada Tahun 2022 yaitu pada angka 12,76 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 13,10%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	131,20	123,16	139,20	143,35	140,25
2	Garis Kemiskinan	332.483	340.775	352.358	358.069	371.665
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,22	11,41	12,82	13,10	12,76

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah ($GR < 0,4$) dan trennya menurun secara stabil dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang berada pada angka 0,435 pada tahun 2019 dan turun pada angka 0,345 di Tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan penurunan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk.

Tabel 3.10 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2017 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Gini Ratio	0,397	0,435	0,361	0,349	0,345

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2023

4. Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung tingkat inflasinya oleh BPS, tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Data resmi BPS Kota Cirebon hasil publikasi, digunakan sebagai rujukan data inflasi Kabupaten/Kota di wilayah III Cirebon. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Cirebon adalah 4,86 persen (BPS Kota Cirebon). Sehingga Angka Inflasi Kabupaten Kuningan berada pada angka 4,86% yang berada di bawah inflasi Jawa Barat yaitu 6,04 persen dan inflasi Nasional sebesar 5,51 persen pada tahun yang sama.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023-2024

Prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, tidak terlepas dari tantangan dan prospek pada tataran lingkungan sekitarnya baik itu secara global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa Barat serta perekonomian regional Kabupaten Kuningan sendiri. Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2023 dan 2024, memproyeksikan target pencapaian pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,66	71,09
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,60	1,28
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,74	11,70
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,14	9,04
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,00-3,45	5,81
6	Indeks Gini	Poin	<0,38	0,336
7	Pendapatan per Kapita (ADHK)	Juta Rupiah		18,90

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023

A. Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Bank Indonesia meyakini bahwa prospek perekonomian Indonesia pada Tahun 2024 akan semakin baik, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, inflasi yang rendah, dan nilai tukar rupiah yang menguat dan stabil, sementara kondisi perekonomian global yang masih melambat akibat terus tertahannya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju karena kebijakan

suku bunga acuan bank sentralnya yang masih tinggi. Terwujudnya proyeksi positif tersebut dapat dicapai dengan syarat iklim perekonomian domestik yang kondusif, terjaganya daya beli masyarakat, dan meningkatnya arus investasi.

Peningkatan perekonomian domestik tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 yang masih tumbuh di 5,03% secara tahunan (yoy), sedikit di atas dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,01% yoy. Pendorongnya dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Selain itu, pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat didorong positifnya kinerja ekspor dan permintaan dalam negeri. Tercermin penghujung tahun ini ekonomi bisa tumbuh 4,5-5,3% dan proyeksi naik pada 2024 menjadi 4,7-5,5%.

Dari sisi inflasi BI meyakini masih akan terus terjaga di kisaran sasaran 3% plus minus 1% pada 2023 dan pada 2024 lebih rendah lagi menjadi 2,5% plus minus 1%. Dipengaruhi ekspektasi inflasi dan tekanan *imported inflation* yang menurun serta pasokan yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa.

Terjaganya aktivitas ekonomi ini, didukung pula oleh ketahanan sektor eksternal Indonesia, seperti berlanjutnya surplus neraca pembayaran dan cadangan devisa yang masih tinggi. Surplus neraca pembayaran terjaga karena neraca perdagangan terus menerus surplus dan aliran modal asing masih terus masuk ke tanah air.

Hingga April 2023, neraca perdagangan surplus sebesar US\$ 3,9 miliar, aliran masuk modal asing seperti ke investasi portofolio hingga 26 Mei 2023 tercatat *net inflows* sebesar US\$ 1,9 miliar, serta cadangan devisa pada akhir April 2023 sebesar US\$ 144,2 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Dengan kondisi ini diperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) keseluruhan tahun ini hingga 2024 akan terus surplus, ditopang transaksi

berjalan dalam kisaran surplus 0,5% sampai dengan defisit 0,3% dari PDB pada 2023 dan berada dalam kisaran defisit 0,4% hingga 1,2% dari PDB pada 2024.

Seiring surplusnya transaksi berjalan dan terus masuknya aliran modal asing, membuat optimistis rata-rata nilai tukar rupiah akan terus menguat hingga 2024. Pada 2023 nilai tukar rupiah rata-rata akan dijaga di kisaran Rp4.800-Rp15.100 per dolar AS dan pada 2024 menjadi Rp 14.600-Rp15.100 per dolar AS (*Sumber: Bank Indonesia*).

B. Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Berdasarkan rilis BPS tanggal 5 Mei 2023, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 tumbuh 5 persen (yoy). Pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan IV 2022 (4,61 persen) tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan resiliensi permintaan domestik yang cukup baik di tengah berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global.

Kinerja baik dari perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2023 juga disertai dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 tercatat 7,89 persen yang lebih rendah dari posisi Agustus 2022 pada 8,31 persen. Menurut Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, kondisi tersebut mengkonfirmasi perkembangan ekonomi Jawa Barat ke arah yang positif dengan serapan tenaga kerja yang lebih baik dan daya beli masyarakat yang turut terjaga.

Tingginya mobilitas masyarakat sejalan dengan hari libur nasional dan cuti bersama berdampak positif pada permintaan domestik dan mendorong kinerja pariwisata. Aktivitas pariwisata yang meningkat tercermin pada kinerja sektor transportasi serta penyediaan akomodasi, makan dan minum yang tumbuh secara tahunan masing-masing 6,37 persen dan 9,19 persen. Daya beli masyarakat yang terjaga berhasil mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh 4,60 persen. Selain itu, peningkatan realisasi belanja Pemerintah telah mencatatkan pertumbuhan konsumsi Pemerintah 6,96

persen (yoy) yang terutama didorong oleh belanja masyarakat (yang didominasi oleh ASN) dan pembiayaan proyek *multiyears*.

Ekspor Jawa Barat tumbuh baik pada triwulan I-2023 dengan capaian 4,95 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya pada 3,91 persen. Sesuai rilis BPS, kinerja tersebut didukung oleh ekspor kendaraan beserta *part*-nya yang tumbuh 37,36 persen (yoy). Hal tersebut menunjukkan bahwa industri otomotif nasional yang sebagian besar berlokasi di Jawa Barat berada dalam kondisi baik.

Selain itu, masih kuatnya permintaan terhadap industri makanan-minuman, pakaian dan lain-lain berhasil mempertahankan kinerja industri pengolahan yang tumbuh 6,62 persen (yoy). Berdasarkan hasil Survei Konsumen, Indeks Keyakinan Konsumen di Jawa Barat pada April 2023 tercatat 109,1 yang lebih baik dibanding Maret 2023 pada 102,7. Hal tersebut menunjukkan peningkatan daya beli dan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi.

Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,7 persen-5,5 persen (yoy) dengan dukungan meningkatnya mobilitas masyarakat. Optimisme tersebut ditopang oleh baiknya pertumbuhan investasi di 2023. Sesuai data BKPM, realisasi investasi PMA pada triwulan I tumbuh 20,2 persen dan PMDN tumbuh 12,4% dengan nilai investasi tertinggi secara nasional. (Sumber: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2023).

Beberapa tantangan yang perlu diwaspadai adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global berpotensi menekan kinerja ekspor, adanya Covid-19 varian baru berpotensi mengurangi mobilitas dan aktivitas ekonomi. Kedepan, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat terutama *alignment* program kerja dengan seluruh *stakeholders*. Berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Promosi investasi, perluasan dan percepatan digitalisasi, penguatan peran UMKM, serta optimalisasi infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Jawa Barat merupakan upaya-upaya

yang perlu didorong bersama secara berkesinambungan.

C. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan (naik 1,97 poin). Aspek ketenagakerjaan menunjukkan tren positif sampai tahun 2022. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2020 sebesar 11,22 persen, sedangkan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 11,68 persen namun kembali turun menjadi 9,81 persen pada Tahun 2022. Hal ini sudah lebih baik dibanding target TPT Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 dengan nilai 10,14%.

D. Prakiraan Perekonomian Kedepan

Diperkirakan pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan berada pada kisaran 5,81 persen relatif lebih tinggi daripada perkiraan pertumbuhan pada Tahun 2023. Pertumbuhan tersebut diperkirakan meningkat seiring dengan adanya kenaikan produktifitas sektor UMK dan intervensi sosial melalui anggaran bansos oleh Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama meningkat sejalan dengan potensi perbaikan kondisi ekonomi lokal dan regional. Didalam kinerja sektor pertanian diperkirakan lebih baik dibandingkan 2023 karena kondisi cuaca yang lebih mendukung. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun cenderung terjaga.

Sementara itu, tekanan inflasi pada Tahun 2024 diperkirakan moderat dengan proyeksi masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 3,0 persen \pm 1% (yoy). Peningkatan biaya-biaya yang diatur oleh pemerintah seperti biaya listrik, BBM, BPJS, dan rokok diperkirakan menjadi faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Disisi lain, tren penurunan harga komoditas global diperkirakan masih menjadi penahan inflasi pada tahun 2024.

E. Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten Kuningan

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten Kuningan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

Strengths	Weakness	Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian. - Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah. - Ketersediaan SDM yang sebagian besar adalah usia produktif. - Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian. - Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Pertanian sebagai sektor dominan mengalami penurunan. - Ketersediaan SDM yang terbatas dan kualitas SDM di bidang pertanian dan pariwisata yang masih rendah. - Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata. - Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata. - Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain - Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah. - Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan - Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata. - Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang. - Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional. - Infrastruktur (Tol Cipali, Cisumdawu dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan. - Adanya tematik sektoral dan kewilayahan. - Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon. - Masuknya Kuningan sebagai bagian dari pengembangan Kawasan metropolitan REBANA 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian. - Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat. - Persaingan produk serupa yang semakin tinggi. - Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal. - Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.

3.1.3 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi tidak terpisah dari permasalahan-permasalahan diluar kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Kuningan dirancang untuk bersifat ramah lingkungan hidup dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-environment*. Masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli, pemberdayaan masyarakat, serta kondisi lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan kedepan.

Aspek kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Kuningan terdampak sangat signifikan oleh pandemi Covid-19. Disamping aspek kesehatan, dampak yang ditimbulkan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan sektor lainnya. Dampak tersebut masih terasa sampai dengan tahun-tahun setelahnya, sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk merespon pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, agenda pembangunan Tahun 2024 diarahkan dalam rangka menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul, dan produktif.

Terdapat target utama pembangunan di Kabupaten Kuningan yang akan menjadi konsentrasi utama pada Tahun 2024, antara lain:

A. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih berada di atas rata-rata Jawa Barat dan Nasional, meskipun angka kemiskinan Tahun 2022 turun menjadi 12,76 persen dari tahun sebelumnya yaitu 13,10 persen. Hal ini perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dari para pihak yang ada secara kolektif kolegial dalam semangat konvergensi. Kemiskinan bukan hanya persoalan pemerintah daerah sehingga kemiskinan bisa dientaskan jika semua pihak turut berpartisipasi. Seluruh instansi terkait bersama para pihak harus dapat saling bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Dibutuhkan sinergi dan kesepahaman yang sama antar aktor pembangunan dan tentunya juga dibutuhkan program dan kegiatan inovatif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, yang

salah satunya melalui alternatif pendanaan dari *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Secara teknokratis, dalam penanggulangan kemiskinan ini dipandang perlu dilakukan penguatan pendapatan individu yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan investasi, optimalisasi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dan koperasi, peningkatan produktifitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan berbasis kawasan, serta peningkatan wisata desa menurut keunggulan lokal yang mengedepankan semangat pemberdayaan masyarakat.

B. Pembangunan Manusia

Mengacu pada capaian IPM beserta komponen-komponennya antar kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi relatif Kabupaten Kuningan secara umum masih unggul di Wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan – Ciayumajakuning), namun masih di bawah angka Jawa Barat, dan berada pada posisi ke-17 di tingkat Jawa Barat. Dari sekian komponen indikator pendukung IPM yang perlu mendapat perhatian khusus adalah rata-rata lama sekolah yang masih berkisar pada 7,88 tahun (kelas 1-2 SLTP).

C. Angkatan Kerja

Berdasarkan rilis data BPS pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kuningan mencapai 61,80 persen atau sejumlah 530.825 orang. Sementara data bukan angkatan kerja 328.136 orang, jumlah tersebut merupakan pengangguran terbuka yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan lainnya dalam upaya memperoleh penghidupan, sehingga data Tahun 2022 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,81 persen.

Masih tingginya pengangguran perlu disikapi dengan meningkatkan jumlah investasi yang masuk, mempermudah akses terhadap modal usaha, memperbaiki kualitas pendidikan dan keterampilan calon tenaga kerja, serta

melakukan penyerapan tenaga kerja berbasis penempatan. Hasil Sakernas Agustus 2022 mencatat bahwa pengangguran di Kabupaten Kuningan relatif lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding daerah perdesaan. Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja di daerah perkotaan yang belum terserap pada lapangan usaha relatif lebih banyak dibanding mereka yang berada di daerah perdesaan.

Peningkatan kualitas pendidikan penduduk melalui pendidikan formal maupun informal adalah dasar bagi peningkatan daya saing calon tenaga kerja, juga dengan pemberian pelatihan *lifeskill* yang harus ditingkatkan untuk para pencari kerja, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja atau pembinaan kewirausahaan baru. Perangkat Daerah terkait juga perlu melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit usaha kecil dengan syarat yang lebih mudah.

Ruang investasi juga harus terbuka lebar, prosedur perizinan dimudahkan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan daerah dalam hal pelestarian lingkungan. Investor akan hadir jika lingkungan masyarakat kondusif, masyarakat mau menerima secara terbuka investor yang memang telah memenuhi syarat perizinan, tidak diganggu atau dihalang-halangi. Banyaknya investor akan menjaring angkatan kerja di Kabupaten Kuningan secara massif sehingga dapat mempercepat penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Selain itu infrastruktur transportasi juga harus diperbaiki untuk memudahkan aksesibilitas ekonomi.

D. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal, yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Potret pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2022 terlihat dari angka partisipasi murni

peserta didik di Kabupaten Kuningan sebesar SD=99,99 persen, SMP=79,63 persen dan SMA=66,86 persen.

E. Kesehatan

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi kualitas kesehatan seseorang semakin tahan terhadap gangguan kesehatan, dan semakin preventif terhadap ancaman penyakit. Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Kuningan relatif baik, diantaranya ditunjukkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang relatif tinggi sebesar 74,03 tahun, dan berada di atas rata-rata UHH provinsi Jawa Barat sebesar 73,52 tahun, tetapi tetap perlu dilakukan pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan pelayanan kesehatan (dasar dan rujukan) dan kegiatan promotif dan rehabilitatif kesehatan secara kontinu.

Hasil survey nasional menunjukkan, aspek yang berpengaruh terhadap UHH di Kabupaten Kuningan meliputi perlunya peningkatan pelayanan bagi penduduk yang berobat jalan ke fasilitas medis, peningkatan penolong kelahiran oleh petugas medis, peningkatan balita yang pernah diberi imunisasi, penurunan gini ratio, peningkatan jumlah dokter, dan peningkatan rumah tangga menggunakan sumber air minum bersih.

F. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan mempunyai basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah yang belum menunjukkan kontribusi yang memadai bagi ekonomi daerah, sehingga membutuhkan kebijakan akselerasi peningkatan potensi pada sektor-sektor unggulan. Pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi hanya 0,11 persen akibat pandemi Covid-19, naik menjadi 3,56 persen pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi ditahun tersebut masih menyisakan dampak dari pandemi walaupun sudah berangsur membaik. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,97 persen menjadi 5,53 persen sehingga tahun tersebut menunjukkan ekonomi Kabupaten Kuningan mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat (5,45%) dan Nasional (5,03%).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Faktor kemampuan keuangan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang penting, ditunjang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah karena menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi CSR di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019 mencapai Rp3.266.707.632,00 yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar.

- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2020 dana CSR di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan, hanya sebesar Rp1.575.193.945,00. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah perusahaan yang melaporkan program dan kegiatan CSR. Dana CSR tersebut oleh perusahaan dilaksanakan untuk kegiatan:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu pasien tidak mampu dan orang terlantar, anak yatim di berbagai yayasan panti, gerakan wakaf Al-Qur'an, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, mendukung kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum seperti rehabilitasi jalan, pembangunan masjid, dan pengadaan perlengkapan olahraga.
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- Bidang ekonomi, membantu pengembangan sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan UMKM.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mencapai sebesar Rp2.011.080.900,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, pemberian berupa perlengkapan sekolah dan buku bacaan.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk Usaha Mikro Kecil.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa bantuan program bakti sosial berupa pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, santunan anak yatim, santunan kepada lansia, santunan kepada penderita stunting, pemberian makanan tambahan gizi ke balita dan ibu hamil.
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan mengadakan sosialisasi kesehatan ibu menyusui dan ibu hamil.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2023 CSR diproyeksikan naik sekitar 10 persen dari pelaksanaan CSR tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.212.188.990,00. Untuk pelaksanaan CSR Tahun 2023 Pemerintah Daerah akan menawarkan dan mengarahkan alokasi CSR pada program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi kepada Para Mitra CSR di Kabupaten Kuningan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung dari kemandirian keuangan daerah atau kemampuan fiskal daerah. Daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatannya. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan di masa mendatang. Beberapa asumsi digunakan dalam memproyeksi besaran pendapatan daerah. Asumsi perhitungan PAD menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata untuk setiap jenis pajaknya.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 diawali dengan merasionalisasi PAD di Tahun 2024 (mengalami penurunan 5,50 persen dari target PAD di Tahun 2023). Hal ini sebagai respon dari perhitungan yang terlalu optimis terhadap dampak pemulihan ekonomi masyarakat yang perlu dikoreksi. Selanjutnya untuk Tahun 2025 – 2026 proyeksi PAD dibangun atas asumsi bahwa PAD mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari Dana Transfer diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen dan dari hibah 30,0 persen.

Selanjutnya apabila memperhatikan realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 2019-2021, pendapatan daerah Kabupaten Kuningan mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi wabah Covid-19 yang memberikan hambatan kepada hampir seluruh sektor perekonomian. Sehingga pada Tahun 2020 sampai Tahun 2022 penerimaan sektor PAD di Kabupaten Kuningan terkoreksi dengan penyesuaian penurunan target yang cukup signifikan. Penurunan capaian realisasi PAD Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar -33.33%.

Tahun 2021 dan Tahun 2022 sektor pendapatan mulai menunjukkan perbaikan dimana pasca pandemi Covid-19, realisasi pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif walaupun realisasinya baru bertumbuh sebesar 1,04 persen. Adapun kinerja realisasi pendapatan daerah dapat tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2022

Kode	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	2,894,894,844,147	2,652,148,692,376	2.679.853.810.091
4.1	Pendapatan Asli Daerah	390,151,405630	354,017,458,295	346.586.033.112
4.1.01	Pajak Daerah	120,045,749,600	126,230,000,000	107.678.513.745
4.1.02	Retribusi Daerah	99,074,791,156	16,545,809,499	77.239.874.431
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,371,500,000	8,004,650,000	7.138.783.168
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	163,659,364,874	203,236,998,796	154.528.861.768
4.2	Pendapatan Transfer	2,498,743,438,517	2,290,131,234,081	2.323.512.627.999
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2,113,432,942,000	2,137,968,827,064	2.072.555.555.913
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	385,310,496,517	152,162,407,017	250.957.072.086
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,000,000,000	8,000,000,000	9.755.148.980
4.3.01	Hibah	6,000,000,000	8,000,000,000	9.755.148.980
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kondisi pendapatan daerah Tahun 2023 (saat ini masih berjalan) tidak jauh berbeda dengan kondisi keuangan pada Tahun 2022, dimana tantangan dan hambatan yang dihadapi masih relatif sama. Diantaranya kemandirian keuangan daerah yang masih rendah yakni sebesar 14,58 persen, serta penerapan kebijakan penyaluran DAU dengan sistem *mandatory spending* yang membuat penggunaan fiskal menjadi lebih terarah, dan menuntut Pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sektor PAD dalam pendanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi misi daerah.

Berikut gambaran proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024:

Tabel 3.14 Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2023-2024

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024
PENDAPATAN DAERAH	2,894,894,844,147	2,652,148,692,376
Pendapatan Asli Daerah	390,151,405630	354,017,458,295
Pajak Daerah	120,045,749,600	126,230,000,000
Retribusi Daerah	99,074,791,156	16,545,809,499

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA. 2024
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,371,500,000	8,004,650,000
Lain-lain PAD Yang Sah	163,659,364,874	203,236,998,796
Pendapatan Transfer	2,498,743,438,517	2,290,131,234,081
Transfer Pemerintah Pusat	2,113,432,942,000	2,137,968,827,064
Transfer Antar-Daerah	152,162,407,017	152,162,407,017
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,000,000,000	8,000,000,000
Hibah	6,000,000,000	8,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-

Sumber: Data Olah Bappenda Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Berdasarkan realisasi pada Triwulan 1 tahun berjalan, target Pendapatan Daerah tahun 2023 yang baru mencapai 16,82 %, diprediksi akan mengalami koreksi yang cukup signifikan dari sektor PAD. Dikarenakan target PAD tahun 2023 dinilai sangat optimistis, namun dalam perjalanan realisasinya berdasarkan hasil prognosis PAD, terdapat beberapa sektor PAD yang tidak akan tercapai. Sehingga perlu dilakukan upaya dengan mrasionalisasi target sesuai potensi riil, namun dengan tetap mengoptimalkan potensi PAD yang masih dapat ditingkatkan.

Dengan melihat kebijakan pemerintah pasca perubahan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka proyeksi pendapatan Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa jenis retribusi daerah yang tidak dapat dipungut lagi yaitu :

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
- Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang/Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

- Retribusi Pelayanan Pendidikan/Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis;
- Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Retribusi Terminal/Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha; dan
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

Sehingga proyeksi penerimaan dari sektor retribusi daerah pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari Rp99.074.791.156 menjadi Rp16.545.809.499 atau turun sebesar Rp82.528.981.657.

Selain itu terdapat pula perubahan kebijakan disektor perpajakan daerah, yaitu berlakunya berupa perubahan nomonklatur jenis pajak dengan pemberlakukan pajak atas barang jasa tertentu atau PBJT, yang berkonsekuensi terjadinya penurunan tarif pada beberapa ayat pajak yaitu:

- Pajak Parkir yang semula diterapkan dengan tarif 30% berubah menjadi sebesar 10% atau mengalami penurunan 20%;
- Adanya perubahan kebijakan penerapan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP BPHTB yang semula ditetapkan Rp. 60.000.000 berubah menjadi Rp. 80.000.000. perubahan NPOPTKP tersebut akan berkonsekuensi pada penurunan dalam pengenaan dan pungutan BPHTB di tahun 2024;
- Pajak Hiburan yang semula diterapkan dengan tarif paling tinggi sebesar 50%, akan diubah menjadi 10%, kecuali tarif Pajak Hiburan yang dikenakan pada diskotik, karaoke, club malam, mandi uap/SPA yang masih dikenakan 40%;
- Selanjutnya rencana penerapan tarif Pajak MBLB yang semula 25% akan diubah menjadi sebesar 20% atau mengalami penurunan tarif pajak sebesar 5%.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya, antara lain:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan terjadinya pengurangan potensi melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- 5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 6) Meningkatkan penerimaan bagian laba dari PT. Bank pembangunan daerah jawa barat dan banten melalui peningkatan besaran angka investasi.

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut:

- 1) Peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan sosialisasi yang sesuai perkembangan jaman serta berkesinambungan di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- 4) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah
- 5) Peningkatan Pengawasan pada proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program, kegiatan, dan subkegiatan.

Arah kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow program*.

Selain itu, kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- 1) Program/kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
- 2) Mendorong upaya pemulihan dunia usaha dan pemulihan ekonomi daerah;
- 3) Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
- 4) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- 5) Pemerataan yang berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tahun 2020-2022

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
BELANJA DAERAH	2.795.800.003.283	2.742.154.197.355	2.708.515.650.596
<i>Belanja Operasi</i>	<i>1.909.824.149.985</i>	<i>1.951.840.892.690</i>	<i>2.010.061.509.032</i>
Belanja Pegawai	1.198.140.805.050	1.152.944.764.985	1.146.569.988.635
Belanja Barang dan Jasa	630.797.764.199	729.215.570.980	787.351.371.791
Belanja Subsidi	-	-	1.408.740.156
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Hibah	50.895.164.000	59.840.624.500	66.576.805.450
Belanja Bantuan Sosial	29.990.416.736	9.839.932.225	8.154.603.000

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Belanja Modal	378.703.766.805	320.727.654.179	229.856.933.449
Belanja Modal Tanah	4.732.989.296	7.612.718.068	26.751.824.467
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.573.821.550	104.329.063.606	49.977.556.706
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	112.473.642.588	88.667.096.662	66.623.156.876
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.926.659.308	119.717.944.843	79.711.956.467
Belanja Aset Tetap lainnya	37.996.654.063	400.831.000	6.792.438.933
Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.870.504.527
Belanja Tidak Terduga	52.902.857.991	25.272.600.802	11.870.504.527
Belanja Transfer	454.369.228.502	444.313.049.684	456.726.703.588
Belanja Bagi Hasil	14.370.649.039	13.580.038.690	15.921.642.838
Belanja Bantuan Keuangan	439.998.579.463	430.733.010.994	440.805.060.750

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yang membagi belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linier.

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia (2020-2022), dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pola perubahan belanja barang dan jasa serta belanja hibah pada belanja operasi menunjukkan perubahan yang relatif konstan. Oleh karena itu, proyeksi terhadap belanja ini menggunakan pendekatan yang linear.
2. Pola perubahan belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan perubahan yang fluktuasi. Dimana pada tahun

2021 mengalami kenaikan sekitar 4% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 3%.

3. Belanja-belanja lain mengalami perubahan yang berfluktuasi. Perubahan kedua belanja ini akan mengikuti perubahan yang secara umum terjadi pada belanja operasi, yaitu 3,4 persen per tahun.
4. Pola perubahan belanja modal sejak tahun 2020-2022 menunjukkan angka yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun demikian, dikarenakan karakteristik belanja ini yang bersifat strategis terhadap peningkatan pelayanan publik, maka target belanja ini dinaikkan sesuai (akan linear) dengan perubahan pendapatan. Secara ideal porsi belanja ini akan terus meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan pelayanan pubiknya. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan persentase realisasi belanja modal 2020 - 2022 sebesar 50,33%, -15,31% dan -28,33%. Sedangkan proyeksi belanja modal tahun 2023-2024 jika dilihat berdasar kemampuan mengalami penurunan sebesar -50,46%.

Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2024 Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

URAIAN	2023	2024
BELANJA DAERAH	2,826,272,144,220	2,728,848,692,377
Belanja Operasi	2,050,556,616,056	2,106,848,692,377
Belanja Pegawai	1,156,338,930,957	1,309,565,997,232
Belanja Barang dan Jasa	796,917,461,349	758,032,695,145
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah	82,351,613,750	39,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,948,610,000	250,000,000
Belanja Modal	290,731,764,740	140,000,000,000
Belanja Modal Tanah	29,450,000,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,192,188,485	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,865,961,840	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,940,000,000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,752,473,519	
Belanja Aset Lainnya	531,140,896	

URAIAN	2023	2024
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Transfer	474,983,763,424	481,500,000,000
Belanja Bagi Hasil	11,269,123,424	18,500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	463,714,640,000	463,000,000,000

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Tabel 3.17 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2023-2024 sesuai Kebutuhan Daerah

URAIAN	2023	2024
BELANJA DAERAH	2,826,272,144,220	3,182,586,018,512
Belanja Operasi	2,050,556,616,056	2,416,586,018,512
Belanja Pegawai	1,156,338,930,957	1,309,565,997,232
Belanja Barang dan Jasa	796,917,461,349	1,067,770,021,280
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah	82,351,613,750	39,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,948,610,000	250,000,000
Belanja Modal	290,731,764,740	284,000,000,000
Belanja Modal Tanah	29,450,000,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,192,188,485	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,865,961,840	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,940,000,000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,752,473,519	
Belanja Aset Lainnya	531,140,896	
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Transfer	474,983,763,424	481,500,000,000
Belanja Bagi Hasil	11,269,123,424	18,500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	463,714,640,000	463,000,000,000

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Dengan kemampuan pendapatan (hasil proyeksi), mulai Tahun 2024 beberapa pos belanja tidak dialokasikan seperti Belanja Hibah, Bansos dan Subsidi. Untuk proyeksi Belanja Modal berasal dari DAK yang diasumsikan mengalami kenaikan 4,76 persen.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 3) Pencairan Dana Cadangan; maupun
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Tabel 3.18 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
PEMBIAYAAN DAERAH	51.604.199.504	28.802.221.262	44.766.793.268
<i>Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>	<i>54.604.199.504</i>	<i>32.302.221.262</i>	<i>65.266.792.658</i>
SILPA Sebelumnya	54.604.199.504	32.302.221.262	65.266.792.658
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Pinjaman Dalam Negeri			

Penerimaan Piutang Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	20.499.999.390
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo			
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	5.499.999.390
Pembentukan Dana Cadangan			15.000.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 31 Desember 2021
Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja yang bersifat mengikat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2023-2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023-2024 (Rupiah)

URAIAN	2023	2024
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	38,500,000,000
SILPA Tahun Sebelumnya		
Pencairan Dana Cadangan		38,500,000,000
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		

URAIAN	2023	2024
Pinjaman Dalam Negeri		
Pinjaman Luar Negeri		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,500,000,000	4,000,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	4,000,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	23,500,000,000	
Pemberian Pinjaman Daerah		
PEMBIAYAAN NETO	(26,500,000,000)	34,500,000,000
SURPLUS/DEFISIT	(109.260.389.573)	
BELANJA DAERAH	2,826,272,144,220	2,694,348,692,377
Belanja Operasi	2,050,556,616,056	2,068,348,692,377
Belanja Pegawai	1,156,338,930,957	1,309,565,997,232
Belanja Barang dan Jasa	796,917,461,349	758,032,695,145
Belanja Subsidi		
URAIAN	2023	2024
Belanja Hibah	82,351,613,750	39,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,948,610,000	250,000,000
Belanja Modal	290,731,764,740	140,000,000,000
Belanja Modal Tanah	29,450,000,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,192,188,485	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,865,961,840	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,940,000,000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,752,473,519	
Belanja Aset Lainnya	531,140,896	
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Transfer	474,983,763,424	481,500,000,000
Belanja Bagi Hasil	11,269,123,424	18,500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	463,714,640,000	463,000,000,000
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	38,500,000,000
SILPA Tahun Sebelumnya		
Pencairan Dana Cadangan		38,500,000,000

URAIAN	2023	2024
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Pinjaman Dalam Negeri		
Pinjaman Luar Negeri		
URAIAN	2023	2024
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,500,000,000	4,000,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	4,000,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	23,500,000,000	
Pemberian Pinjaman Daerah		
PEMBIAYAAN NETO	(26,500,000,000)	34,500,000,000
SURPLUS/DEFISIT	(109.260.389.573)	

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 sesuai Kapasitas Keuangan Daerah

URAIAN	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	2,976,659,844,147	2,694,348,692,377
Pendapatan Asli Daerah	471,916,405,630	396,217,458,296
Pajak Daerah	130,545,749,600	124,580,000,000
Retribusi Daerah	139,074,791,156	71,545,809,499
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,371,500,000	8,004,650,000
Lain-lain PAD Yang Sah	194,924,364,874	192,086,998,797
Pendapatan Transfer	2,498,743,438,517	2,290,131,234,081
Transfer Pemerintah Pusat	2,113,432,942,000	2,137,968,827,064
Transfer Antar-Daerah	152,162,407,017	152,162,407,017
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	6,000,000,000	8,000,000,000
Hibah	6,000,000,000	8,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
BELANJA DAERAH	2,826,272,144,220	2,694,348,692,377
Belanja Operasi	2,050,556,616,056	2,068,348,692,377
Belanja Pegawai	1,156,338,930,957	1,309,565,997,232
Belanja Barang dan Jasa	796,917,461,349	758,032,695,145
Belanja Subsidi		

URAIAN	2023	2024
Belanja Hibah	82,351,613,750	39,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,948,610,000	250,000,000
Belanja Modal	290,731,764,740	140,000,000,000
Belanja Modal Tanah	29,450,000,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,192,188,485	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,865,961,840	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,940,000,000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,752,473,519	
Belanja Aset Lainnya	531,140,896	
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Transfer	474,983,763,424	481,500,000,000
Belanja Bagi Hasil	11,269,123,424	18,500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	463,714,640,000	463,000,000,000
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	38,500,000,000
SILPA Tahun Sebelumnya		
Pencairan Dana Cadangan		38,500,000,000
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Pinjaman Dalam Negeri		
Pinjaman Luar Negeri		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,500,000,000	4,000,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	4,000,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	23,500,000,000	
Pemberian Pinjaman Daerah		
PEMBIAYAAN NETO	(26,500,000,000)	34,500,000,000
SURPLUS/DEFISIT	(109.260.389.573)	

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Tabel 3.21 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 sesuai Kebutuhan Daerah

URAIAN	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	2,852,772,144,220	2,694,348,692,377
Pendapatan Asli Daerah	581,176,795,203	396,217,458,296
Pajak Daerah	149,256,772,000	124,580,000,000
Retribusi Daerah	159,113,164,458	71,545,809,499

URAIAN	2023	2024
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,328,441,300	8,004,650,000
Lain-lain PAD Yang Sah	265,478,417,445	192,086,998,797
Pendapatan Transfer	2,265,595,349,017	2,290,131,234,081
Transfer Pemerintah Pusat	2,113,432,942,000	2,137,968,827,064
Transfer Antar-Daerah	152,162,407,017	152,162,407,017
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,000,000,000	8,000,000,000
Hibah	6,000,000,000	8,000,000,000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
BELANJA DAERAH	2,826,272,144,220	3,148,086,018,512
Belanja Operasi	2,050,556,616,056	2,378,086,018,512
Belanja Pegawai	1,156,338,930,957	1,309,565,997,232
Belanja Barang dan Jasa	796,917,461,349	1,067,770,021,280
Belanja Subsidi		
Belanja Hibah	82,351,613,750	39,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,948,610,000	250,000,000
Belanja Modal	290,731,764,740	284,000,000,000
Belanja Modal Tanah	29,450,000,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,192,188,485	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,865,961,840	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,940,000,000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,752,473,519	
Belanja Aset Lainnya	531,140,896	
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	500,000,000
Belanja Transfer	474,983,763,424	481,500,000,000
Belanja Bagi Hasil	11,269,123,424	18,500,000,000
Belanja Bantuan Keuangan	463,714,640,000	463,000,000,000
PEMBIAYAAN DAERAH	26,500,000,000	38,500,000,000
Penerimaan Pembiayaan Daerah	26,500,000,000	38,500,000,000
SILPA Tahun Sebelumnya		
Pencairan Dana Cadangan	23,500,000,000	38,500,000,000
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Pinjaman Dalam Negeri		
Pinjaman Luar Negeri		
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,500,000,000	4,000,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	4,000,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	23,500,000,000	
Pemberian Pinjaman Daerah		
SURPLUS PEMBIAYAAN		34,500,000,000

URAIAN	2023	2024
SURPLUS/DEFISIT		(453,737,326,135)

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Maret 2023

Proyeksi dan target APBD merupakan akumulasi anggaran selama satu tahun anggaran termasuk perubahan APBD. Proyeksi dan target APBD Tahun 2023-2026 dibuat sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2023, dengan melihat realisasi anggaran di Tahun 2022. Sehingga proyeksi belanja maupun pembiayaan harus seimbang dengan target pendapatan yang ditetapkan mendekati kemampuan daerah.

Pada proyeksi keuangan Tahun 2024-2026, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kontribusi tertinggi pada pendapatan retribusi berasal dari retribusi pelayanan kesehatan RSUD. Pendapatan tersebut sepenuhnya dikembalikan untuk pelayanan kesehatan. Kontribusi terbesar lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari BLUD RSUD 45 dan Puskesmas.
2. Belanja Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pada belanja operasi khususnya belanja pegawai dan belanja barang jasa merupakan prioritas I (belanja bersifat mengikat), belanja modal dan belanja bagi hasil merupakan prioritas II (belanja bersifat wajib), sedangkan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga menjadi prioritas III diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Melihat data realisasi keuangan di Tahun 2022, pendapatan berkisar pada angka Rp 2,68 Triliun dan belanja 2,67 Triliun, dengan rendahnya kemampuan keuangan Kabupaten Kuningan maka Belanja Pegawai dan Barang Jasa menjadi prioritas. Belanja Hibah, Bansos dan tidak terduga akan dianggarkan sesuai perkembangan kondisi kemampuan keuangan daerah. Target dan proyeksi belanja pada tahun 2024-2026 mengalami kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan 11,70 persen dengan bertambahnya angka PPPK Kabupaten Kuningan sebanyak 2.518 orang. Sedangkan belanja pegawai pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 hanya naik sebesar 1 persen.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari DD dan ADD. DD mengalami kenaikan tiap tahun sebesar 1 persen.
 - c. Belanja Modal yang berasal dari DAK Fisik mengalami kenaikan tiap tahun sebesar 5 persen.
 - d. Belanja Barang dan Jasa berasal dari DAK Non fisik dan belanja BLUD mengalami kenaikan sekitar 1 persen tiap tahun.
 - e. Belanja Bagi Hasil berasal dari pajak dan retribusi kenaikannya sebesar 1 persen tiap tahun.
3. Pembiayaan sedikit mengalami perubahan dengan pencairan dana cadangan untuk Pilkada di Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan penyertaan modal tidak dianggarkan mengingat anggaran untuk setiap Perangkat Daerah masih sangat kecil sehingga untuk penyertaan modal tidak menjadi prioritas dibandingkan anggaran untuk belanja Perangkat Daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari APBD; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024. Selain berpedoman pada regulasi tersebut penganggaran Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada juga berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Pasal 24 A (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2020 menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri sesuai

mekanisme pengelolaan APBD. Menurut Pasal 2 Perda Nomor 6 Tahun 2021 bahwa pembentukan dana cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran 2022 dan APBD tahun 2023. Anggaran Dana Cadangan untuk Pilkada yang ditetapkan adalah sebesar Rp38.500.000.000,-. Pemenuhan Dana Cadangan tersebut dibebankan pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,- dan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.500.000.000,-. Dimana Dana Cadangan tersebut akan disalurkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp30.500.000.000,- dan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp8.000.000.000,- dalam bentuk Hibah.

3.2.5 Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah sudah dilaksanakan secara terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Didalam aplikasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tahapan pembangunan daerah dimulai dari perencanaan hingga pada penganggarannya, termasuk informasi APBD, SILPA, dan Analisis Standar Belanja sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini berbasis *online* yang memuat informasi anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan beserta masing-masing *outputnya*. Khusus untuk *e-procurement*, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah mempunyai e-katalog lokal sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Kuningan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan pada RKPD Tahun 2024 melalui pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik akan melaksanakan kegiatan konvergensi lintas Perangkat Daerah dan lintas program (Bappeda, DPUTR, dan Diskatan) berupa lokasi prioritas untuk Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), yang saat ini dalam tahap finalisasi pemenuhan *readiness criteria*.

3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun terkait pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya pendukung pariwisata.

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi berupa Investasi Pemerintah berupa investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana DAU, DAK, dan Dana Daerah (skema pendanaan dengan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)).

Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu alternatif KPS yaitu pembiayaan pembangunan transportasi.

Dan skema pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak dunia usaha melalui program TJSL dan PKBL untuk mendukung “CSR Jabar untuk kemanusiaan dan lingkungan”. Program TJSL dan PKBL Kabupaten Kuningan melibatkan beberapa perusahaan yang difokuskan pada penanganan:

- 1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan

adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

- 3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- 5) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- 6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- 7) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- 8) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

3.3.1. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk Institusi Pelayanan

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi dasar (lisensi dan perizinan) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.22 Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Dasar

No.	Parameter	(%)	Kriteria
1	Kepuasan terhadap pelayanan KTP	86.91	Baik
2	Kepuasan terhadap pelayanan pendaftaran kelahiran dan kematian anggota keluarga	87.66	Baik
3	Kepuasan terhadap pelayanan IMB	86.17	Baik
4	Kepuasan terhadap pelayanan mengurus hak atas tanah	86.43	Baik
5	Kepuasan terhadap pelayanan lisensi bisnis/perizinan lainnya	86.43	Baik
	Jumlah	433.60	
	Rata-Rata	86.72	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka secara keseluruhan skor indeks kepuasan masyarakat pada bidang/unit Pelayanan Administrasi Dasar memiliki bobot nilai indeks sebesar 86,72% dan ada pada kategori “B”. Dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan pada unit ini masukke dalam kategori kinerja “Baik”.

Kepuasan masyarakat terhadap keadaan infrastruktur dan utiliti dasar yang tersedia di Kabupaten Kuningan tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.23 Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Keadaan Infrastruktur dan Utiliti Dasar

No.	Parameter	(%)	Kriteria
1	Kesan umum terhadap kondisi kualitas jalan lingkungan	84.10	Baik
2	Pendapat mengenai penyediaan trotoar untuk pejalan kaki	80.74	Baik
3	Kesan umum terhadap kualitas drainase di sekitar tempat tinggal	83.19	Baik
4	Kesan umum terhadap kualitas kebersihan wilayah	85.87	Baik
5	Pendapat umum terhadap kualitas penerangan jalan umum	83.51	Baik
6	Pendapat mengenai penggunaan air PDAM/sumber air yang disediakan Pemda	86.29	Baik
7	Pendapat mengenai jasa pembuangan limbah	85.78	Baik
8	Pendapat mengenai kualitas pemeliharaan dan pengaturan sistem irigasi yang dilakukan Pemda	85.17	Baik

No.	Parameter	(%)	Kriteria
9	Pendapat mengenai pelayanan fasilitas MCK umum	82.27	Baik
10	Pendapat mengenai transportasi dan manajemen lalu lintas	85.43	Baik
11	Pendapat mengenai penggunaan transportasi umum/publik	85.01	Baik
12	Pendapat mengenai kualitas pelayanan jasa pengumpulan dan pembuangan sampah	86.68	Baik
13	Pendapat mengenai kualitas pencegahan dan pemadaman kebakaran	88.07	Baik
	Jumlah	1102.11	
	Rata-Rata	84.78	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka secara keseluruhan skor indeks kepuasan masyarakat pada bidang/unit Infrastruktur dan Utiliti Dasar memiliki bobot nilai indeks sebesar 84,78% dan ada pada kategori “B”. Dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan pada unit ini masuk ke dalam kategori kinerja “Baik”.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.24 Tabel Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sosial Dasar

No.	Parameter	(%)	Kriteria
1	Penilaian tentang kualitas pendidikan (sekolah negeri)	88.32	Sangat Baik
2	Penilaian mengenai pelayanan kesehatan	86.97	Baik
3	Penilaian terhadap fasilitas olahraga, taman dan area publik terbuka	85.24	Baik
	Jumlah	260.53	
	Rata-Rata	86.84	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka secara keseluruhan skor indeks kepuasan masyarakat pada bidang/unit Pelayanan Sosial Dasar memiliki bobot nilai indeks sebesar **86,84%** dan ada pada kategori “B”. Dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan pada unit ini masuk ke dalam kategori kinerja “Baik”.

Kepuasan masyarakat terhadap dukungan ekonomi dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.25 Kepuasan Masyarakat terhadap Dukungan Ekonomi Dasar

No.	Parameter	(%)	Kriteria
1	Penilaian terhadap penggunaan pasar lokal/tradisional	85.18	Baik
2	Penilaian bantuan Pemda bagi petani, peternak, petani tambak dan nelayan	84.41	Baik
3	Penilaian terhadap program khusus (bencana alam)	86.49	Baik
	Jumlah	256.08	
	Rata-Rata	85.36	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka secara keseluruhan skor indeks kepuasan masyarakat pada bidang/unit Dukungan Ekonomi Dasar memiliki bobot nilai indeks sebesar 85,36% dan ada pada kategori “B”. Dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan pada unit ini masukke dalam kategori kinerja “Baik”.

Kepuasan masyarakat terhadap program-program umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.26 Kepuasan Masyarakat terhadap Program-Program Umum Pemda

No.	Parameter	(%)	Kriteria
1	Upaya Pemda dalam mengurangi penderitaan masyarakat miskin	83.93	Baik
2	Upaya Pemda untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman kelompok masyarakat miskin	83.78	Baik
3	Upaya Pemda untuk membantu menyediakan pekerjaan untuk pengangguran	79.03	Baik
4	Upaya Pemda untuk memerangi atau meminimalisir peluang KKN	83.70	Baik
5	Upaya Pemda membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan	82.15	Baik
6	Upaya Pemda untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keputusan DPRD	82.38	Baik
7	Upaya Pemda untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan/keputusan	83.75	Baik
8	Aksesibilitas dan responsivitas Bupati terhadap kebutuhan masyarakat	86.64	Baik
9	Upaya Pemda untuk memberikan pelayanan publik secara adil	84.41	Baik

No.	Parameter	(%)	Kriteria
10	Upaya Pemda membuka kesempatan yang sama untuk bekerja pada Pemda	80.60	Baik
11	Upaya Pemda mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan penggunaan area publik dan keamanan	86.39	Baik
12	Upaya Pemda untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan	86.20	Baik
13	Kemampuan Pemda untuk menegakkan peraturan perhutanan, pelestarian dan penggunaan tanah	86.02	Baik
14	Upaya Pemda untuk memberikan pendidikan berkenaan dengan pendidikan, kesehatan masyarakat, HAM dan hak pilih dalam pemilu	87.28	Baik
15	Upaya Pemda untuk memberikan pelayanan yang sensitif kepada kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan infrastruktur dan pelayanan publik	85.67	Baik
16	Upaya Pemda memberikan pelayanan untuk menjawab kebutuhan orang miskin dan kelompok minoritas dalam kaitannya dengan infrastruktur dan pelayanan publik	85.77	Baik
	Jumlah	1347.70	
	Rata-Rata	84.23	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka secara keseluruhan skor indeks kepuasan masyarakat pada bidang/unit Program-Program Umum Pemda memiliki bobot nilai indeks sebesar 84,23% dan ada pada kategori “B”. Dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan pada unit ini masuk ke dalam kategori kinerja “Baik”.

Hasil survei kepuasan masyarakat secara umum dan keseluruhan yang menyangkut ke lima (5) bidang/unit pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2022 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Rekapitulasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemda Kabupaten Kuningan di 5 Bidang/Unit Pelayanan

No.	Parameter	Total Poin	(%)	Kriteria
1	Pelayanan administrasi dasar (lisensi dan perizinan)	433.60	86.72	Baik
2	Infrastruktur dan utiliti dasar	1102.11	84.78	Baik
3	Pelayanan sosial dasar	260.53	86.84	Baik
4	Dukungan ekonomi dasar	256.08	85.36	Baik

No.	Parameter	Total Poin	(%)	Kriteria
5	Program-program umum	1347.70	84.23	Baik
	Jumlah	3400.02	427.93	
	Rata-rata (total poin dibagi 5 bidang)		85.00	Baik

Sumber: Hasil Survei, 2022

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Bila dibandingkan dengan survei IKM pada tahun 2021, maka kepuasan masyarakat pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 8,49% yaitu dari 76,51% di tahun 2021 menjadi 85% di tahun 2022. Hal ini berada pada kategori “B”, dengan perkataan lain, kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kategori kinerja “Baik”.

3.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Kuningan yang terbentuk sudah sesuai dengan kelembagaan yaitu dari 62 Perangkat Daerah (PD) terdapat 54 Perangkat Daerah (90%) yang sudah memiliki kelembagaan PPID Pelaksana. Berdasarkan permohonan pelapor yang ditujukan ke PPI Utama, pada tahun 2021 dan 2022 jumlah pelapor ada 17 PD. Sementara untuk tingkat laporan PD kepada PPID adalah sebesar 27,42%.

Selanjutnya, Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah dan akan terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, diantaranya melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 500/KPTS.265-PEREK&SDA/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, disertai dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penentuan tujuan dan sasaran harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, beserta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

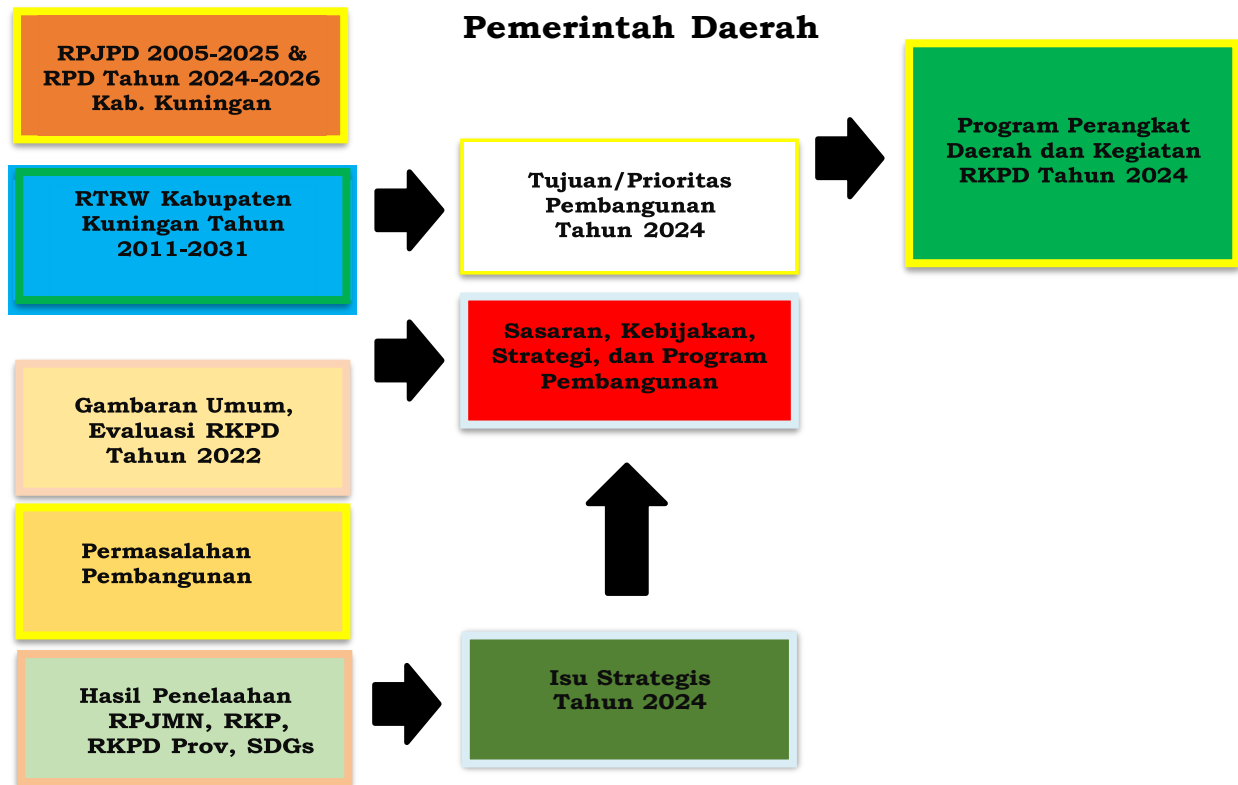
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Tahun 2024 ini merupakan masa transisi sebelum ditetapkannya kepala daerah terpilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. RKPD ini menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan menengah daerah kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022, capaian target pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi sasaran

dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 mendasarkan dan memperhatikan:

1. arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2024;
2. prioritas dan tujuan, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
3. arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
4. konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
5. penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2024; dan
6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kuningan 2024.

Guna mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran Dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Serta



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan turut memperhatikan

tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2024 pada RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026.

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Gambar 4.2 Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Sehubungan dengan kedudukan RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai penjabaran tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, maka Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024 juga diselaraskan sebagai upaya periode terakhir RPJPN. Tujuan periode terakhir RPJPN tersebut adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing".

Manifestasi dari arahan Presiden untuk mencapai misi Nawacita dan Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3 Visi Indonesia 2045



Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arah Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan

kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c) pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di

luar negeri.

Tema pembangunan RKP 2024 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2024, berbagai masukan hasil konsultasi publik serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian serta arahan Presiden RI, yang tertuang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Berdasarkan Rancangan RKP tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud dapat ditunjukkan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024)

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Berikut dapat dilihat Indikator Sasaran Pembangunan Nasional (Makro) Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional (Ekonomi Makro) Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i>)	5,3	5,3–5,5	6,2–6,5	5,3–5,7
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5–3,5
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	144,2–145,3	159,5	149,1–150,2
- dalam bulan impor	6,0	6,1–6,0	6,9	6,0–5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	0,5–0,5	(1,7)	0,5–0,4
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	9,6	10,7–12,3	9,9–10,2
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,7)	0,2–0,0	(0,0)–(0,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,8)	(1,5)–(1,7)	(2,2)–(2,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,5	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1–6,3	8,0–8,4	6,2–7,0
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,2	1.200–1.300	1.5	1.450–1.650
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7	396–420	782	662,7–731,1
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3–6,0	3,6–4,3	5,0–5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5–9,0	6,0–7,0	6,5–7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375–0,378	0,360–0,374	0,374–0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36–73,37	75,54	73,99–74,02
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	27,27
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105–107	105	105–108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107–108	107	107–110

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah: **“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”**. Tema tersebut memiliki menekankan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya dengan mengoptimalkan peningkatan daya saing SDM, pembangunan ekonomi berkualitas, pemerataan pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur andal secara berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 (tiga) tahun kedepan, pembangunan Jawa Barat diprioritaskan pada:

1. Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata;
2. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama;
3. Penguatan sistem kesehatan daerah;
4. Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
5. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa; dan
6. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Uraian Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tujuan		Sasaran	
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat
		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat
		1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda
		1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk
2.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan
		2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum
		2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja
3.	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur
		3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur
		3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
		3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana
		3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan
4.	Terciptanya demokrasi	4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi

Tujuan		Sasaran	
	dan birokrasi yang berkualitas	4.2	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah
	dan didukung oleh inovasi daerah	4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penentuan Tujuan dan Sasaran harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, beserta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

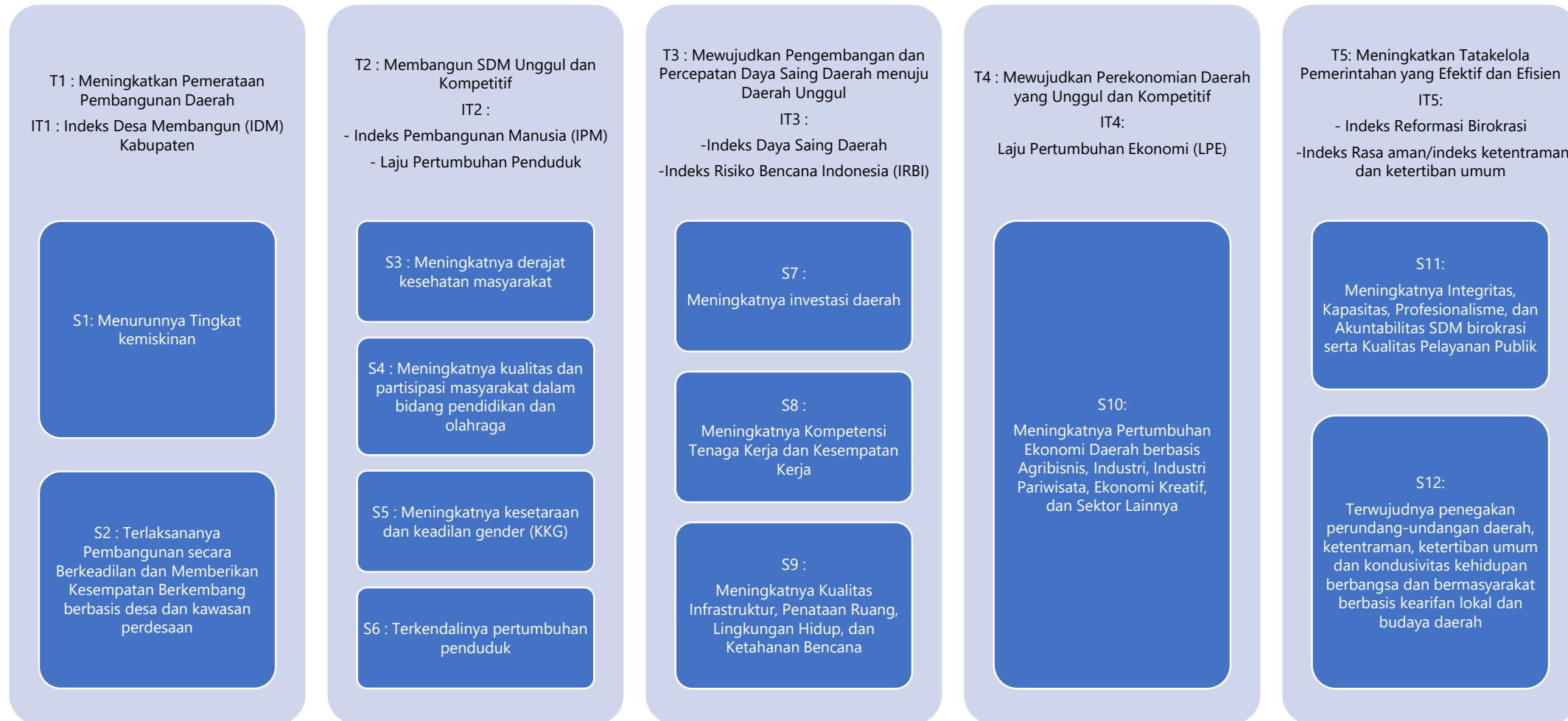
RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 memuat 5 (lima) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Kuningan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD dengan mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

RKPD Tahun 2024 merupakan tahapan pertama dari RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026, dengan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2024 yaitu **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan tema **“Menciptakan SDM birokrasi dan masyarakat yang sehat, unggul dan produktif”**. Arah kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia baik SDM birokrasi, tenaga teknis maupun masyarakat yang sehat, unggul, produktif serta berintegritas yang akan mempengaruhi produktivitas dan memunculkan inovasi-inovasi sebagai modal awal menumbuhkan ekonomi kreatif yang dapat

berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya pada tahun 2024 disajikan pada gambar 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026



Tabel 4.2 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD		
							2024	2025	2026			
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah			Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Poin	0,7446	0,7640	0,7830	0,7930	0,7930		
				Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	0,332	0,328	0,328		
		S1	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin;	Persen	12,76	11,12-12,72	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98		
				Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	68	2	2	2	74		
				Skor Pola Pangan Harapan	Poin	93,20	87,01	88,04	89,03	89,03		
		S2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	Jumlah Desa berstatus Mandiri	Desa	183	10	10	10	213		
				Jumlah Desa berstatus Maju	Desa	62	15	15	15	107		
				Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi	Unit Usaha	N/A	220	275	330	-		
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,16	70,86-71,40	71,31-71,85	71,76-72,52	70,86-71,40		
				S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,12	83,78-84,24	84,14-84,70	84,62-84,83	84,62-84,83
				S4	Meningkatnya kualitas dan partisipasi	Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	61,89-62,66	62,64-63,28	62,64-63,28

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD	
						2024	2025	2026		
		masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	0,5	0,5	10,53	
			Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	250	300	300	
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	8	10	43	
		S5	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,04	87,02	87,04	87,06	87,06
		S6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,32	1,28	1,26	1,24	1,24
				MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	Persen	67,24	67,24	67,34	68,00	68,00
				TFR (Angka Kelahiran Total)	Anak	2,30	2,30	2,25	2,20	2,20
				i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	Poin	52,73	52,73	52,93	53,15	53,15
				Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	Persen	20,86	20,76	20,56	20,46	20,46
				ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	Orang (kelahiran)	17,1	17	16,9	16,8	16,8

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD	
						2024	2025	2026		
			MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	Tahun	20	20	20,5	20,5	20,5	
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,02	1,30-1,44	1,45-1,60	1,61-1,95	1,61-1,95	
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	129	128	128	
		S7	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah Nilai Investasi	Triliyun Rupian	7,0	1,1	1,2	1,35	1,35
				Jumlah produk izin	Produk izin	N/A	2500	3500	5000	5000
		S8	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	9,26-11,49	9,47-11,77	9,47-11,77
				Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	50	50	55	60	60
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61,80	62,57-65,03	63,54-66,02	64,51-67,01	62,57-65,03
				Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	336	368	368
		S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	65	66	66
				Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,1	94,19	95,74	97,29	97,29
		Akses Sanitasi Layak		Persen	93,65	96,33	97,68	99,02	99,02	
		Persentase Kemantapan jalan		Persen	80,69	86,0	86,8	87,9	87,9	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD
						2024	2025	2026	
			Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	75	100	100
			Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persen	49	53	55	57	57
			Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12	30	32	34	34
			Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
			Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Hektar	54,35	2,00	2,00	2,00	2,00
			Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	97,75	97,94	97,94
			Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	50	50	299,96
			Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Sertifikat	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
			Penanganan Sampah	Persen	61,09	58,2	57,8	57,4	57,4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD	
						2024	2025	2026		
			Pengurangan Sampah	Persen	22	6	6,1	6,2	6,2	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	65,98	66,28	66,58	66,58	
			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,68	0,70	0,71	0,72	0,72	
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	-0,03-7,03	-0,25-6,87	-0,25-6,87
			PDRB sektor Pertanian	Persen	N/A	7,93	8,21	8,36	8,36	
			Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	DTW	12	3	4	5	24	
			Kunjungan wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	4.173.190	4.590.509	4.590.509	
			Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	0	50	50	75	175	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifika	Orang	25	50	50	75	200	
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan	S11	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	B	B	BB	BB	
			Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	75	76	76	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD
						2024	2025	2026	
	yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	57	57	60	63	63
			Indeks Sistem Merit	Poin	282	290	290	325	325
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85	85,70	86,40	87,10	87,10
			Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,88	3	3,1	3,2	3,2
			Meningkatnya produk yang dihasilkan	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%
			Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0 -18	Orang	N/A	896.351	898.235	900.119	900.119
			Nilai LPPD Kabupaten di tingkat Provinsi/Nasional	Poin	N/A	3,100	3,200	3,300	3,300
			Opini Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Level SPIP	Level	3	2	3	3	3
			Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	B	B	B	BB	BB

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD 2022	Target			Kondisi Akhir RPD
						2024	2025	2026	
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan	Persen	100	100	100	100	100
		S12 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	100	100	100	100
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	74,11*	75	-	-	75
			Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	Poin	N/A	0,50	0,51	0,52	0,52
			Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	Budaya	22	22	22	22	22

Sumber : RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

Dari ke-12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2024 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2025. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bahwa dijelaskan tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Dari tema pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,

(7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Gambar 4.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.

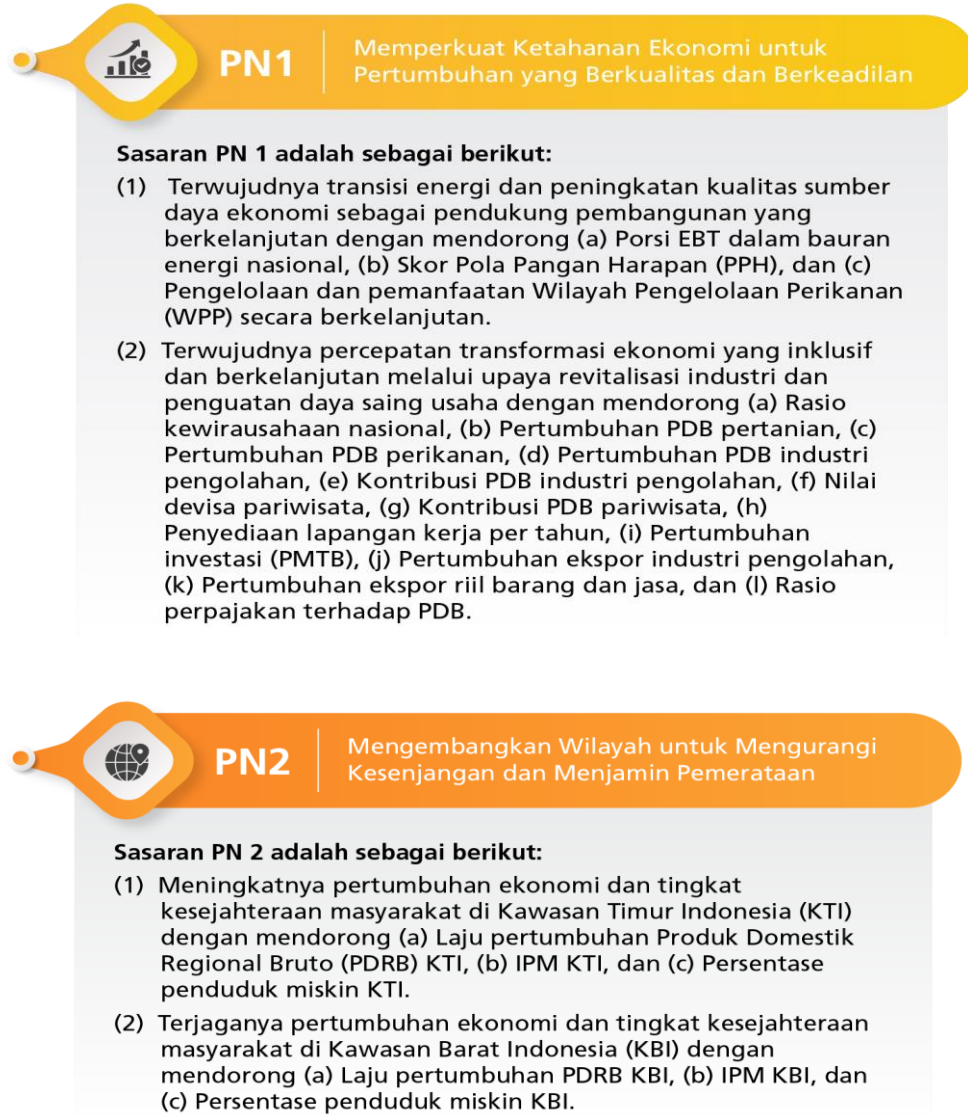
Gambar 4.7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional (PN) memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing PN disampaikan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.8 Sasaran Masing-masing Prioritas Nasional 2024





PN3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, (l) Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah.
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong (a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing mendorong (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 500, , dan (f) Peringkat *Global Innovation Index*.



PN4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi .



PN5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara.
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi.
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

 **PN6** | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
- (3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* dengan mendorong (a) Persentase penurunan emisi GRK – kumulatif, (b) Persentase penurunan emisi GRK – tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.

 **PN7** | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum.
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional.
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, maka ditetapkan 4 (empat) isu strategis pembangunan Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
- b. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
- c. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar;
- d. Demokrasi yang terkonsolidasi dengan didukung Reformasi Birokrasi Tematik dan Inovasi Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kesatu dari RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tema RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu *“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”*. Sedangkan Tema pada tahun 2024 yaitu *“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”*. Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata;
- b. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
- c. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
- d. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- e. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
- f. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja OPD, dan Kunjungan Kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Kuningan, dan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS.

Dalam konteks umum, DPRD Kabupaten Kuningan sebagai badan legislatif tingkat daerah memiliki beberapa peran dan fungsi penting. Beberapa pokok-pokok pikiran yang mungkin menjadi fokus DPRD Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 meliputi:

1. BIDANG HUKUM, ADMINISTRASI, PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN

- 1) Penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- 2) Sosialisasi dan publikasi peraturan daerah agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami keberadaannya.
- 3) Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Pemaksimalan penataan dan pemanfaatan aset daerah melalui sistem pemetaan aset.
- 5) Penataan tata ruang wilayah kabupaten Kuningan melalui penetapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
- 6) Peningkatan implementasi administrasi perkantoran melalui penggunaan sistem teknologi informasi online.
- 7) Peningkatan peran dinas perpustakaan dalam menyediakan sarana prasarana berupa buku perpustakaan yang memadai dan lengkap untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.

2. BIDANG PEREKONOMIAN

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan dan mendorong ketahanan pangan dan pertanian dalam memenuhi kebutuhan komoditi pertanian di masyarakat.
- 2) Koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pihak lainnya dalam mengendalikan pertumbuhan dan kebutuhan bibit.
- 3) Meningkatkan pemasaran produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan dan memfasilitasi akses ke pasar modern dan tradisional.
- 4) Implementasi konsep "One Village One Product" di setiap desa di Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 5) Peningkatan produk-produk lokal dengan pembuatan regulasi terkait perlindungan produk lokal daerah.

- 6) Maksimalisasi kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuningan dan kontribusinya terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat.
- 7) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata dengan memberikan pelatihan bagi pengelola dan mempermudah perijinan desa wisata

3. BIDANG PEMBANGUNAN

- 1) Peningkatan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Kuningan, terutama pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.
- 2) Pemerataan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kabupaten Kuningan.
- 3) Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran untuk pembangunan yang merata. Pemerintah pusat dan provinsi terus memberikan dukungan anggaran secara berkelanjutan untuk Kabupaten Kuningan.

4. BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 1) Penyaluran program bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan, BPJS JKN PBI, dan Kartu Pintar bagi keluarga miskin yang perlu dievaluasi dan diperbaiki terkait data calon penerima bantuan.
- 2) Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui program pelatihan ketenagakerjaan.
- 3) Pemerintah daerah perlu mendorong program dan kegiatan baru atau peningkatan anggaran pada program yang menjadi prioritas dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kuningan.

- 4) Pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak didik melalui pembinaan dan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan anggaran yang memadai.
- 5) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kendaraan mobil ambulance yang memadai atau peremajaan.
- 6) Peningkatan SDM dan penguatan institusi keluarga melalui optimalisasi kampung keluarga berkualitas dengan sinergi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mendukung dan menyiapkan program dan kegiatan di masing-masing SKPD.
- 7) Penataan administrasi terkait pengelolaan validasi data fakir miskin yang terus ditingkatkan, baik pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non-DTKS di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kuningan.
- 8) Pembimbingan dan perhatian terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan rumah singgah di Kabupaten Kuningan.
- 9) Maksimalisasi pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kuningan dengan mengapresiasi pembukaan poliklinik untuk penderita talasemia dan jiwa di RSUD 45 (eks Citra Ibu) dan mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan.
- 10) Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Linggarjati Kuningan dengan mendorong perubahan status rumah sakit dari tipe C menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.
- 11) Merencanakan program dan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga dan Pondok Pesantren.

Sampai saat ini total usulan Program dan Kegiatan Pokok Pikiran DPRD yang sudah terinput pada SIPD sebanyak 1975 Kegiatan dan tersebar di beberapa OPD Teknis. Usulan Program dan Kegiatan Pokok Pikiran DPRD ini nantinya juga akan diusulkan melalui sumber pendanaan lain seperti Dana Keistimewaan dan atau melalui APBD Provinsi.

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran, maka isu strategis untuk pembangunan Tahun 2024, yaitu:

- a. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Masih Tingginya Angka Pengangguran;
- c. Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Ketenagakerjaan;
- d. Masih Tingginya Kasus Stunting, Kematian Bayi & Kematian Ibu;
- e. Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah;
- g. Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar
- h. Tantangan Perubahan Iklim dan Potensi Bencana
- i. Tantangan pelaksanaan pemilukada yang aman

Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan serta isu strategis diatas, proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 3.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan		
1	Penguatan daya saing usaha	1 Masih tingginya tingkat pengangguran	1	Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha	1	Masih rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan
			2	Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang professional	2	Masih tingginya angka pengangguran
			3	Masih tingginya angka pengangguran		
			4	Rendahnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat		
			5	Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan		
			6	Semakin berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya minat berusaha di bidang pertanian		
			7	Masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu		
			8	Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi		
			9	Minimnya generasi penerus muda yang bergerak disektor pertanian		
			10	Menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian		
			11	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian		
			12	Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian		

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
			13	Besarnya potensi kepariwisataan belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana	
			14	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kepariwisataan	
			15	Belum maksimalnya aksesibilitas dan amenitas untuk kaum lansia dan difabel di jasa usaha pariwisata	
			16	Kemudahan investasi sektor pariwisata belum optimal	
			17	Sadar wisata masyarakat di sekitar destinasi pariwisata belum optimal	
			18	Masih rendahnya kompetensi pekerja pada sektor kepariwisataan	
			19	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan pariwisata baik pada aturan maupun kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata	
			20	Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	
			21	Belum optimalnya event kepariwisataan sebagai promosi wisata dan pameran kepariwisataan yang berbasis audio visual	
			22	Akses permodalan bagi pelaku ekraf belum optimal	
			23	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual belum terbangun	
			24	Belum optimalnya profesionalitas ASN	

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
			25 Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik	
			26 Belum optimalnya ketercapaian nilai SAKIP	3 Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			27 Kurangnya Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	
			28 Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah	
			29 Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukkan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri	4 Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah
			30 Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM	
			31 Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal	
			32 Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar	
			33 Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
			34 Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi	

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
			35 Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan	
			36 Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	
			37 Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender	
			38 Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan	
			39 Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan/rehabilitasi	
			40 Belum optimalnya penyelenggaraan UPTD PPA sebagai One Stop Service bagi pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak	
			41 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	
			42 Angka pemakaian kontrasepsi cara modern masih stagnan	
			43 Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	
			44 Masih banyaknya perkawinan usia muda (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria)	
			45 Masih rendahnya tingkat investasi sehingga berpengaruh pada sedikitnya serapan tenaga kerja	
			46 Belum optimalnya nilai investasi pada berbagai sektor	
			47 Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan		
			48	Masih belum berkembangnya sentra industri			
2	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2	Masih Tingginya Angka Kemiskinan	1	Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan jumlah keluarga fakir miskin	5	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan
				2	Masih rendahnya akurasi data dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin		
3	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan			3	Belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan	6	Masih tingginya kasus stunting, kematian bayi dan kematian ibu
				4	Masih adanya Penanganan pasien tidak mampu yang belum tercover jaminan kesehatan		
				5	Belum terjaminnya penyelesaian biaya bagi pasien tidak mampu oleh program jaminan kesehatan		
				6	Masih kurangnya Jumlah SDM jabatan fungsional Kesehatan dan dokter spesialis		
				7	Masih terbatasnya sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan pelayanan		
				8	Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pendidikan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah		
				9	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan		
				10	Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai		

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
4	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		1	Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata diseluruh daerah terutama disentra produksi pangan daerah;	7 Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar
2	Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air				
3	Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan				
4	Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan				
5	Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal				
6	Kondisi kemandapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah				
7	Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan				
8	Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah				
9	Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastuktur daerah				
10	Masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum				

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
			11 Belum ditetapkannya regulasi penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku	
			12 Alokasi ruang untuk pengembangan Investasi Daerah	
			13 Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik	
			14 Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan	
			15 Belum tersedianya fasilitas parkir yang aman, nyaman, tetib dan teratur	
			16 Belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan	
			17 Kurang efektifnya kinerja pelayanan uji KIR, dan perparkiran	
			18 Meningkatnya fenomena ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>)	
			19 Mulai menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	
			20 Cakupan pelayanan persampahan masih rendah baik ditinjau dari luasan wilayah maupun besaran timbulan sampahnya	
			21 Potensi ancaman bencana di Kabupaten Kuningan yang cukup tinggi	
			22 Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum didukung optimal oleh sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan anggaran	
			23 Masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	
5	Pelaksanaan Pemilu 2024		1	8 Tantangan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang aman

No	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Isu Strategis RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan
6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi		Tahun 2024 merupakan tahun politik yang dapat mempengaruhi masalah ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Kuningan.	9 Tantangan perubahan iklim dan potensi bencana

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2023

Berdasarkan 9 (sembilan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2024 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2024 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 untuk pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah	1 Menurunnya Tingkat kemiskinan	1 Membangun pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis perdesaan	1 Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
		2 Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin	2 Pendampingan dan Fasilitasi PMKS dan PSKS	
			3 Pengembangan ekonomi keluarga miskin	
	2 Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	1 Memperkuat UMKM dan BUM Desa	1 Penguatan kelembagaan dan produksi UMKM	
			2 Penguatan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama untuk memfasilitasi pemasaran UMKM	
Membangun SDM Unggul dan Kompetitif	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1 Membangun desa sehat berbasis masyarakat	
			2 Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan	
			3 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan	
			4 Membangun kemitraan multipihak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
	2 Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	1 Membangun sistem pendidikan masyarakat berbasis komunitas dan atau desa	1 Pemenuhan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	
			2 Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan	2 Membangun dan mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat
			3 Peningkatan prestasi atlet secara terencana dan berkesinambungan	3 Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan
				4 Meningkatkan potensi pemuda dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			berwirausaha dan kepeloporan			
			5 Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga			
			6 Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan			
			3 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1 Pengarusutamaan gender melalui pendekatan berbasis sektoral dan kewilayahan	1 Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender	
					2 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi	
			4 Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1 Pengendalian fertilitas	1 Meningkatkan pelayanan keluargaberencana dan kesehatan reproduksi	
				2 Peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan	2 Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan keluarga	
			Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1 Meningkatkan investasi daerah	1 Penyederhanaan birokrasi	1 Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan berbasis elektronik
					2 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja	2 Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal
					3 Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal	
2 Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	1 Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja				
	2 Meningkatkan penyerapan/penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2 Peningkatan penyerapan/penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi para pencari kerja				
	3 Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	3 Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja				
	4 Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	4 Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja				
3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	1 Meningkatkan kuantitas kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	1 Peningkatan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi				
	2 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sektor konstruksi dan kualitas pengendalian konstruksi	2 Pengembangan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan				
	3 Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan	3 Pengembangan prasarana air limbah domestik				
	4 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	4 Pengembangan prasarana persampahan				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
		5	Menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat	5	Peningkatan kualitas jaringan drainase			
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana, layanan serta edukasi	6	Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum dan sosial			
		7	Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam PPLH	7	Peningkatan kuantitas bangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum dan sosial			
		8	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	8	Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian			
				9	Peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan jalan			
				10	Terselenggaranya pelatihan tenaga konstruksi			
				11	Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah			
				12	Memperkuat pelayanan infrastruktur dasar di perumahan dan kawasan permukiman			
				13	Penyelesaian masalah pertanahan			
				14	Peningkatan kinerja penanganan dan pengurangan sampah			
				15	Peningkatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup			
				16	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			
				17	Peningkatan penanganan darurat bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar			
				18	Peningkatan Penanganan Pasca Bencana			
		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	1	Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis sektor pertanian agribisnis dan agroindustri	1	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian
					2	Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sektor perikanan	2	Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan produksi dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal
					3	Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	3	Peningkatan pendapatan nelayan dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		4	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan	4	Membangkitkan industri/home industri perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri/home industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan pendapatan hasil perikanan	
		5	Pengawasan sumberdaya perikanan yang terintegrasi	5	Pengelolaan wilayah perairan umum daratan, penguatan pengawasan sumberdaya perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait	
		6	Mengembangkan pusat-pusat kawasan agribisnis dan agroindustri	6	Penyusunan kajian pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri	
		7	Mengembangkan potensi wisata berkelanjutan	7	Penyiapan pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri berbasis aset dan potensi perdesaan	
		8	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	8	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata	
		9	Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	9	Peningkatan sarana promosi dan event kepariwisataan	
		10	Mengembangkan pusat inkubasi ekonomi kreatif	10	Pendampingan pelaku ekonomi kreatif subsektor unggulan	
				11	Pengembangan pusat inkubasi ekonomi kreatif kabupaten	
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	1	Memperkuat kapasitas SDM birokrasi	1	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam proses perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi program
		2	Menyelenggarakan reformasi birokrasi	2	Peningkatan efektivitas perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan	
		3	Melakukan monitoring dan evaluasi SDM birokrasi	3	Penerapan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	
		4	Mendorong penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	4	Pembinaan keperintisan, kepeloporan dan kepahlawanan	
		5	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip	
		6	Menyediakan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat	6	Terlaksananya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7 Penyempurnaan Standar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan warga masyarakat
		8 Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama untuk Pembangunan	8 Peningkatan kualitas koordinasi, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		9 Pembangunan sistem informasi hukum terintegrasi	9 Pembangunan sistem informasi terintegrasi penatausahaan, fasilitasi kerjasama
		10 Penyempurnaan standar pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	10 Menyusun SOP penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah
		11 Penyusunan regulasi yang mengatur secara rinci terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	11 Mengembangkan sistem informasi hukum terintegrasi
		12 Transformasi pengadaan kearah digitalisasi	12 Menyusun rancangan Kebijakan daerah (Perda/Perbup/Kepbup) tentang Bidang Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar
		13 Menyusun regulasi pengendalian pembangunan	13 Menyusun rancangan kebijakan hal pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan dan kebijakan pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan yang ditetapkan
		14 Sosialisasi dan Bimbingan kepada Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan	14 Peningkatan sosialisasi tentang kebijakan daerah di bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar di bidang kesejahteraan rakyat
		15 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan	15 Menyusun kebijakan UKPBJ melalui 4 (empat) domain yakni: domain proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi
		16 Sosialisasi, Koordinasi kepada Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD	16 Menyusun kebijakan daerah (Perda/Perbup/Kepbup) terkait sistem pengendalian pembangunan
		17 Koordinasi Pengendalian Inflasi	17 Menyusun regulasi pengendalian perekonomian (Perda/Perbup/Kepbup) sistem pengendalian perekonomian
		18 Menyusun regulasi pengendalian perekonomian dan SDA	18 Identifikasi batas daerah
		19 Menyusun kebijakan dan kesepakatan program dan kegiatan stabilisasi harga pokok (HLM)	19 Menyusun kesepakatan regulasi permendagri atas hasil dari identifikasi batas daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		20 Menyusun kebijakan peningkatan produksi dan ketersediaan bidang pertanian, perikanan dan peternakan	20 Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan pilar batas daerah
		21 Menyusun pemanfaatan lingkungan hidup, SDA untuk perkembangan pariwisata	21 Monitoring dan evaluasi hasil pembangunan pilar batas daerah
		22 Sinkronisasi perbatasan, pelacakan batas daerah	22 Pengelolaan sistem keuangan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien
		23 Menyusun kebijakan regulasi/kesepakatan bahan revisi peraturan menteri dalam negeri (revisi regulasi)	23 Meningkatkan kompetensi tentang SAKIP
		24 Meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	24 Melakukan pendampingan dan desk konsultasi rentang SAKIP
		25 Meningkatkan Nilai SAKIP	25 Melaksanakan reviu SAKIP Pemda dan evaluasi SAKIP perangkat daerah
		26 Penataan tupoksi organisasi	26 Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP
		27 Komitmen pimpinan dan koordinasi perangkat daerah	27 Melaksanakan penyusunan tupoksi
		28 Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	28 Peningkatan koordinasi perangkat daerah bahan penyusunan komitmen pimpinan
		29 Perbaikan penerapan organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization)	29 Pengembangan reformasi birokrasi
		30 Sosialisasi tupoksi	30 Peningkatan penerapan sistem AKIP
		31 Standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi	31 Meningkatkan pemahaman tupoksi
		32 Penyempurnaan Standar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Layanan kepada pimpinan	32 Menyediakan kelengkapan acara, kelancaran acara, kehadiran tamu undangan Daerah
		33 Sosialisasi, Koordinasi, Peningkatan Kapasitas bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 Memperlancar koordinasi layanan internal dan eksternal / lintas sektor
		34 Merumuskan dan menata jenjang kinerja Daerah (IKD) ke Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	34 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		35	Memperkuat pengendalian dari pimpinan secara berjenjang	35	Penyusunan kebijakan anggaran sesuai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)		
		36	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan terhadap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	36	Menyusun Indikator Kinerja Daerah (IKD) ke Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
		37	Penyempurnaan standar pelayanan internal Setda	37	Meningkatkan sistem pengendalian internal		
		38	Tersusunnya regulasi tentang tata kelola sarana dan prasarana Setda	38	Melaksanakan penyusunan SOP pelayanan		
		39	Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan jumlah SDM	39	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar		
		40	Pemerataan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	40	Meningkatkan kualitas tata kelola sarana dan prasarana Setda		
		41	Optimalisasi peran pengelola arsip	41	Penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan jumlah SDM lingkup Setda		
		42	Penyusunan regulasi yang mengatur secara rinci terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	42	Penyusunan Kebijakan pemerataan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi		
		43	Meningkatkan Nilai SPIP	43	Menyusun petunjuk pelaksanaan pengelola Arsip		
		44	Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal	44	Peningkatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana kantor Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)		
					45	Meningkatkan kompetensi tentang SPIP	
					46	Melakukan pendampingan dan desk konsultasi tentang SPIP dan manajemen risiko	
					47	Implementasi manajemen risiko	
					48	Melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP pada Pemda dan perangkat daerah	
					49	Menindaklanjuti hasil penilaian mandiri (AOI)	
		2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	1	Meningkatkan kondusivitas dan pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	1	Memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
				2	Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan kebudayaan Kuningan dan Jawa Barat	2	Meningkatkan ketaatan warga masyarakat, aparatur, badan hukum terhadap perundang undangan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara
			4 Membangun kembali gotong royong sebagai modal Sosial
			5 Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan meningkatkan ruang dialog antar warga
			6 Memasyarakatkan seni budaya lokal
			7 Mengenalkan seni budaya lokal di kalangan pelajar

Sumber : RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Tema Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kuningan adalah “**Menciptakan Sumberdaya Manusia Birokrasi dan Masyarakat yang Sehat, Unggul dan Produktif**”.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, sosial, ketahanan pangan, infrastruktur produktif dan pengembangan SDM unggul. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, yaitu :

PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif

- PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
- PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
- PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
- PPD 5 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu Strategis Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024	
1	Masih Tingginya Kasus Stunting, Kematian Bayi & Kematian Ibu	1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
2	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
3	Tantangan pelaksanaan pemilukada yang aman		
4	Masih Tingginya Angka Pengangguran;	3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
5	Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Ketenagakerjaan		
6	Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar		
7	Tantangan Perubahan Iklim dan Potensi Bencana		
8	Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah	4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
9	Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan	5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber : Hasil Analisis tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan

Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dapat dilihat pada Tabel 4.7 sampai Tabel 4.11.

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 1 (PPD1) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a Indeks Kesehatan (Poin)	83,78-84,24	1 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1	Membangun desa sehat berbasis masyarakat	1	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	244	1,738,374,855	DINKES
					2	Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	192787	147,118,107,767	DINKES
					3	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan		Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan masyarakat (Puskesmas)	37	208,521,176,663	
					4	Membangun kemitraan multipihak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)	100	142,550,000,000	
								Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perseorangan dan masyarakat (Unit Instalasi)	20	71,363,978,754	
							3	Program peningkatan kapasitas		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder				
						sumberdaya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi	100	300,000,000					
						4 Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Sertifikat)	100	150,000,000	DINKES				
2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	a	Indeks Pendidikan (Poin)	61,68-61,96	1	Membangun sistem pendidikan masyarakat berbasis komunitas dan atau desa	1	Pemenuhan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	1	Program pengelolaan pendidikan	APK SD/Paket A (Persen)	100,02	61,620,000,000	DISDIKBUD
		b	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Persen)	0,5	2	Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan	2	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat			APM SD/Paket A (Persen)	99,91	61,620,000,000	
		c	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan (Orang)	200	3	Peningkatan prestasi atlet secara terencana dan berkesinambungan	3	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Persen)	1,9	80,210,000,000	
		d	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	6			4	Meningkatkan potensi pemuda dalam berwirausaha dan kepeloporan			Persentase SD berakreditasi minimal B (Persen)	97,60	124,800,000,000	
							5	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga			Persentase SD yang memenuhi SPM (Persen)	100	124,800,000,000	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
					6	Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan	Guru profesional di SD (Persen)	59,30	552,500,000	
							Jumlah SD Memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio)	1:06	552,500,000	
							APK SMP/Paket B (Persen)	99,52	83,135,000,000	
							APM SMP/Paket B (Persen)	93,65	83,135,000,000	
							Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen)	1,9	19,552,426,400	
							Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen)	1,8	19,552,426,400	
							Persentase SMP berakreditasi minimal B (Persen)	85,10	150,000,000	
							Persentase SMP yang memenuhi SPM (Persen)	100	44,418,720,000	
							Guru profesional di SMP (Persen)	59,25	578,500,000	
							Jumlah SMP mempunyai rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio)	1:06	1,690,000,000	
							APK PAUD usia 5-6 tahun (Persen)	93,98	92,852,500,000	
							Jumlah PAUD Holistik integratif (Unit)	150	750,000,000	
							Jumlah Lembaga PAUD (Unit)	920	32,500,000,000	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder						
							Jumlah Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55	14,657,500,000							
							Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga masyarakat rujukan (PKBM.Kursus.dan Pelatihan) (Lembaga)	58	2,550,000,000							
							Rasio Penilik PAUD (Rasio)	1:10	2,990,000,000							
											2	Program pembinaan perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pengelolaan perpustakaan (Persen)	32,5	1,161,000,000	DISARPUS
											3	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen)	0,5	1,000,000,000	DISPORAPAR
											4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya pengembangan Kapasitas Kepramukaan (orang)	200	600,000,000	DISPORAPAR
						5	Program pengembangan daya saing keolahragaan	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Medali)	6	14,825,000,000	DISPORAPAR					
3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,02	1	Pengarusutamaan gender melalui pendekatan berbasis sektoral dan kewilayahan	1	Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender	1	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah dokumen profil Gender (Dokumen)	1	100,000,000	DPPKBP3A		
						2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi	2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/Eksekutif yang dibina (Orang)	50	600,000,000	DPPKBP3A			

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
							Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang)	200			
							Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (OPD)	28			
							Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang (31 Kelp))	300			
							Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina (Organisasi)	39			
						3	Program perlindungan perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)	30	300,000,000	DPPKBP3A
						4	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa)	3	500,000,000	DPPKBP3A
						5	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak)	22	250,000,000	DPPKBP3A
						6	Program perlindungan khusus anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)	34	450,000,000	DPPKBP3A

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder						
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	a	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	1,28	1	Pengendalian fertilitas	1	Meningkatkan pelayanan keluargaberecana dan kesehatan reproduksi	1	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun)	20	1,473,200,000	DINSOS		
		b	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW)) (Persen)	67,24	2	Peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan	2	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan keluarga			Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok)	125		DPPKBP3A		
		c	TFR (Angka Kelahiran Total) (Anak)	2,30							Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi)	250		DPPKBP3A		
		d	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) (Poin)	52,73							2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas)	119	150,000,000	DPPKBP3A
		e	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi) (Persen)	20,76								Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevelence Rate (CPR) (Persen)	67,24	150,000,000		
		f	ASFR (Angka Kelahiran Remaja) (Orang (Kelahiran))	17								Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	20,76	150,000,000		
		g	MUKP (Median Usia Kawin Pertama)	20								Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32,03	2,202,500,000		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		Perempuan) (Tahun)				3 Program pengendalian penduduk	GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen)	1	1,150,000,000	DPPKBP3A
						Jumlah sekolah formal/non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah)	5			
						Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data)	10			
						Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa)	376			
						Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN)	75			
						TOTAL ANGGARAN			1,451,435,275,439	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 2 (PPD2) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder					
PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	a	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	57	1	Memperkuat kapasitas SDM birokrasi	1	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam proses perencanaan, implementasi, dan monitoring serta evaluasi program	1	Program pengembangan sumberdaya manusia	Meningkatnya Nilai Dimensi Indeks Profesionalitas ASN (Persen)	57	3,650,000,000	BKPSDM
			b	Indeks Sistem Merit (Poin)	290	2	Menyelenggarakan reformasi birokrasi	2	Peningkatan efektivitas perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan	2	Program kepegawaian daerah	Meningkatnya Nilai Aspek Penilaian Sistem Merit (Persen)	70	7,625,000,000	BKPSDM
		c	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	85,70	3	Melakukan monitoring dan evaluasi SDM birokrasi	3	Penerapan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	3	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi Publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah	100	3,845,750,000	BAPPEDA	
		d	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3	4	Mendorong penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	4	Pembinaan keperintisan, kepeloporan dan kepahlawanan	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah Kajian (Dokumen)	2	1,700,000,000	BAPPEDA	
		e	Meningkatnya produk yang dihasilkan (Persen)	100	5	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip	5	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan (32 Kecamatan) (Pelayanan)	9441	1,595,021,600	KECAMATAN	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		f Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0 - 18 (Orang)	8963 51	6 Menyediakan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat	6 Terlaksananya fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD		Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (kategori perizinan) (Dokumen)	8545		
		g Nilai LPPD Kabupaten di tingkat Provinsi/Nasional (Poin)	3,100	7 Penyempurnaan Standar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan warga masyarakat	6 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah (Persen)	100	4,750,000,000	DISKOMINFO
		h Opini Laporan Keuangan Daerah (Kategori)	WTP	8 Optimalisasi Pemanfaatan Kerjasama untuk Pembangunan	8 Peningkatan kualitas koordinasi, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	7 Program aplikasi informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)	100	13,700,000,000	DISKOMINFO
		i Level SPIP (Level)	2	9 Pembangunan sistem informasi hukum terintegrasi	9 Pembangunan sistem informasi terintegrasi penatausahaan, fasilitasi kerjasama	8 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (OPD)	70	750,000,000	DISKOMINFO
		j Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Skor)	B	10 Penyempurnaan standar pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	10 Menyusun SOP penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah	9 Program penyelenggaraan statistik sektoral	Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral (OPD)	70	475,000,000	DISKOMINFO

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder		
			k	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan (Persen)	100	1 1	Penyusunan regulasi yang mengatur secara rinci terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	1 1	Mengembangkan sistem informasi hukum terintegrasi	1 0	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Tertatanya Kebersihan serta Keindahan Makam Taman Pahlawan Haur Duni (Ha)	223	324,000,000	DINSOS
						1 2	Transformasi pengadaan kearah digitalisasi	1 2	Menyusun rancangan Kebijakan daerah (Perda/Perbup/Ke pbup) tentang Bidang Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	1 1	Program pengelolaan arsip;	Terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan terpercaya melalui digitalisasi kearsipan (Persen)	90	848,000,000	DISARPUS
						1 3	Menyusun regulasi pengendalian pembangunan	1 3	Menyusun rancangan kebijakan hal pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan dan kebijakan pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan yang ditetapkan	1 2	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku (Persen)	90	212,000,000	DISARPUS
						1 4	Sosialisasi dan Bimbingan kepada Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan	1 4	Peningkatan sosialisasi tentang kebijakan daerah di bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar di bidang kesejahteraan rakyat	1 3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan Kinerja Anggota DPRD (Kegiatan)	6	24,458,285,000	SEKRETARIAT DPRD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				15 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan	15 Menyusun kebijakan UKPBJ melalui 4 (empat) domain yakni: domain proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi	14 Program pendaftaran penduduk		KK = 72.50 0 KTP= 80.00 0 KIA= 50 % Rekam KTP = 99.5 %	1,750,000,000	DISDUKCAPIL
				16 Sosialisasi, Koordinasi kepada Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD	16 Menyusun kebijakan daerah (Perda/Perbup/Ke pbup) terkait sistem pengendalian pembangunan	15 Program pencatatan sipil		23000	450,000,000	DISDUKCAPIL
				17 Koordinasi Pengendalian Inflasi	17 Menyusun regulasi pengendalian perekonomian (Perda/Perbup/Ke pbup) sistem pengendalian perekonomian	16 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan		95	600,000,000	DISDUKCAPIL
				18 Menyusun regulasi pengendalian perekonomian dan SDA	18 Identifikasi batas daerah			2	600,000,000	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2024	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						19	Menyusun kebijakan dan kesepakatan program dan kegiatan stabilisasi harga pokok (HLM)	19	Menyusun kesepakatan regulasi permendagri atas hasil dari identifikasi batas daerah	17	Program pengelolaan profil kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Kuningan (Dokumen)	1	200,000,000	DISDUKCAPIL
						20	Menyusun kebijakan peningkatan produksi dan ketersediaan bidang pertanian, perikanan dan peternakan	20	Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan pilar batas daerah	18	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan (Rata-Rata Persentase 32 Kecamatan) (Persen)	92,22	1,511,048,800	KECAMATAN
						21	Menyusun pemanfaatan lingkungan hidup, SDA untuk perkembangan pariwisata	21	Monitoring dan evaluasi hasil pembangunan pilar batas daerah	19	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	85	32,314,500,000	SETDA (TAPEM)
						22	Sinkronisasi perbatasan, pelacakan batas daerah	22	Pengelolaan sistem keuangan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	20	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase Pengelolaan dan Pengendalian Perekonomian serta Pembangunan melalui Kebijakan Pemerintah Daerah (Persen)	85	4,150,000,000	SETDA (BARJAS)

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2024	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						2 3	Menyusun kebijakan regulasi/kesepakatan bahan revisi peraturan menteri dalam negeri (revisi regulasi)	2 3	Meningkatkan kompetensi tentang SAKIP	2 1	Program pengelolaan perbatasan	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pengelolaan Perbatasan (Persen)	85	1,700,000,000	SETDA (TAPEM)
						2 4	Meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	2 4	Melakukan pendampingan dan desk konsultasi rentang SAKIP	2 2	Program pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	100	487,612,000,000	BPKAD
						2 5	Meningkatkan Nilai SAKIP	2 5	Melaksanakan revaluasi SAKIP Pemda dan evaluasi SAKIP perangkat daerah	2 3	Program pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100	3,575,000,000	BPKAD
						2 6	Penataan tupoksi organisasi	2 6	Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	2 4	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah (Persen)	95	24,545,000,000	BAPPENDA
						2 7	Komitmen pimpinan dan koordinasi perangkat daerah	2 7	Melaksanakan penyusunan tupoksi	2 5	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Persen)	60	11,025,000,000	INSPEKTORAT
						2 8	Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	2 8	Peningkatan koordinasi perangkat daerah bahan penyusunan komitmen pimpinan	2 6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	85	65,635,000,000	SETDA (ORGANISASI)
						2 9	Perbaikan penerapan organisasi	2 9	Pengembangan reformasi birokrasi	2 7	Program perumusan kebijakan,	Persentase Kebijakan yang	60	800,000,000	INSPEKTORAT

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				berbasis kinerja (Performance Based Organization)		pendampingan dan asistensi	diimplementasikan			
			30	Sosialisasi tupoksi	30	Peningkatan penerapan sistem AKIP	Persentase Tindak Lanjut Pendampingan Asistensi (Persen)	60	2,150,000,000	
			31	Standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi	31	Meningkatkan pemahaman tupoksi				
			32	Penyempurnaan Standar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Layanan kepada pimpinan	32	Menyediakan kelengkapan acara, kelancaran acara, kehadiran tamu undangan Daerah				
			33	Sosialisasi, Koordinasi, Peningkatan Kapasitas bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33	Memperlancar koordinasi layanan internal dan eksternal / lintas sektor				

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				3 4 Merumuskan dan menata jenjang kinerja Daerah (IKD) ke Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	3 4 Peningkatan kualitas pelayanan publik					
				3 5 Memperkuat pengendalian dari pimpinan secara berjenjang	3 5 Penyusunan kebijakan anggaran sesuai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)					
				3 6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan terhadap bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	3 6 Menyusun Indikator Kinerja Daerah (IKD) ke Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
				3 7 Penyempurnaan standar pelayanan internal Setda	3 7 Meningkatkan sistem pengendalian internal					
				3 8 Tersusunnya regulasi tentang tata kelola sarana dan prasarana Setda	3 8 Melaksanakan penyusunan SOP pelayanan					
				3 9 Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan jumlah SDM	3 9 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar					

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
				4 0	Pemerataan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	4 0	Meningkatkan kualitas tata kelola sarana dan prasarana Setda			
				4 1	Optimalisasi peran pengelola arsip	4 1	Penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan jumlah SDM lingkup Setda			
				4 2	Penyusunan regulasi yang mengatur secara rinci terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)	4 2	Penyusunan Kebijakan pemerataan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi			
				4 3	Meningkatkan Nilai SPIP	4 3	Menyusun petunjuk pelaksanaan pengelola Arsip			
				4 4	Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal	4 4	Peningkatan sosialisasi dan penyediaan sarana dan prasarana kantor Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)			
						4 5	Meningkatkan kompetensi tentang SPIP			
						4 6	Melakukan pendampingan dan desk konsultasi tentang SPIP dan manajemen risiko			

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
						47 Implementasi manajemen risiko					
						48 Melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP pada Pemda dan perangkat daerah					
						49 Menindaklanjuti hasil penilaian mandiri (AOI)					
	2 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	a	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada (Persen)	100	1 Meningkatkan kondusivitas dan pembinaan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	1 Memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya kewaspadaan daerah dan kemampuan deteksi dini masyarakat terhadap potensi konflik (Persen)	100	4,921,000,000	BAKESBANG POL
		b	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Persen)	75	2 Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan kebudayaan Kuningan dan Jawa Barat	2 Meningkatkan ketaatan warga masyarakat, aparatur, badan hukum terhadap perundang undangan daerah	2 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi (Rata-Rata 32 Kecamatan) (Persen)	88,09	852,386,000	KECAMATAN
		c	Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama) (Poin)	0,50		3 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara	3 Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Persen)	85	525,000,000	SATPOL PP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		d Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan (Budaya)	22		4	Membangun kembali gotong royong sebagai modal Sosial	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) (Persen)	90	2,368,800,000	
					5	Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan meningkatkan ruang dialog antar warga	Tingkat kapasitas aparaturnya SATPOLPP dan Damkar (Persen)	95	210,000,000	
					6	Memasyarakatkan seni budaya lokal	Persentase Penegakan Perda (Persen)	100	630,000,000	
					7	Mengenalkan seni budaya lokal di kalangan pelajar	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi negara serta menguatnya karakter kebangsaan masyarakat (Persen)	100	770,000,000	BAKESBANG POL
						5	Meningkatnya etika dan budaya politik di masyarakat serta menguatnya peran organisasi kemasyarakatan	100	110,000,000	BAKESBANG POL

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						6 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya	Meningkatnya etika dan budaya politik di masyarakat serta menguatnya peran organisasi kemasyarakatan (Persen)	100	2,582,684,775	BAKESBANG POL
							Meningkatnya rasa cinta tanah air dan toleransi serta ketahanan nasional di masyarakat (Persen)	100	735,000,000	
						7 Program pengembangan kebudayaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kegiatan)	4	2,405,000,000	DISDIKBUD
							Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah)	143	2,405,000,000	
							Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Unit)	2	2,405,000,000	
							Jumlah Pamong Budaya yang dibina (Orang)	7	2,600,000,000	
						8 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Pengunjung ke cagar budaya (Orang)	122204	650,000,000	DISDIKBUD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						9 Program pengelolaan permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman (Orang)	20	850,000,000	DISDIKBUD
						10 Program pengembangan kesenian tradisional	Seminar Budaya (Kali)	5	1,500,000,000	DISDIKBUD
						11 Program pembinaan sejarah	Penguatan fungsi dan makna gedung bersejarah (Kegiatan)	4	300,000,000	DISDIKBUD
							TOTAL ANGGARAN		729,370,476,175	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 3 (PPD3) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1 Meningkatnya investasi daerah	a Jumlah Nilai Investasi (Trilyun Rupiah)	1,75	1 Penyederhanaan birokrasi	1 Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan berbasis elektronik	1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Regulasi)	3	1,100,000,000	DPMPSTP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder					
		b	Jumlah produk izin (Produk Izin)	2500	2	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja	2	Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal	2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Data Potensi Investasi (objek Potensi)	2	750,000,000	DPMPTSP	
					3	Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal			3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Jenis)	4	1,300,000,000	DPMPTSP	
									4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian (Laporan)	2	900,000,000	DPMPTSP	
									5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Media informasi perizinan dan nonperizinan (Media)	2	375,000,000	DPMPTSP	
	2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	a	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	9,04-11,21	1	Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)	2	750,000,000	DISKOPDAGP ERIN
			b	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Persen)	50	2	Meningkatkan penyerapan/penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2	Peningkatan penyerapan/penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2	Program pengendalian izin usaha industri	Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Persen)	2,31	100,000,000	DISKOPDAGP ERIN

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder				
						bagi para pencari kerja								
		c	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)	62,57-65,03	3	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	3	Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja	3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Peningkatan jumlah pendataan SIINAS	50	150,000,000	DISKOPDAGERIN
		d	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat (Orang)	304	4	Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	4	Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja	4	Program penempatan tenaga kerja	Terlaksananya penempatan dan perluasan kesempatan kerja bagi para pencari kerja (Orang)	6000	1,100,000,000	DISNAKERTRANS
							5	Program perencanaan tenaga kerja		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang lebih baik (Dokumen)	1	100,000,000	DISNAKERTRANS	
							6	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Meningkatnya kualitas dan kuantitas keahlian pencari kerja untuk memasuki pasar kerja dan berwirausaha sesuai dengan	19 Paket / 304 Orang	1,850,000,000	DISNAKERTRANS	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder					
							kompetensinya (Paket/Orang)								
						7	Program hubungan industrial	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Perusahaan)	50	500,000,000	DISKOPDAGP ERIN				
	3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	a	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik (Persen)	64	1	Meningkatkan kuantitas kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	1	Peningkatan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi	1	Program pengelolaan sumberdaya air (SDA)	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen)	64	123,850,000,000	DPUTR
			b	Akses Pelayanan Air minum (Persen)	94,19	2	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sektor konstruksi dan kualitas pengendalian konstruksi	2	Pengembangan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Meningkatnya cakupan air bersih kepada masyarakat (Persen)	94,19	34,925,000,000	DPUTR
			c	Akses Sanitasi Layak (Persen)	96,33	3	Mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan	3	Pengembangan prasarana air limbah domestik	3	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Akses Sanitasi Layak (Persen)	96,33	7,400,000,000	DPUTR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder
		d Persentase Kemantapan jalan (Persen)	86,0	4 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	4 Pengembangan prasarana persampahan	4 Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah fasilitas pengurangan sampah (Unit)	4	2,250,000,000	DPUTR
		e Persentase keselamatan konstruksi (Persen)	100	5 Menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat	5 Peningkatan kualitas jaringan drainase	5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Berkurangnya kawasan genangan banjir di permukiman (Ha)	1611,75	9,605,000,000	DPUTR
		f Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (Persen)	60	6 Meningkatkan sarana dan prasarana, layanan serta edukasi	6 Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum dan sosial	6 Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan ber-PBG (Persen)	0,72	7,400,000,000	DPUTR
		g Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Persen)	53	7 Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam PPLH	7 Peningkatan kuantitas bangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum dan sosial	7 Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya (Persen)	50	23,250,000,000	DPUTR
		h Persentase orang yang menggunakan angkutan umum (Persen)	30	8 Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	8 Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat pusat perekonomian	8 Program penyelenggaraan jalan	Persentase Kemantapan jalan (Persen)	86,00	934,000,000,000	DPUTR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder			
		i	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani (Persen)	100		9	Peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	9	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase keselamatan konstruksi (Persen)	100	1,725,000,000	DPUTR
		j	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati) (Hektar)	2,00		10	Terselenggaranya pelatihan tenaga konstruksi	10	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (Persen)	60	1,600,000,000	DPUTR
		k	Persentase rumah layak huni (Persen)	97,55		11	Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah	11	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Persen)	53	8,837,650,000	DISHUB
		l	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani (Km)	50		12	Memperkuat pelayanan infrastruktur dasar di perumahan dan kawasan permukiman			Persentase orang yang menggunakan angkutan umum (Persen)	30	100,000,000	
		m	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi (Sertifikat)	40000		13	Penyelesaian masalah pertanahan	12	Program pengembangan perumahan	Terlaksananya Perbaikan rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU yang	100	6,400,000,000	DPKPP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder
							terdampak bencana (Unit)			
		n	58,2		14	Peningkatan kinerja penanganan dan pengurangan sampah	13	2	5,500,000,000	DPKPP
		o	6		15	Peningkatan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas lingkungan hidup	14	400	10,000,000,000	DPKPP
		p	65,98		16	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	15	50	30,350,000,000	DPKPP
		q	0,70		17	Peningkatan penanganan darurat bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar	16	3 Dokumen / 50000 M2	15,000,000,000	DPKPP
					18	Peningkatan Penanganan Pasca Bencana	17	1	250,000,000	DPKPP
							18	40000	300,000,000	DPKPP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder	
							masyarakat (Sertifikat)				
						19	Program survei pengukuran dan pemetaan	Tersusunnya dokumen peta lokasi tanah (Dokumen)	1	1,000,000,000	DPKPP
						20	Program pengelolaan sampah	Penanganan Sampah (Persen)	58,2	6,300,000,000	DLH
							Pengurangan Sampah (Persen)	6,0			
						21	Program perencanaan lingkungan hidup	Dokumen kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	5	850,000,000	DLH
						22	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (Poin)	50,10	950,000,000	DLH
								Indeks Kualitas Udara (IKU) (Poin)	84,50		
						23	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Poin)	59,00	3,150,000,000	DLH

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder
						2 4 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Jumlah Dokumen Pengendalian Bahan B3 dan Limbah B3 (Dokumen)	6	350,000,000	DLH
						2 5 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan (Persen)	20	375,000,000	DLH
						2 6 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Lembaga yang diberikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan (Lembaga)	4	350,000,000	DLH
						2 7 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan	4	300,000,000	DLH

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stake- holder
							yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga)			
						28 Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani (Persen)	100	225,000,000	DLH
						29 Program penanggulangan bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2	5,100,000,000	BPBD
						30 Program pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota (Persen)	14,7	472,500,000	BPBD
							TOTAL ANGGARAN		1,251,140,150,000	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 4 (PPD4) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	a PDRB sektor Pertanian (Persen)	7,93	1 Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis sektor pertanian agribisnis dan agroindustri	1 Peningkatan produktivitas komoditas pertanian	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tersedianya sarana pertanian (Unit)	12	18,300,000,000	DISKATAN
		b Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan (DTW)	3	2 Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sektor perikanan	2 Pengembangan budidaya untuk peningkatan produksi dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal		Meningkatnya populasi ternak besar dan ternak kecil (Ekor)	4678		
		c Kunjungan wisata (Orang)	3.793.809	3 Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan	3 Peningkatan pendapatan nelayan dari sumberdaya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan	2 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Persen)	7		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder				
		d	Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif (Orang)	50	4	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan	4	Membangkitkan industri/home industri perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri/home industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan pendapatan hasil perikanan	3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Meningkatnya tingkat produksi perikanan budidaya ikan kecil (Ton)	28500	3,705,000,000	DISKANAK
		e	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat (Orang)	50	5	Pengawasan sumberdaya perikanan yang terintegrasi	5	Pengelolaan wilayah perairan umum daratan, penguatan pengawasan sumberdaya perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait	4	Program pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya tingkat produksi perikanan tangkap (ton)	420	2,500,000,000	DISKANAK
					6	Mengembangkan pusat-pusat kawasan agribisnis dan agroindustri	6	Penyusunan kajian pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri	5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Ton)	250	1,850,000,000	DISKANAK
					7	Mengembangkan potensi wisata berkelanjutan	7	Penyiapan pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri	6	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (Ha)	200	1,150,000,000	DISKANAK

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder			
						berbasis aset dan potensi perdesaan							
				8	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	8	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata	7	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Tersedianya prasarana pertanian (Unit)	75	10,170,000,000	DISKATAN
				9	Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	9	Peningkatan sarana promosi dan event kepariwisataan	8	Program penyuluhan pertanian	Terlaksananya program penyuluhan pertanian (Kelompok)	2524	5,000,000,000	DISKATAN
				10	Mengembangkan pusat inkubasi ekonomi kreatif	10	Pendampingan pelaku ekonomi kreatif subsektor unggulan	9	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata (DTW)	3	8,000,000,000	DISPORAPAR
						11	Pengembangan pusat inkubasi ekonomi kreatif kabupaten	10	Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata (Orang)	3793809	4,200,000,000	DISPORAPAR
								11	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Orang)	50	825,000,000	DISPORAPAR

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						12 Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)	50	1,800,000,000	DISPORAPAR
							TOTAL ANGGARAN		58,800,000,000	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah 5 (PPD5) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	1 Menurunnya a Tingkat kemiskinan	a Persentase penduduk miskin (Persen)	11,12-12,72	1 Membangun pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis perdesaan	1 Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Program perlindungan dan jaminan sosial	Terdatanya Jumlah anak terlantar yang dilayani. Terdatanya Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pendataan DTKS & non - DTKS (Persen)	100	9,000,000,000	DINSOS
		b Jumlah Desa Rawan Pangan (Desa)	2	2 Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin	2 Pendampingan dan Fasilitasi PMKS dan PSKS	2 Program rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Soaial Dasar dan Bantuan Sosial Stimulan (Persen)	>90	380,000,000	DINSOS
		c Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	87,01		3 Pengembangan ekonomi keluarga miskin	3 Program pemberdayaan sosial	Jumlah PSM, Karang Taruna, TKS dan Orsos Tingkat Kab. Kuningan yang dibina (Orang)	150	1,105,000,000	DINSOS
						4 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan jumlah pasar yang direvitalisasi (unit)	1	3,350,000,000	DISKOPDA GPERIN

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						5 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Peningkatan Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah (Laporan)	5	1,000,000,000	DISKOPDA GPERIN
						6 Program penanganan kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan (Desa)	2	3,500,000,000	DISKATAN
						7 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi pangan (Paket)	10	6,075,000,000	DISKATAN
						8 Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Tersedianya sarana pendukung ketahanan pangan (Paket)	2	3,500,000,000	DISKATAN
						9 Program pengawasan keamanan pangan	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan (Paket)	5	700,000,000	DISKATAN
	2 Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	a Jumlah Desa berstatus Mandiri (Desa)	10	1 Memperkuat UMKM dan BUM Desa	1 Penguatan kelembagaan dan produksi UMKM	1 Program penataan desa	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa (Desa/Unit)	100 Desa / 500 Unit	5,675,000,000	DPMD
		b Jumlah Desa berstatus Maju (Desa)	15		2 Penguatan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama untuk memfasilitasi pemasaran UMKM	2 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Serta Bidang Lingkungan Hidup (Dokumen/Posyandu/LK Desa-Kel/Laporan/Unit)	15 Dokumen/ 1437 Posyandu/ 376 LK Desa-Kel/ 6 Laporan / 8 Unit	8,900,000,000	DPMD
		c Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan	220			3 Program peningkatan kerjasama desa	Pembangunan Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi (Dokumen)	23	1,000,000,000	DPMD

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
		difasilitasi (Unit Usaha)								
						4 Program administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen/Bumdes Berbadan Hukum/Orang/Laporan/Unit)	1 129 Dokumen / 7 Bumdes / 754 orang / 722 Laporan / 2 Desa	8,700,000,000	DPMD
						5 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Persen)	100	4,079,250,000	BAPPEDA
						6 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Rata-rata 32 Kec) (Persen)	81,59	12,624,160,440	KECAMATAN
							Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan (Rata-rata 32 Kec) (Persen)	84,31		
							Jumlah UMKM yang diberdayakan (UMKM)	32629		
							Jumlah KK Miskin (KK)	89778		
							Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan (Keluarga)	61784		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder	
							Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (Rata-rata 32 Kec) (Persen)	95,47			
							Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas (Orang)	4607			
						7	Program pengembangan ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor bersih perdagangan (US\$ (7 pelaku))	1.772.802	750,000,000	DISKOPDA GPERIN
						8	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif (Unit Usaha)	20	150,000,000	DISKOPDA GPERIN
						9	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat (Unit Usaha)	75	200,000,000	DISKOPDA GPERIN
						10	Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat (Unit Usaha)	75	150,000,000	DISKOPDA GPERIN
						11	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Peningkatan Jumlah Koperasi Binaan (Orang)	50	200,000,000	DISKOPDA GPERIN
						12	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Peningkatan Jumlah Koperasi Modern (Orang)	50	500,000,000	DISKOPDA GPERIN
						13	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan jumlah UKM Binaan (Unit Usaha)	100	8,200,000,000	DISKOPDA GPERIN
						14	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Peningkatan jumlah alat - alat ukur. timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang (Unit)	5000	100,000,000	DISKOPDA GPERIN

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
						1 5 Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)	50	450,000,000	DISKOPDA GPERIN
							TOTAL ANGGARAN		80,288,410,440	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023



Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2024, disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.11 Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

Prioritas Nasional RKP 2024		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2024		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2024 Kab. Kuningan		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN3, PN4 ; Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Prioritas Nasional : PN7; Prioritas Provinsi : PPP6
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Prioritas Nasional : PN5, PN6 ; Prioritas Provinsi : PPP4, PPP5
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN 1 ; Prioritas Provinsi : PPP1
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional : PN 2 ; Prioritas Provinsi : PPP4
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah			
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					

Keterkaitan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan pada RKPD Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

SASARAN RPJMN		SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT		SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S6	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya
		S7	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan		
		S12	Meningkatnya ketahanan pangan daerah		
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	S9	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	S7	Meningkatnya investasi daerah
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S8	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	S2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan
				S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya
S4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S6	Terkendalnya pertumbuhan penduduk
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar			S1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	S5	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
		S10	Terkendalnya tingkat kemiskinan		
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S11	Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	S4	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga
				S8	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

SASARAN RPJMN		SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT		SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN	
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S17	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	S12	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan				
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial				
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat				
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa				
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif				
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah				
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan				
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien				
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi				
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	S15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S13	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S23	Pembangunan Rendah Karbon				
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	S16	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik
		S17	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera		
		S18	Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel		
		S19	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas		
		S20	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan dengan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Jumlah Desa Rawan Pangan
Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat		Skor Pola Pangan Harapan
Pembangunan jaringan irigasi baru. Peningkatan persentase irigasi premium.	Indeks Penggunaan Air	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Jumlah Nilai Investasi
Kontribusi UMKM terhadap PDB	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Jumlah produk izin
Pertumbuhan PDB pertanian	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PDRB sektor Pertanian
Pertumbuhan PDB perikanan		
Kontribusi PDB pariwisata	Laju Pertumbuhan Pariwisata	Kunjungan wisata
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat
Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas		Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan
Nilai tambah ekonomi kreatif		Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	Jumlah Desa berstatus Mandiri
Perkembangan status pembangunan desa		Jumlah Desa berstatus Maju
Jumlah kawasan pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi
Persentase capaian penerapan SPM di daerah		Nilai LPPD Kabupaten di tingkat Provinsi/ Nasional
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)		
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya produk yang dihasilkan
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Persentase cakupan kepemilikan NIK. Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	Indeks Pelayanan Publik	Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akta Kelahiran 0 -18
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Angka kematian ibu	Laju Pertumbuhan Penduduk	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)
Angka kematian bayi		
Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>		
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)		<i>Unmet-need</i> (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)

INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)		ASFR (Angka Kelahiran Remaja)
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	Pengeluaran per kapita	Persentase penduduk miskin;
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	Persentase penduduk miskin	
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi		Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan		Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah lulusan pelatihan vokasi		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir		Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat
Indeks Capaian Revolusi Mental		Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila		Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan
Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)
Indeks Pembangunan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Laju Pertumbuhan Penduduk	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)
Indeks Pembangunan Keluarga	Persentase rumah tangga hunian layak	Persentase rumah layak huni
Median Usia Kawin Pertama Perempuan		Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)
Nilai Budaya Literasi		Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani
Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau		Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman		Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman		Akses Pelayanan Air minum
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		Akses Sanitasi Layak
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka		

INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024	
Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Akses penanganan sampah di perkotaan	Penanganan Sampah Pengurangan Sampah	
Panjang jalan baru yang terbangun	Tingkat Konektivitas	Persentase Kemantapan jalan	
Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota		Persentase keselamatan konstruksi	
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan		Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang		Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	
Rasio Elektrifikasi		Konsumsi listrik per kapita	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang
Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar			Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan ekosistem gambut (IKTL)
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			Indeks Risiko Bencana
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan ekosistem gambut (IKTL)	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	Indeks SPBE	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	
Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	Indeks Sistem Merit	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks Profesionalitas ASN	
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik*		Indeks Sistem Merit	
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori ≥ Baik	Nilai SAKIP	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:	Opini BPK	Level SPIP	
Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP		Opini Laporan Keuangan Daerah	
Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan	

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan	S12	S2.7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	S1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Jumlah Desa Rawan Pangan
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat							
		Pembangunan jaringan irigasi baru Peningkatan persentase irigasi premium	S14	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	Indeks Penggunaan Air	S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	S6	S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	S7	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah Nilai Investasi
		Kontribusi UMKM terhadap PDB				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan			
		Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	S9	S2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	PDRB sektor Pertanian
		Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit			
		Pertumbuhan PDB pertanian	S7	S2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	Kunjungan wisata
		Pertumbuhan PDB perikanan							
Kontribusi PDB pariwisata	S8	S2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan Pariwisata	S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata,	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifikat		
Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas									

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024	
		Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas					Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	
		Nilai tambah ekonomi kreatif						Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif	
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	S16	S4.1	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	S2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	Jumlah Desa berstatus Mandiri
		Perkembangan status pembangunan desa							Jumlah Desa berstatus Maju
		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan							Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)		S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana		Persentase ketersediaan dokumen tata ruang		
		Persentase capaian penerapan SPM di daerah		S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik		Nilai LPD Kabupaten di tingkat Provinsi/ Nasional		
		Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	S20	S4.5	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah	S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	S5	S1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	S6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
		Persentase cakupan kepemilikan NIK Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	S19	S4.4	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM	Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akta Kelahiran 0 -18

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
							birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik		
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	S2	S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
S6	Terpenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu	S5	S1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	S6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)
		Angka kematian bayi							MCP (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern <i>Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>							Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)							ASFR (Angka Kelahiran Remaja)
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)							
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas							S1
Harapan Lama Sekolah									
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	S4	S.1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	S5	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	S3	S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Pengeluaran per kapita	S1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin;
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	S10	S2.5	Terkendalinya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin			
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	S11	S2.6	Meningkatnya daya saing dan	Tingkat Pengangguran Terbuka	S4	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024	
		Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi			penempatan tenaga kerja		bidang pendidikan dan olahraga	dan organisasi sosial kemasyarakatan	
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan						Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi						Peningkatan Prestasi Olahraga	
		Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan					S8	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha							Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
									Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Indeks Capaian Revolusi Mental Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila					S12	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan						Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan	
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat						Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)	
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama						Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga Median Usia Kawin Pertama Perempuan	S5	S1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan	Laju Pertumbuhan Penduduk	S6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026	INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024		
	untuk memperkuat karakter bangsa				distribusi penduduk				
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi							
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	S14	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	Persentase rumah tangga hunian layak	S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	Persentase rumah layak huni
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman							Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman							Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman							Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani
		Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka							Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan							Akses Pelayanan Air minum
									Akses Sanitasi Layak
	Akses penanganan sampah di perkotaan								
	Tingkat Konektivitas	Penanganan Sampah							
		Pengurangan Sampah							
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	Panjang jalan baru yang terbangun						Persentase Kemantapan jalan	

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota							Persentase keselamatan konstruksi
		Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan							Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang							Persentase orang yang menggunakan angkutan umum
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Rasio Elektrifikasi				Konsumsi listrik per kapita			
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar							
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	S15	S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Indeks Kualitas Air (IKA)							
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)							
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan ekosistem gambut (IKTL)							
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	S13	S2.8	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
S23	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi				Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			

SASARAN RPJMN 2020-2024		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026			INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	SASARAN RPD KABUPATEN KUNINGAN 2024-2026		INDIKATOR SASARAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Indeks Demokrasi Indonesia	S16	S4.1	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	Indeks SPBE	S12	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik*							Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik	S17	S4.2	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit Indeks Profesionalitas ASN	S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik							S18
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip \geq B:	S19	S4.4	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP					Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Level SPIP
		Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan						
Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah									

Selain itu, dukungan program prioritas daerah lainnya yang mendukung program-program yang bersifat mandatori dari pusat sebagai bagian dari program strategis nasional yaitu proyek strategis yang menjadi amanat **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**, yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Program prioritas nasional yang sedang dan akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2026 di Kabupaten Kuningan adalah Proyek Strategis Nasional pada Sektor Bendungan dan Irigasi yaitu pembangunan Bendungan Kuningan serta Sektor Jalan Strategis yaitu pembangunan Jalan Lingkar Kuningan sepanjang 13,7 Km dan proyek strategis lainnya yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Gambar 4.9 Proyek Strategis Kawasan Rebana di Kabupaten Kuningan



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 ini juga perlu diperhatikan mandatory khusus lainnya yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Program Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Alokasi Anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD.
2. Program Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 10% dari total belanja APBD diluar belanja gaji.
3. Program Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa.

Dalam sektor pendidikan yang menjadi program yaitu ikut menyukseskan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan dalam sektor kesehatan yaitu ikut menyukseskan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional, seperti penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan Malaria (ATM) sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/479/2017 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia. Pada saat ini, Kabupaten Kuningan telah melakukan Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB), sedangkan untuk malaria hanya program pelayanan saja, karena Kabupaten Kuningan sudah eliminasi malaria (zero kasus).

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2024 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Program Pendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non- pertanian.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita per 1000.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Program Rehabilitasi Sosial
3.8 Pada tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Program Pembinaan Perpustakaan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Program Pengelolaan Pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anakanak dalam kondisi rentan.	Program Rehabilitasi Sosial
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kurikulum
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah		
<p>5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
	Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua		
	<p>6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p> <p>6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		Tujuan 7: Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	
<p>7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p> <p>7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> <p>7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>		Program Pengelolaan Energi Terbarukan Program Hubungan Industrial Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	
		<p>8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p>	Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Penilaian dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
<p>8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</p>	<p>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>Program Pengembangan Ekspor</p> <p>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>Program Pemasaran Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Program Pengembangan Kesenian Daerah</p> <p>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</p> <p>Program Pengelolaan Permuseuman</p> <p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
<p>Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi</p>	
<p>9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <p>9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p> <p>9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	<p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat</p> <p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Program Pengembangan Ekspor</p> <p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>
<p>Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara</p>	
<p>10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk</p>	<p>Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Program Kawasan Permukiman Program Penanggulangan Bencana
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program perencanaan lingkungan hidup Program Kesejahteraan Rakyat
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program penanganan bencana Program pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Perumahan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab	
12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) Program Perizinan Usaha Pertanian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Bencana

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Lingkungan hidup Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH)
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perekonomian dan Pembangunan
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Program Penataan Organisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penataan Organisasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Aspek III : Gender	
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Penataan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pembinaan Sejarah
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

4.2.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2022 di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 4.16 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
I	APBD KABUPATEN	15.037.540.000	12.319.406.028	81,92
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.510.000.000	6.683.500.478	78,53
	1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.000.000	94.134.950	94,13
	2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.110.000.000	2.521.435.850	81,08
	3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000	189.785.500	94,89
	4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.400.000.000	2.178.144.178	64,06
	5. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100
	6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750.000.000	750.000.000	100
	7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000	100.000.000	100,00
	8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.000.000	650.000.000	100
	9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100.000.000	100.000.000	100
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.325.000.000	2.127.147.500	91,49
	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.325.000.000	1.135.024.650	85,66
	2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	95.122.850	95,12
	3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100
	4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000	297.000.000	99,00
	5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000	100.000.000	100
	6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	300.000.000	100
	7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100
1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.777.540.000	1.233.813.050	69,41
	1. Pengadaan Perlengkapan PAUD	350.000.000	336.582.050	96,00
	2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	275.000.000	200.000.000	73,00
	3. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000	100.000.000	100
	4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	400.000.000	400.000.000	100
	5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	652.540.000	397.231.000	61,00
1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.875.000.000	1.725.000.000	92,00
	a. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	100

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
	b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	100
	c.			
	d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.675.000.000	1.525.000.000	91,00
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	550.000.000	549.945.000	99,99
2.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	550.000.000	549.945.000	99,99
	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	450.000.000	450.000.000	100,00
	2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	99.945.000	99,95
II	APBN	230.256.583.000	87.790.938.000	38,12
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116.670.542.000	20.381.294.000	17,46
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	20.381.294.000	20.381.294.000	100
	2. Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	96.289.248.000	-	0,00
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	77.847.789.000	31.738.117.000	40,76
	1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	31.738.117.000	31.738.117.000	100
	2. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	46.109.672.000	-	0,00
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini	25.497.852.000	25.453.627.000	99,82
	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4.441.502.000	4.441.502.000	100
	2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	21.056.350.000	21.012.125.000	99,78
1.3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	10.240.400.000	10.217.900.000	99,78
	1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10.240.400.000	10.217.900.000	99,78
III	BANTUAN PROVINSI	10.184.800.000	184.800.000	1,81
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.184.800.000	184.800.000	2,98
	1. Bantuan Guru Bantu SD/ MI Daerah Terpencil	184.800.000	184.800.000	100
	2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.000.000.000	-	0,00
1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini	4.000.000.000	-	0,00
	1. Pengadaan Perlengkapan PAUD	4.000.000.000	-	0,00
	JUMLAH I+II+III	255.478.923.000	100.295.144.028	39,25

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Tabel 4.17 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	DINAS KESEHATAN	240.710.855.026	181.816.274.117	75,53
A	NON URUSAN	240.710.855.026	181.816.274.117	75,53
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.190.657.087	81.432.901.944	99,08
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.000.000	98,57
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	69.000.000	98,57
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah	480.400.000	464.144.005	96,62
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.400.000	70.202.000	99,72
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	7.731.000	77,31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	87.106.316	87,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	49.940.000	99,88
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.164.689	99,44
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	76.642.683.487	76.298.660.298	99,55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.642.683.487	76.298.660.298	99,55
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000	46.000.000	100
	Pengadaan Mebel	46.000.000	46.000.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.541.573.600	4.439.434.789	97,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	131.788.789	69,36
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	21.775.000	87,10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.326.573.600	4.285.871.000	99,06
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	107.667.852	26,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	49.847.852	99,70
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.820.000	99,64
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	8.000.000	2,67
B	URUSAN	155.206.047.267	97.811.630.575	63,02
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	155.206.047.267	97.811.630.575	63,02

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	17.154.362.037	7.636.839.314	44,52
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	180.000.000	177.770.000	98,76
	- Studi Kelayakan (FS) Rumah Sakit Non Rujukan Cibingbin	80.000.000	79.164.000	98,96
	- Masterplan (MP) Rumah Sakit Non Rujukan Cibingbin	100.000.000	98.606.000	98,61
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.575.000.000	1.450.228.728	92,08
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Rehab Labkesda	1.575.000.000	1.450.228.728	92,08
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	387.500.000	206.975.000	53,41
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pusling Roda 2	175.000.000	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-telekonsultasi Sistem Informasi	212.500.000	206.975.000	97,40
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.311.090.417	1.071.362.520	24,85
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Set Pemeriksaan IVA Test	750.000.000	172.762.520	23,04
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penugasan-ALKES Labkesda	1.136.090.417	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penugasan-USG2D Digital	625.000.000	625.000.000	100
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penugasan-Set Laboratorium Puskesmas	1.800.000.000	273.600.000	15,20
	Pengadaan Obat, Vaksin	5.074.594.324	2.426.448.051	47,82
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 6.240.276.000	5.074.594.324	2.426.448.051	47,82
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.432.598.296	2.124.456.515	39,11
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK NF BOK KABUPATEN) (60%)	100.000.000	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Gula Darah	1.205.176.080	1.205.084.000	99,99
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Catridge TCM	2.652.250.000	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.165.681.676	919.372.515	78,87
	- Silpa DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian 2021	309.490.540	-	-
	Distribusi Alkes, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	193.579.000	179.598.500	92,78
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 75%	193.579.000	179.598.500	92,78
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.751.610.230	89.880.066.261	65,25
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.823.058.313	2.761.278.250	97,81

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	62.000.000	82,67
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DAK NF BOK PUSKESMAS)	2.748.058.313	2.699.278.250	98,22
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.226.390.000	774.655.000	63,17
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	53.500.000	71,33
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	471.970.000	62.500.000	13,24
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DAK NF BOK PUSKESMAS)	604.420.000	594.445.000	98,35
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 75%	75.000.000	64.210.000	85,61
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	946.462.426	887.813.000	93,80
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DAK NF BOK KABUPATEN)	75.000.000	51.324.000	68,43
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DAK NF BOK PUSKESMAS)	871.462.426	836.489.000	95,99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.630.019.847	2.526.337.050	96,06
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DAK NF BOK KABUPATEN)	75.000.000	61.950.000	82,60
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DAK NF BOK PUSKESMAS)	2.555.019.847	2.464.387.050	96,45
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	980.198.275	879.721.758	89,75
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	26.493.000	35,32
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DAK NF BOK PUSKESMAS)	905.198.275	853.228.758	94,26
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.485.143.223	1.373.903.223	92,51
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	35.145.000	46,86
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DAK NF BOK PUSKESMAS)	1.410.143.223	1.338.758.223	94,94
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.095.446.614	998.615.500	91,16
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	59.500.000	79,33
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DAK NF BOK PUSKESMAS)	1.020.446.614	939.115.500	92,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	309.900.000	279.500.000	90,19
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DAK NF BOK PUSKESMAS)	309.900.000	279.500.000	90,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	265.900.000	196.200.000	73,79
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DAK NF BOK PUSKESMAS)	265.900.000	196.200.000	73,79

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	457.625.000	407.895.000	89,13
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	42.170.000	56,23
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (DAK NF BOK PUSKESMAS)	382.625.000	365.725.000	95,58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB	625.375.000	591.770.000	94,63
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB (DAK NF BOK PUSKESMAS)	550.375.000	522.325.000	94,90
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga TBI (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	69.445.000	92,59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	642.470.892	621.808.175	96,78
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DAK NF BOK PUSKESMAS)	642.470.892	621.808.175	96,78
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.455.538.903	2.938.478.053	85,04
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	300.000.000	46.870.000	15,62
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 25%	289.102.500	212.822.500	73,61
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (DAK NF BOK PUSKESMAS)	2.866.436.403	2.678.785.553	93,45
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.439.892.000	1.923.452.000	22,79
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Stunting	648.235.000	327.910.000	50,59
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 75%	105.000.000	94.800.000	90,29
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Silpa 2020	4.000.000.000	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	1.686.657.000	1.500.742.000	88,98
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Silpa 2021	2.000.000.000	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	904.266.829	864.428.000	95,59
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK NF BOK KABUPATEN)	75.000.000	71.243.000	94,99
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK NF BOK PUSKESMAS)	829.266.829	793.185.000	95,65
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.749.494.682	1.660.326.000	94,90
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	75.000.000	75.000.000	100
	- Inspeksi Kesling, pemucuan STBM, perilaku kesehatan, Stop BAB Sembarangan (DAK NF BOK PUSKESMAS)	1.674.494.682	1.585.326.000	94,67
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.063.876.979	1.026.252.000	96,46
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK NF BOK PUSKESMAS)	1.063.876.979	1.026.252.000	96,46

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	75.000.000	75.000.000	100
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.027.797.013	788.490.317	76,72
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DAK NF BOK PUSKESMAS)	977.797.013	788.490.317	80,64
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DAK NF BOK KABUPATEN) 60%	50.000.000	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	50.000.000	32.600.000	65,20
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	267.809.408	248.637.500	92,84
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DAK NF BOK KABUPATEN)	40.000.000	32.190.000	80,48
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DAK NF BOK PUSKESMAS)	227.809.408	216.447.500	95,01
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	75.000.000	75.000.000	100
	- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (DAK NF BOK KABUPATEN)	75.000.000	75.000.000	100
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	75.000.000	69.040.000	92,05
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.676.294.356	8.197.319.560	94,48
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK NF BOK PUSKESMAS)	7.650.909.856	7.313.224.500	95,59
	- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK NF BOK KABUPATEN) 75%	475.384.500	368.224.500	77,46
	- Fogging	75.000.000	65.870.560	87,83
	- Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	400.000.000	400.000.000	100
	- Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS	25.000.000	25.000.000	100
	- Hibah Kepada Perhimpunan Orang Tua Penderita THALASEMIA Indonesia (POPTI)	50.000.000	25.000.000	50,00
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.578.787.742	16.434.613.890	38,60
	- Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pembiayaan untuk Pembayaran Iuran PBI Daerah Kabupaten Kuningan (BanProv Jabar)	15.422.400.000	4.246.943.400	27,54
	- Bansos JKN (pajak Rokok)	19.263.307.395	7.795.629.200	40,47
	- JAMKESDA	2.500.000.000	2.498.970.490	99,96
	- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (DBH CHT)	1.534.348.800	1.534.348.800	100
	- Pembayaran Hutang BPJS 4% Tahun 2020	3.500.000.000	-	-
	- Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Kuningan (Silpa DBHCHT)	358.731.547	358.722.000	100
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	40.000.000	-	-
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	2.960.000	1.700.000	57,43

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional (DAK NF BOK PUSKESMAS)	2.960.000	1.700.000	57,43
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	18.200.000	36,40
	Operasional Pelayanan Puskesmas	47.653.405.123	37.112.379.409	77,88
	- Kapitasi JKN pada FKTP (37Puskesmas) 43.270.708.704	40.381.742.439	35.768.799.409	88,58
	- Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK NF BOK PUSKESMAS)	3.559.669.658	1.323.580.000	37,18
	- Silpa JKN tahun 2021	3.711.993.026	-	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.729.055.300	3.904.497.576	68,15
	Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas, Lab. Kesda dan GudangFarmasi	1.246.548.000	856.348.451	68,70
	Dana Non Kapitasi Persalinan	4.482.507.300	3.048.149.125	68,00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	162.650.000	152.250.000	93,61
	- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DAK NF BOK PUSKESMAS)	162.650.000	152.250.000	93,61
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	114.570.000	100.055.000	87,33
	- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (DAK NF BOKPUSKESMAS)	114.570.000	100.055.000	87,33
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	2.022.222.305	1.907.850.000	94,34
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 75%	75.000.000	70.350.000	93,37
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	1.947.222.305	1.837.500.000	94,37
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	150.075.000	144.725.000	96,44
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	150.075.000	144.725.000	96,44
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	75.000.000	75.000.000	100
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	75.000.000	75.000.000	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.806.752.672	2.207.546.598	78,65
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.806.752.672	2.207.546.598	78,65
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.806.752.672	2.207.546.598	78,65
	- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	75.000.000	74.825.000	99,77

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	- Penyediaan Tenaga dengan perjanjian kerja (dak non fisik bok puskesmas)	2.731.752.672	2.132.721.598	78,07
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	125.000.000	101.500.000	81,20
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.000.000	62.750.000	83,67
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	75.000.000	62.750.000	83,67
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000	38.750.000	77,50
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000	38.750.000	77,50
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	382.398.000	262.695.000	68,70
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.923.000	101.250.000	47,78
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	211.923.000	101.250.000	47,78
	- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000	62.350.000	83,13
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten 75%	136.923.000	38.900.000	28,41
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	66.575.000	88,77
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	66.575.000	88,77
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.475.000	94.870.000	99,37
	Bimbingan Tekhnis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	95.475.000	94.870.000	99,37
	DAK Non Fisik BOK Puskesmas	95.475.000	94.870.000	99,37

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.18 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
APBD KAB/PROVINSI				
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.375.000.000	7.057.984.000	95,70%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
2	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000	99.459.000	99,46%
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	300.000.000	298.272.000	99,42%
	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih 3 titik	300.000.000		
	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih Galery Open Space Kertawangunan			
4	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih DLH			
	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	6.975.000.000	6.660.253.000	99,49%
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Bandorasa Wetan, Kec. Cilimus	100.000.000	99.485.000	99,49%
2	Pembangunan SPAM Jaringan Pipanisasi Desa Cimaranten Kec. Cipicung	100.000.000	99.083.000	99,08%
3	Pembangunan SPAM Jaringan Pipanisasi di Desa Ciangir, Kec. Cibingbin	100.000.000	98.841.000	98,84%
4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan dimata air Citangkurak, Desa Mandalajaya, kec. Maleber	150.000.000	148.810.000	99,21%
5	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jambugeulis Kec. Cigandamekar	150.000.000	148.856.000	99,24%
6	Pembuatan Sumur Artesis dusun salam Desa Sarewu Kec. Pancalangi	100.000.000	98.684.000	98,68%
7	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Karang Sari Kec. Darma	100.000.000	98.954.000	98,95%
8	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Blok Kakapa Desa Ciawilor Kec. Ciawigebang	100.000.000	98.464.000	98,46%
9	Pengadaan Pipanisasi 6 inci Desa Pasawahan Kec. Pasawahan	150.000.000	149.279.000	99,52%
10	Pengadaan Pipa DPUTR	200.000.000	198.792.000	99,40%
11	Pengembangan SPAM Perluasan SPAM Kawasan Perdesaan Tersebar di Kabupaten Kuningan (Bankeu Prov Jabar)	-		
	Desa Darma Kec. Darma	200.000.000	198.336.000	99,17%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Desa Sakertabarat Kec. Darma	200.000.000	196.725.000	98,36%
	Desa Karanganyar Kec.Darma	200.000.000	197.356.000	98,68%
	Desa Linggamekar Kec.Cilimus	200.000.000	199.071.000	99,54%
	Desa Sadamantra Kec.Jalaksana	200.000.000	196.339.000	98,17%
	Desa Linggasana Kec.Cilimus	200.000.000	199.227.000	99,61%
	Desa Ciwaru Kec.Ciwaru	200.000.000	199.737.000	99,87%
	Desa Cikondang Kec.Hantara	200.000.000	197.507.000	98,75%
	Desa Kaduella Kec.Pasawahan	200.000.000	199.344.000	99,67%
	Desa Bandorasawetan Kec. Cilimus	200.000.000	197.336.000	98,67%
	Desa Margacina Kec.Karangkencana	200.000.000	198.213.000	99,11%
	Desa Simpay Jaya Kec. Karangkencana	200.000.000	196.695.000	98,35%
	Desa Tajur Buntu Kec.Pancalang	200.000.000	199.722.000	99,86%
	Desa Rambatan Kec.Ciniru	200.000.000	197.650.000	98,83%
	Desa Cileuya Kec.Cimahi	200.000.000	199.320.000	99,66%
	Desa Windusari Kec.Nusaherang	200.000.000	195.480.000	97,74%
	Desa Cikadu Kec.Nusaherang	200.000.000	197.757.000	98,88%
	Desa Jambar Kec.Nusaherang	200.000.000	199.528.000	99,76%
	Desa Cikananga Kec.Garawangi	200.000.000	197.300.000	98,65%
	Desa Tembong Kec.Garawangi	200.000.000	196.169.000	98,08%
	Desa Rajawetan Kec.Pacalang	200.000.000	199.391.000	99,70%
	Desa Cipakem Kec.Maleber	200.000.000	197.975.000	98,99%
	Desa Puncak Kec. Cigugur	200.000.000	196.843.000	98,42%
	Desa Hantara Kec. Hantara	200.000.000	196.992.000	98,50%
	Desa Tarikolot Kec. Pancalang	200.000.000	199.181.000	99,59%
12	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ciketak Kec. Kadugede (Pendampingan PAMSIMAS)	425.000.000	173.575.000	40,84%
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ciketak Kec. Kadugede (Pendampingan PAMSIMAS)			
	- Pengadaan Pipa			
13	Pengadaan SR di 5 Desa PAMSIMAS	200.000.000	198.696.000	99,35%
14	Penyusunan Studi Kelayakan SPAM Perkotaan Kawasan Rebana	100.000.000	99.540.000	99,54%
	APBN / DAK			
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.040.000.000	7.699.129.000	96,64%
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler			
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Subang Kec. Subang	450.000.000	434.872.000	96,64%
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Citikur Kec. Ciwaru	450.000.000	423.910.000	94,20%
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Cipondok Kec. Cibingbin	450.000.000	436.095.000	96,91%
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Gewok Kec. Garawangi	450.000.000	434.633.000	96,59%
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Kertayasa Kec.Sindangagung	305.000.000	294.969.000	96,71%
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Kel.Citangtu Kec.Kuningan	450.000.000	429.661.000	95,48%
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Pengembangan Jaringan Distribusi	450.000.000	433.520.000	96,34%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	dan Sambungan Rumah (SR) Desa Maniskidul Kec.Jalaksana			
8	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Pembangunan Broncaptering / Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Desa Cilimusari Kec.Cilebak	475.000.000	449.357.000	94,60%
9	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Pembangunan Broncaptering / Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Desa Citundun Kec.Ciwaru	875.000.000	854.103.000	97,61%
10	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Pembangunan Broncaptering / Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Desa Mekarjaya Kec.Cimahi	475.000.000	458.570.000	96,54%
11	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Pembangunan Broncaptering / Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Desa Sindangbarang Kec.Jalaksana	450.000.000	434.627.000	96,58%
12	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Hantara Kec. Hantara	460.000.000	430.616.000	93,61%
13	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Jalatrang Kec.Cilebak	450.000.000	426.854.000	94,86%
14	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Kaduagung Kec.Karangkencana	475.000.000	435.695.000	91,73%
15	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Sukarapih Kec.Cibeureum	475.000.000	459.698.000	96,78%
16	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Kertaungaran Kec.Sindangagung	450.000.000	428.472.000	95,22%
17	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) / Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Paniis Kec.Pasawahan	450.000.000	433.477.000	96,33%
	HIBAH AIR MINUM PERDESAAN (HAMP)			
6	Pemasangan Perpipaan Sambungan Rumah (SR) Air Bersih Perdesaan	2.750.000.000	2.738.046.000	99,57%
	Desa Kawah Manuk Kec.Darma	200.000.000	199.516.000	99,76%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Desa Kalimanggis Wetan Kec. Kalimanggis	150.000.000	149.232.000	99,49%
	Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis	120.000.000	119.543.000	99,62%
	Desa PakembanganKec. Mandirancan	184.000.000	183.593.000	99,78%
	Desa Haurkuning Kec. Nusaherang	200.000.000	199.086.000	99,54%
	Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan	200.000.000	199.527.000	99,76%
	Desa Bagawat Kec. Selajambe	200.000.000	198.922.000	99,46%
	Desa Giriwaringin Kec. Maleber	196.000.000	195.000.000	99,49%
	Desa Jamberama Kec. Selajambe	200.000.000	198.864.000	99,43%
	Desa Selajambe Kec. Selajambe	180.000.000	178.962.000	99,42%
	Desa Dukuhlor Kec. Sindangagung	180.000.000	179.048.000	99,47%
	Desa Mancagar Kec. Garawangi	196.000.000	195.137.000	99,56%
	Desa Sidangjawa Kec. Kadugede	194.000.000	193.020.000	99,49%
	Pengadaan Pipa dan SR Desa BakomKec. Darma	100.000.000	99.596.000	99,60%
	Pengadaan Pipa dan SR Desa Sumberjaya Kec. Cimahi	200.000.000	199.000.000	99,50%
7	Dana Penunjang Hibah Air Minum Perdesaan	50.000.000	50.000.000	100%
	APBD KAB/PROVINSI			
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.500.000.000	8.489.502.000	99,88 %
1	Pembangunan Tangki Septik Individual Kab. Kuningan / 19 Kecamatan (Bankeu Prov Jabar)			
	Kecamatan Kadugede			
-	Desa Bayuning Kec.Kadugede	196.000.000,00	195.864.000	99,93%
-	Desa Kadugede Kec.Kadugede	196.000.000,00	195.904.000	99,95%
-	Desa Cipondok Kec.Kadugede	196.000.000,00	195.876.000	99,94%
-	Desa Windujanten Kec.Kadugede	196.000.000,00	195.580.000	99,79%
	Kecamatan Kramatmulya	-		
-	Desa Cibentang Kec.Kramatmulya	105.000.000,00	104.842.000	99,85%
-	Desa Gandasoli Kec.Kramatmulya	196.000.000,00	195.862.000	99,93%
	Kecamatan Selajambe	-		
-	Desa Padahurip Kec.Selajambe	196.000.000,00	195.530.000	99,76%
-	Desa Kutawaringin Kec.Selajambe	196.000.000,00	195.931.000	99,96%
	Kecamatan Luragung	-		
-	Desa Benda Kec.Luragung	105.000.000,00	104.728.000	99,74%
-	Desa Cirahayu Kec.Luragung	196.000.000,00	195.667.000	99,83%
-	Desa Dukuh Picung Kec.Luragung	196.000.000,00	195.884.000	99,94%
	Kecamatan Ciawigebang	-		
-	Desa Ciawigebang Kec.Ciawigebang	196.000.000,00	195.907.000	99,95%
-	Desa Mekarjaya Kec.Ciawigebang	196.000.000,00	195.783.000	99,89%
-	Desa Geresik Kec.Ciawigebang	196.000.000,00	195.880.000	99,94%
	Kecamatan Garawangi	-		
-	Desa Kutakembaran Kec. Garawangi	196.000.000,00	195.906.000	99,95%
-	Desa Gewok Kec.Garawangi	196.000.000,00	195.792.000	99,89%
	Kecamatan Kuningan	-		
-	Kelurahan Cijoho Kec. Kuningan	196.000.000,00	195.898.000	99,95%
-	Desa Cibuang Kec. Kuningan	196.000.000,00	195.787.000	99,89%
-	Desa Ancaran Kec. Kuningan	196.000.000,00	195.787.000	99,89%
	Kecamatan Hantara	-		
-	Desa Pakapasangirang Kec.Hantara	196.000.000,00	195.479.000	99,73%
-	Desa Tundagan Kec. Hantara	135.000.000,00	134.673.000	99,76%
	Kecamatan Ciwaru	-		
-	Desa Karangbaru Kec.Ciwaru	196.000.000,00	195.797.000	99,90%
-	Desa Garajati Kec.Ciwaru	196.000.000,00	195.592.000	99,79%
	Kecamatan Subang	-		
-	Desa Subang Kec.Subang	196.000.000,00	195.865.000	99,93%
-	Desa Tangkolo Kec.Subang	196.000.000,00	195.876.000	99,94%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kecamatan Pancalang	-		
-	Desa Silebu Kec.Pancalang	196.000.000,00	195.623.000	99,81%
-	Desa Mekarjaya Kec.Pancalang	196.000.000,00	195.551.000	99,77%
-	Desa Pancalang Kec.Pancalang	105.000.000,00	104.646.000	99,66%
	Kecamatan Karangkencana	-		
-	Desa Kaduagung Kec.Karangkencana	196.000.000,00	195.900.000	99,95%
-	Desa Jabranti Kec.Karangkencana	196.000.000,00	195.861.000	99,93%
	Kecamatan Ciniru	-		
-	Desa Rambatan Kec.Ciniru	196.000.000,00	195.852.000	99,92%
-	Desa Longkewang Kec.Ciniru	105.000.000,00	104.830.000	99,84%
	Kecamatan Cigugur	-		
-	Kel.Sukamulya Kec.Cigugur	196.000.000,00	195.753.000	99,87%
-	Kel.Cigadung Kec.Cigugur	196.000.000,00	195.897.000	99,95%
	Kecamatan Pasawahan	-		
-	Desa Kaduella Kec.Pasawahan	196.000.000,00	195.852.000	99,92%
-	Desa Ciwiru Kec.Pasawahan	196.000.000,00	195.888.000	99,94%
	Kecamatan Cidahu	-		
-	Desa Jatimulya Kec.Cidahu	196.000.000,00	195.408.000	99,70%
-	Desa Cihideung Hilir Kec.Cidahu	196.000.000,00	195.647.000	99,82%
-	Desa Datar Kec.Cidahu	105.000.000,00	104.789.000	99,80%
	Kecamatan Sindangagung	-		
-	Desa Kaduagung Kec.Sindangagung	196.000.000,00	195.598.000	99,79%
-	Desa Sindangsari Kec.Sindangagung	196.000.000,00	195.774.000	99,88%
	Kecamatan Darma	-		
-	Desa Tugumulya Kec.Darma	196.000.000,00	195.842.000	99,92%
-	Desa Situsari Kec.Darma	196.000.000,00	195.898.000	99,95%
	Kecamatan Cimahi	-		
-	Desa Margamukti Kec.Cimahi	196.000.000,00	195.668.000	99,83%
-	Desa Cimulya Kec.Cimahi	196.000.000,00	195.642.000	99,82%
-	Desa Cileuya Kec.Cimahi	196.000.000,00	195.893.000	99,95%
	APBN / DAK			
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.366.000.000	3.366.000.000	100%
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler			
	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Bungurberes Kec.Cilebak	380.000.000	380.000.000	100%
	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Andamui Kec. Ciwaru	380.000.000	380.000.000	100%
3	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) - Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa Cipakem Kec. Maleber	380.000.000	380.000.000	100%
4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD- S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Sindangjawa Kec.Kadugede	357.000.000	357.000.000	100%
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Cimahi Kec. Cimahi	378.000.000	378.000.000	100%
6	Pembangunan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Setempat	378.000.000	378.000.000	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	(SPALD-S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Wanasaraya Kec. Kalimanggis			
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Taraju Kec. Sindangagung	378.000.000	378.000.000	100%
8	Pembangunan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Babakanmulya Kec. Cigugur	378.000.000	378.000.000	100%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK - Desa Timbang Kec. Cigandamekar	357.000.000	357.000.000	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN

Tabel 4.19 Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	933.000.000	833.000.000	89,28
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	2 Identifikasi Lahan-lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	-	-
	3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-
	4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	-
	5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
	6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Kota	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	-
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penganian Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	-	-	-
4	Pembentukan dan Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	-	-
5	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Layanan	-	-	-
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	933.000.000	833.000.000	89,28
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	933.000.000	83.000.000	89,28
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-
5	Pembangunan rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
3	Kegiatan Lainnya	-	-	-

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel 4.20 Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANSTIBUM)		250.000.000	250.000.000	100%
	Kegiatan :				
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	100.000.000	100%
	Subkegiatan :				
	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kasus	-	-	-
	2 Penindakan atas gangguan etentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa	Kasus	100,000,000	100,000,000	100%
	3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan msyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-
	4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	-	-	-
	5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang	-	-	-
	6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	-	-	-
	7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	-	-	-
	8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Dokumen	-	-	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
	9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan			
	Kegiatan :				
	2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		150.000.000	150.000.000	100%
	Subkegiatan :				
	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Laporan	-	-	-
	2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Laporan	-	-	-
	3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Laporan	150,000,000	150,000,000	100%
B	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.		403.500.000	403.500.000	100%
	Kegiatan :				
	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		403.500.000	403.500.000	100%
	Subkegiatan :				
	1 Pencegahan kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	130.000.000	130.000.000	100%
	2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	143.500.000	143.500.000	100%
	3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	130.000.000	130.000.000	100%
	JUMLAH		653.500.000	653.500.000	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Tabel 4.21 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	PAGU	REALISASI	%
-----	------------------------	------	-----------	---

KEGIATAN				
URUSAN SOSIAL				
1	Rehabilitasi Sosial	505.000.000	503.734.000	99,75
1.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	505.000.000	503.734.000	99,75
	1 Penyediaan Permakanan	125.000.000	125.000.000	100
	2 Penyediaan Sandang	-	-	-
	3 Penyediaan Alat Bantu	100.000.000	98.734.000	98,73
	4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50.000.000	50.000.000	100
	5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	50.000.000	50.000.000	100
	6 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100
	7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000	30.000.000	100
	8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	-
	9 Pemberian layanan data dan pengaduan	-	-	-
	10 Pemberian layanan kedaruratan	50.000.000	50.000.000	100
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-
	12 Pemberian layanan rujukan	50.000.000	50.000.000	100
2	Penanganan Bencana	250.000.000	249.369.000	99,75
2.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	250.000.000	249.369.000	99,75
	1 Penyediaan Makanan	150.000.000	149.617.000	99,74
	2 Penyediaan Sandang	100.000.000	99.752.000	99,75
JUMLAH		755.000.000	753.103.000	99,75

Sumber : Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2023 di Kabupaten Kuningan

4.2.7 Inovasi Daerah

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis, Kabupaten Kuningan mengembangkan program kegiatan inovatif untuk mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik ditengah terbatasnya kapasitas rill keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan holistik dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-stakeholderdan multi-SKPD berdasarkan tematik fokus pembangunan daerah.

Berikut merupakan rincian implementasi kegiatan inovasi SKPD yang telah berjalan:

Tabel 4.22 Inovasi Daerah Kabupaten Kuningan

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
1	SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	merupakan kategori inovasi di Bidang Tata kelola Pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Kuningan.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Untuk memberikan kemudahan dan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan digital,	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus bolak balik datang ke kantor.	0	2021
2	SIKUDA CEPAT (Siap Kunjungi Datangi Cetak Di Tempat)	sarana informasi atau edukasi administrasi kependudukan langsung kepada masyarakat di lokasi tertentu. Peningkatan semua jenis layanan adminduk yang bisa cetak di tempat dan menggunakan TTE	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan pelayanan adminduk agar bisa berjalan lebih efektif, tepat sasaran, terkoordinasikan dengan stakeholders terkait.	Lebih mendekatkan pelayanan sehingga bisa mempermudah dan mempercepat semua jenis pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.	0	2021
3	PUSAKA U-17 (Pelayanan Untuk Sasaran Kelompok)	kesadaran masyarakat berusia 17 tahun untuk memiliki dokumen kependudukan (KTP) oleh karenanya sebagai wujud dukungan pada GISA Disdukcapil Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Untuk memberikan pelayanan prima dan mempermudah serta mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan sasaran untuk masyarakat	Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti berupa identitas	0	2022

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
4	Pemula Usia 17 Tahun PTSP Saba Desa	Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa barat inovasi pelayanan perizinan yang dilatarbelakangi oleh rendahnya jumlah penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian		yang berusia 17 tahun dengan setatus pelajar langsung mendapatkan KTP el. Meningkatkan investasi ke kabupaten Kuningan/	Meningkatnya kemudahan pengurusan legalitas usaha; 2. Meningkatnya penyebaran informasi terkait pelayanan perizinan/	100.000.000	2020
5	PATURAI (Pelayanan Administrasi Kependuduk	dukungan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA) yang telah dicanangkan oleh Kemendagri dan sebagai upaya	Administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kesadaran dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan terutama kepada masyarakat yang	Memudahkan dan mempercepat proses perubahan status perkawinan pada KK dan KTP bagi	0	2021

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
6	an Usai Penceraian) PANUTAN (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan)	untuk peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA pelayanan untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan semua Rumah Sakit, UPTD Puskesmas PONED melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Klinik berizin, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Kuningan mencanangkan Program PANUTAN	Administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	sudah menerima akta cerai. § Untuk memberikan pelayanan prima dengan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan sasaran untuk masyarakat setelah melahirkan (langsung mendapat Akta Kelahiran, KK dan KIA).	masyarakat setelah menerima akta cerai Perubahan data kependudukan akan diproses lebih cepat dan mudah sehingga data lebih akurat dan up to date (penambahan anggota keluarga).	0	2021

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
7	PASTI (Pelayanan Adminduk Setelah kematian)	pelayanan untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan 32 Kecamatan se-Kab. Kuningan dan Pengurus KORPRI Kab. Kuningan	Administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Untuk memberikan pelayanan prima dengan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan sasaran masyarakat yang anggota kelyarganya meninggal dunia langsung mendapatkan akta kematian, KK dan KTP dengan status terbaru.	Perubahan data kependudukan akan diproses lebih cepat dan mudah sehingga data lebih akurat dan up to date (pengurangan anggota keluarga dan status perkawinan)	0	2022
8	PADUKA (Pelayanan ADminduk Usai perKawinan)	pelayanan untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan	Administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Untuk memberikan pelayanan prima dengan mempermudah dan mempercepat proses perubahan data pada dokumen kependudukan dengan sasaran untuk masyarakat setelah	Memudahkan KUA dalam proses verifikasi dan validasi data Pasangan Calon Pengantin.	0	2021

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
9	KIAT SUKSES (Kartu Identitas Anak Terpadu Bagi Siswa Untuk Kelangsungan Sekolah)	Pelayanan untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan, khususnya cakupan kepemilikan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang membawahi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	melaksanakan perkawinan (langsung mendapat Buku Nikah, KTP-el dan KK). Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak berdomisili di suatu tempat .	Efisiensi waktu bagi masyarakat dalam mengurus kepemilikan KIA bagi anaknya	0	2021
10	Kuningan Sinergi Integrasi Pelayanan Publik	Pelayanan jemput bola terpadu dimana beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama sama memberikan pelayanan ke masyarakat desa	pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup,	Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kuningan.	Adanya kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat dimana masyarakat dapat mengurus	100.000.000	2023

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
	(Kuningan SIPP)	dan atau kecamatan sehingga masyarakat bisa menyelesaikan semua urusan dalam satu tempat.	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, perpustakaan, kearsipan			beberapa jenis layanan di satu tempat tanpa harus mendatangi setiap kantor penyedia layanan dan Waktu pengurusan pelayanan menjadi lebih singkat dan terjangkau.		
11	WA IMAS dan WA SURIP (WhatsApp Informasi Masyarakat dan WhatsApp Saran,	Pelayanan masyarakat melalui saluran atau media untuk melakukan konsultasi dan memberikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif seperti media social WhatsApp (WA) sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan	Administrasi Kependudukan an Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik	Untuk memberikan informasi secara interaktif kepada masyarakat Kabupaten Kuningan sebagai sasaran program terkait mekanisme dan atatacara semua jenis pelayanan serta program-	Media atau saluran bagi masyarakat yang interaktif untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan	0	2021

No	Inovasi	Deskripsi Inovasi	Urusan Inovasi	Bentuk Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi	Anggaran (Rp)	Tahun Implementasi
	Usulan Kritik dan Pengaduan)	Adminduk bagi Disdukcapil Kabupaten Kuningan.			program inovasi pelayanan administrasi kependudukan.	pelayanan Adminduk		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan 2024-2026 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2022 dan turut mengakomodir kepentingan masyarakat yang telah dibahas dan disepakati oleh para *stakeholders* dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Kuningan untuk tahun perencanaan 2024.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial dalam mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJPD dan RPD Kabupaten.

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 telah mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kolaborasi berbagai sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2024

Program perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2024.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2024

URAIAN	RENCANA TAHUN 2024
BELANJA DAERAH	2,694,348,692,377
1 Belanja Operasi	2,068,348,692,377
a. Belanja Pegawai	1,309,565,997,232
b. Belanja Barang dan Jasa	758,032,695,145
c. Belanja Bunga	-
d. Belanja Hibah	500,000,000
e. Belanja Bantuan Sosial	250,000,000
2 Belanja Modal	144.000.000.000
a. Belanja Tanah	
b. Belanja Peralatan dan Mesin	
c. Belanja Bangunan dan Gedung	
d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	
e. Belanja Aset Tetap lainnya	
3 Belanja Tidak Terduga	500,000,000
a. Belanja Tidak Terduga	500,000,000
4 Belanja Transfer	481,500,000,000
a. Belanja Bagi Hasil	18.500.000.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	463.000.000.000

Pada Tabel 5.1 disampaikan total belanja daerah Kabupaten Kuningan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yaitu

Rp.2.694.348.692.377,- yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

URAIAN	RENCANA TAHUN 2024
PENDAPATAN DAERAH	2,694,348,692,377
1. Pendapatan Asli Daerah	396,217,458,296
a Pajak Daerah	124,580,000,000
b Retribusi Daerah	71,545,809,499
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,004,650,000
d Lain-lain PAD Yang Sah	192,086,998,797
2. Pendapatan Transfer	2,290,131,234,081
a Transfer Pemerintah Pusat	2,137,968,827,064
b Transfer Antar-Daerah	152,162,407,017
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.000.000.000
a Hibah	8.000.000.000
b Dana Darurat	-
c Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-

Pada Tabel 5.2 disampaikan mengenai rekapitulasi estimasi pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2024. Total estimasi pendapatan Kabupaten Kuningan yaitu sebesar Rp.2.694.348.692.377,- yang bersumber sdari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang lain yang sah.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Kuningan Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.614.348.907.597
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	949.696.926.597
	Pengelolaan Pendidikan	643.601.981.000
	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.250.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
	Pengembangan Kebudayaan	2.700.000.000
	Pengembangan Kesenian Tradisional	9.500.000.000
	Pembinaan Sejarah	600.000.000
	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.500.000.000
	Pengelolaan Permuseuman	1.500.000.000
2	DINAS KESEHATAN	301.951.333.716
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	110.999.948.560
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.411.350.385
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	475.000.000
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	150.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	300.000.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Mandirancan)	1.851.838.738
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Mandirancan)	8.371.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Windusengkahan)	1.209.061.161
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Windusengkahan)	113.003.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cilebak)	1.128.015.930

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cilebak)	14.993.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Japara)	1.680.367.785
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Japara)	54.202.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Pancalang)	2.146.360.989
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Pancalang)	22.000.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Ciniru)	1.528.231.400
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Ciniru)	34.980.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Selajambe)	1.880.554.259
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Selajambe)	12.012.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Darma)	4.185.150.164
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Darma)	34.374.021
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Hantara)	1.599.622.716
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Hantara)	33.797.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Nusaherang)	1.610.106.775
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Nusaherang)	17.864.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Garawangi)	2.798.007.793
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Garawangi)	4.823.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Kramatmulya)	2.468.542.829
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Kramatmulya)	30.387.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Luragung)	3.115.096.960
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Luragung)	11.550.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cimahi)	2.156.311.222
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cimahi)	29.040.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cilimus)	2.902.362.129
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cilimus)	57.271.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cibeureum)	1.802.588.583
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cibeureum)	14.184.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Kuningan)	2.484.083.095
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Kuningan)	-
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cipicung)	1.884.252.988
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cipicung)	30.827.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Lamepayung)	1.830.532.365
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Lamepayung)	16.335.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Sindangagung)	2.175.462.487

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Sindangagung)	10.114.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Mekarwangi)	1.704.341.530
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Mekarwangi)	36.888.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Pasawahan)	1.836.409.715
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Pasawahan)	32.554.500
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Ciwaru)	2.147.748.247
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Ciwaru)	12.210.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cihaur)	1.665.490.596
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cihaur)	16.500.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Ciawigebang)	3.619.418.783
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Ciawigebang)	31.449.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Linggajati)	1.193.476.621
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Linggajati)	19.140.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Jalaksana)	2.394.641.644
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Jalaksana)	15.774.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Kalimanggis)	2.078.649.920
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Kalimanggis)	26.009.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Kadugede)	1.910.518.634
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Kadugede)	6.776.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cidahu)	3.688.244.459
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cidahu)	5.280.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Maleber)	2.917.360.571
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Maleber)	-
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Subang)	1.288.509.355
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Subang)	28.930.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Sukamulya)	3.295.895.604
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Sukamulya)	27.082.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Karangkencana)	1.752.823.343
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Karangkencana)	3.846.090
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cibingbin)	3.568.228.856
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cibingbin)	50.468.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Manggari)	1.829.759.307
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Manggari)	11.352.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UPTD PKM Cigandamekar)	2.387.826.607

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (UPTD PKM Cigandamekar)	24.750.000
3	RSUD'45	266.073.491.950
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	116.073.491.950
4	RSUD LINGGARJATI	100.716.883.733
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.915.841.000
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85.501.042.733
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	300.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	671.941.146.094
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.603.260.400
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	71.000.000.000
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	34.920.000.000
	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.900.000.000
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	44.900.000.000
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	11.000.000.000
	Penataan Bangunan Gedung	2.000.000.000
	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	73.500.000.000
	Penyelenggaraan Jalan	404.117.885.694
	Pengembangan Jasa Kontruksi	500.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	295.678.065.950
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.836.825.950
	Pengembangan Perumahan	45.600.000.000
	Kawasan Permukiman	32.051.240.000
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.000.000.000
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	184.990.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	
	Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	15.000.000.000
	Pengelolaan Tanah Kosong	250.000.000
	Penatagunaan Tanah	300.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.417.684.050
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.712.484.050
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.350.000.000
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.355.200.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.274.094.170
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.349.094.170
	Penanggulangan Bencana	10.925.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
9	DINAS SOSIAL	13.289.207.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.439.207.000
	Pemberdayaan Sosial	1.450.000.000
	Rehabilitasi Sosial	1.750.000.000
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.250.000.000
	Penanganan Bencana	1.150.000.000
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	23.901.729.550
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.799.261.650
	Perencanaan Tenaga Kerja	200.000.000
	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.202.467.900
	Penempatan Tenaga Kerja	2.750.000.000
	Hubungan Industrial	750.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.000.000
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	45.929.361.050
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.218.361.050
	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	330.000.000
	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.996.000.000
	Penanganan Kerawanan Pangan	550.000.000
	Pengawasan Keamanan Pangan	35.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.800.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.000.000.000
	Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	125.275.497.364
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.005.000.000
	Perencanaan Lingkungan Hidup	850.000.000
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.881.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.750.000.000
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	350.000.000
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	375.000.000
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	350.000.000
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.000.000
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	225.000.000
	Pengelolaan Persampahan	93.189.497.364
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.237.561.565
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.120.938.050
	Pendaftaran Penduduk	7.351.623.515
	Pencatatan Sipil	475.000.000
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.140.000.000
	Pengelolaan Profil Kependudukan	150.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.152.231.570

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.939.281.570
	Penataan Desa	150.000.000
	Peningkatan Kerja Sama Desa	150.000.000
	Administrasi Pemerintahan Desa	5.925.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.987.950.000
		32.075.978.515
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.200.000.000
	Program Perlindungan Perempuan	361.351.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	700.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100.000.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	500.000.000
	Program Perlindungan Khusus Anak	827.749.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.670.178.515
	Program Pengendalian Penduduk	1.450.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.400.000.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.816.700.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	71.000.390.921
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.833.225.627

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	53.167.165.294
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.679.758.280
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.629.758.280
	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	975.000.000
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.650.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	
	Penyelenggaraan Statistik Sektor	200.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.000.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	67.480.878.270
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.980.878.270
	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	500.000.000
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	500.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	500.000.000
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	500.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	650.000.000
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	15.000.000.000
	Pengembangan UMKM	19.000.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.000.000.000
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.000.000.000
	Pengembangan Ekspor	750.000.000
	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	500.000.000
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	600.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.000.000.000
	Pengendalian Izin Usaha Industri	500.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	500.000.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.295.405.474
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.870.405.474
	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.600.000.000
	Promosi Penanaman Modal	750.000.000
	Pelayanan Penanaman Modal	2.800.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	900.000.000
	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	375.000.000
20	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	92.565.004.495
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.519.523.880
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34.618.906.200
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	46.076.574.415
	Pemasaran Pariwisata	1.000.000.000
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	250.000.000
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.000.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11.178.521.130
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.533.521.130
	Pembinaan Perpustakaan	3.385.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	
	Pengelolaan Arsip	950.000.000
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	310.000.000
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	17.362.423.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.162.423.000
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	750.000.000
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.900.000.000
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	400.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.100.000.000
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	400.000.000
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	650.000.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	69.942.663.576
	Sekretariat Daerah	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.692.663.576
	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	21.250.000.000
	Perekonomian dan Pembangunan	3.000.000.000
24	SEKRETARIAT DPRD	83.060.783.025
	Sekretariat DPRD	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.372.394.025
	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.688.389.000
25	BAPPEDA	16.292.307.260
	Perencanaan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.991.217.500

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.221.839.760
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.079.250.000
	Penelitian dan Pengembangan	
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.000.000.000
26	BAPPENDA	21.199.783.104
	Keuangan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.704.783.104
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.495.000.000
27	BPKAD	493.978.321.150
	Keuangan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.150.939.226
	Pengelolaan Keuangan Daerah	483.052.381.924
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.775.000.000
28	BKPSDM	14.722.839.971
	Kepegawaian	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.962.839.971
	Kepegawaian Daerah	4.360.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.400.000.000
29	INSPEKTORAT	21.482.893.400
	Inspektorat Daerah	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.956.393.400
	Penyelenggaraan Pengawasan	5.176.500.000
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.350.000.000
30	KESBANGPOL	16.037.881.225
	Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.199.985.975

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	700.000.000
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.997.895.250
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	300.000.000
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.840.000.000
31	KECAMATAN CILIMUS	2.592.522.822
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.251.522.822
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	118.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.000.000
32	KECAMATAN CIWARU	2.217.426.660
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.040.926.660
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.500.000
33	KECAMATAN DARMA	2.518.144.980
	Kecamatan	

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.298.144.980
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000
34	KECAMATAN GARAWANGI	2.507.843.290
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.331.093.290
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92.750.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.000.000
35	KECAMATAN JALAKSANA	2.557.290.100
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.354.324.366
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.965.734
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000
36	KECAMATAN KADUGEDE	2.370.703.350

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.135.703.350
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000
37	KECAMATAN KARANGKANCANA	2.163.802.250
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.868.802.250
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	115.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000
38	KECAMATAN KRAMATMULYA	2.429.578.880
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.203.578.880
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
39	KECAMATAN KUNINGAN	15.543.960.065
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.592.960.065
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.690.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	148.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.000.000
40	KECAMATAN LEBAKWANGI	2.490.622.590
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.300.622.590
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65.000.000
41	KECAMATAN LURAGUNG	2.634.203.210
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.410.855.210
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	36.199.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.627.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.319.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.036.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.167.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
42	KECAMATAN MALEBER	2.367.152.250
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.010.152.250
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120.000.000
43	KECAMATAN MANDIRANCAN	2.452.592.710
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.308.389.210
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.800.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.549.500
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.854.000
44	KECAMATAN PANCALANG	2.317.481.650
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.840.421.770
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	123.100.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	67.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	142.959.880

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.000.000
45	KECAMATAN SINDANGAGUNG	2.220.357.000
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.075.357.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000
46	KECAMATAN CIBEUREUM	1.923.713.450
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.750.363.450
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.350.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	22.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	64.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.000.000
47	KECAMATAN CIGUGUR	9.340.264.800
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.989.764.800
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	73.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.108.500.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000
48	KECAMATAN CILEBAK	1.921.920.470
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.732.945.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	52.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.975.470
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000
49	KECAMATAN CIMAHI	1.810.153.150
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.590.153.150
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
50	KECAMATAN CINIRU	2.156.999.580
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.883.805.580
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.121.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.280.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.608.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.310.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.875.000
51	KECAMATAN CIPICUNG	2.324.262.060
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.139.262.060
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000
52	KECAMATAN HANTARA	2.423.900.900
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.209.400.900
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	77.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000
53	KECAMATAN JAPARA	2.144.780.100
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.914.780.100
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000
54	KECAMATAN KALIMANGGIS	2.554.650.400
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.274.650.400
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.000.000
55	KECAMATAN NUSAHERANG	2.799.901.700
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.544.901.700
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000
56	KECAMATAN PASAWAHAN	1.899.661.170
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.699.661.170

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
57	KECAMATAN SELAJAMBE	2.181.694.670
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.003.694.670
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000
58	KECAMATAN SUBANG	2.064.635.840
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.874.635.840
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.500.000
59	KECAMATAN CIAWIGEBANG	2.599.337.004
	Kecamatan	

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.479.337.004
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0
60	KECAMATAN CIBINGBIN	2.577.626.010
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.383.049.010
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.922.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.699.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.426.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.300.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.230.000
61	KECAMATAN CIDAHU	2.077.177.810
	Kecamatan	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.782.177.810
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.000.000
62	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	2.367.564.200

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Kecamatan		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.222.491.063
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.000.000
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36.765.737
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.307.400

Tabel 5.3 merupakan rencana belanja sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pada RKPD Tahun 2024. Total estimasi rencana belanja program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 4.679.094.953.276.-

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
I SPM Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	100%	Dinas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini
SPM Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar	Usia Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif,	Usia Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;	Usia Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i>	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
		yang mendapatkan layanan kesehatan			Tuberkulosis (TB)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
SPM Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	PUTR	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	PUTR	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
SPM Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	DPKPP	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi	100%	DPKPP	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
	huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.			layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
	SPM Trantibumlinmas				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	POLPP	Program Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	BPBD	Kabupaten Kuningan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
SPM Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang memperoleh	100%	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
	bencana bagi korban bencana kabupaten.	perlindungan dan jaminan social			tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2023

Sinergitas usulan rencana kegiatan bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah terdiri dari berbagai sumber pendanaan. Berikut ini merupakan dana Transfer ke Daerah (TKD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal APBN. Kebijakan terkait TKD diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). TKD terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
5. Dana Keistimewaan
6. Dana Desa

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atas kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah
- b. DAK non-fisik, yang digunakan untuk mendukung

operasionalisasi layanan publik Daerah

- c. Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan rencana usulan DAK Tahun 2024 yang di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Tabel 5.5 Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		TOTAL USULAN	NILAI USULAN Rp (Ribu)	PELAKSANA
Reguler				
1	Pendidikan	13	200.000.000	Disdikbud/Arpus
2	Kesehatan	5	125.000.000	Dinkes/RSUD Linggajati
3	Sanitasi	47	22.300.000	DPUTR
4	Air Minum	29	15.000.000	DPUTR
5	Jalan	34	200.000.000	DPUTR
Total			562.300.000	
Penugasan				
1	Jalan	4	12.000.000	DPUTR
2	Irigasi	8	24.000.000	DKPP
3	Pariwisata	1	7.000.000	Disporapar
4	Kelautan dan Perikanan	3	3.500.0000	Diskanak
Total			78.000.000	

Berikut ini merupakan sinergi program yang dapat menunjang Prioritas Pembangunan Nasional.

Tabel 5.6 Sinergitas Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Program	Pagu Indikatif
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPD4 Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	39	147.412.574.415

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah		Jumlah Program	Pagu Indikatif
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	4	8.451.089.760
		PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	4	419.667.885.694
		PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	41	28.523.923.900
		PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	2	200.000.000
PN3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	86	1.073.396.807.039
		PPD2	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1	3.385.000.000
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	14	42.155.800.000
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	14	565.028.405.294
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	10	116.195.497.364

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah		Jumlah Program	Pagu Indikatif
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	9	25.558.073.765
		PPD2	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	206	2.230.786.007.995
		PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	5	18.333.888.050
TOTAL				435	4.679.094.953.276

5.4 Usulan Rencana Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi dan prioritas provinsi, percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, program-program strategis Provinsi Jawa Barat dan kebijakan kewilayahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan Bantuan Keuangan dan Hibah kepada kabupaten dan kota dengan skema reguler dan skema pendanaan kompetitif.

Tabel 5.7 Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Reguler Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Urusan	Usulan	Jumlah Kegiatan
1	Pendidikan	224.516.981.000	19
2	Kesehatan	219.497.896.023	6

No.	Urusan	Usulan	Jumlah Kegiatan
3	Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	504.232.464.494	214
4	Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	267.451.240.000	32
5	Kebudayaan	500.000.000	1
6	Kebencanaan	6.925.000.000	3
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.406.010.000	1
8	Lingkungan Hidup	100.060.000.000	7
9	Pariwisata	46.500.000.000	14
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.787.950.000	3
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000	1
12	Sosial	1.878.200.000	1
13	Kepemudaan dan Olahraga	32.568.906.200	1
14	Penanaman Modal	2.500.000.000	1
15	Perdagangan	40.400.000.000	2
16	UMKM	10.000.000.000	1
17	Perhubungan	49.995.000.000	3
18	Perpustakaan	2.000.000.000	1
19	Tenaga Kerja	10.025.417.900	3
	Total	1.528.445.065.617	314

Sumber : Data Rekap Usulan Bankeu 2024

Tabel di atas merupakan rekapitulasi usulan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan skema pendanaan reguler yang telah diinput pada SIPD sebanyak 314 usulan kegiatan pada 19 urusan pemerintah dengan total usulan pendanaan sebesar Rp 1.528.445.065.617,-.

Tabel 5.8 Usulan Rencana Kegiatan Bantuan Keuangan Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Urusan	Usulan	Jumlah Kegiatan
1	Kesehatan	7.400.000.000	1
2	Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000	1
3	Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000.000	1
4	Tenaga Kerja	2.000.000.000	1
5	Kebencanaan	1.950.000.000	1
Total		26.850.000.000	5

Sumber : Data Rekap Usulan Bankeu 2024

Selain Bantuan Keuangan Reguler yang diusulkan ke Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan mengusulkan kegiatan melalui skema Bantuan Keuangan Kompetitif terdiri 5 usulan kegiatan dengan total usulan sebesar Rp 26.850.000.000,-.

Tabel 5.9 Sinergitas Program Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Program	Pagu Indikatif
PPP1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	PPD4 Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	69	130.084.030.415
PPP2 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	PPD1 Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	14	712.208.782.450
	PPD2 Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	3.385.000.000
	PPD4 Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	4	14.902.467.900

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah		Jumlah Program	Pagu Indikatif
		PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	2	200.000.000
PPP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	81	392.825.919.839
PPP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	9	22.355.800.000
		PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	8	22.411.030.515
		PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1	10.925.000.000
		PPD4	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	7	30.950.000.000
PPP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	650.000.000
		PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	27	1.089.966.788.352
PPP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	5	13.720.178.515
		PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	201	2.216.176.067.240
		PPD4	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	5	18.333.888.050
TOTAL				435	4.679.094.953.276

5.5 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Program pembangunan daerah Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.10 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah		Jumlah Program	Pagu Indikatif
PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	109	1.141.110.680.804
PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	211	2.242.622.097.755
PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	28	1.100.891.788.352
PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	62	130.196.436.365
PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	25	64.273.950.000
TOTAL		435	4.679.094.953.276

Rekapitulasi rencana kegiatan tahun 2024 berdasarkan perangkat daerah pelaksana disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Total Program	Total Kegiatan Belanja	Pagu Indikatif SKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	95	1.614.348.907.597
2	DINAS KESEHATAN	79	799	301.951.333.716
3	RSUD'45	2	5	266.073.491.950
4	RSUD LINGGARJATI	3	29	100.716.883.733
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	11	63	671.941.146.094
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	43	295.678.065.950
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	36	24.417.684.050
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	46	14.274.094.170
9	DINAS SOSIAL	7	51	13.289.207.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	38	23.901.729.550
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8	37	45.929.361.050
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	60	125.275.497.364
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	40	16.237.561.565
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	36	17.152.231.570
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	58	32.075.978.515
16	DINAS PERHUBUNGAN	2	45	71.000.390.921
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	47	10.679.758.280
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16	42	67.480.878.270
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	35	14.295.405.474

No	Perangkat Daerah	Total Program	Total Kegiatan Belanja	Pagu Indikatif SKPD
20	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	8	51	92.565.004.495
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4	36	11.178.521.130
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	7	41	17.362.423.000
23	SEKRETARIAT DAERAH	3	73	69.942.663.576
24	SEKRETARIAT DPRD	2	34	83.060.783.025
25	BAPPEDA	4	66	16.292.307.260
26	BAPPENDA	2	37	21.199.783.104
27	BPKAD	3	43	493.978.321.150
28	BKPSDM	3	48	14.722.839.971
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	20	16.037.881.225
30	INSPEKTORAT	3	33	21.482.893.400
31	KECAMATAN CILIMUS	6	27	2.592.522.822
32	KECAMATAN CIWARU	6	22	2.217.426.660
33	KECAMATAN DARMA	6	26	2.518.144.980
34	KECAMATAN GARAWANGI	6	22	2.507.843.290
35	KECAMATAN JALAKSANA	6	21	2.557.290.100
36	KECAMATAN KADUGEDE	6	22	2.370.703.350
37	KECAMATAN KARANGKANCANA	6	24	2.163.802.250
38	KECAMATAN KRAMATMULYA	6	21	2.429.578.880
39	KECAMATAN KUNINGAN	6	31	15.543.960.065
40	KECAMATAN LEBAKWANGI	6	23	2.490.622.590
41	KECAMATAN LURAGUNG	6	19	2.634.203.210
42	KECAMATAN MALEBER	6	20	2.367.152.250
43	KECAMATAN MANDIRANCAN	6	20	2.452.592.710
44	KECAMATAN PANCALANG	6	23	2.317.481.650
45	KECAMATAN SINDANGAGUNG	6	19	2.220.357.000
46	KECAMATAN CIBEUREUM	6	21	1.923.713.450
47	KECAMATAN CIGUGUR	6	32	9.340.264.800
48	KECAMATAN CILEBAK	6	24	1.921.920.470
49	KECAMATAN CIMAHI	6	22	1.810.153.150
50	KECAMATAN CINIRU	6	18	2.156.999.580
51	KECAMATAN CIPICUNG	6	19	2.324.262.060
52	KECAMATAN HANTARA	6	22	2.423.900.900
53	KECAMATAN JAPARA	6	21	2.144.780.100

No	Perangkat Daerah	Total Program	Total Kegiatan Belanja	Pagu Indikatif SKPD
54	KECAMATAN KALIMANGGIS	6	22	2.554.650.400
55	KECAMATAN NUSAHERANG	6	23	2.799.901.700
56	KECAMATAN PASAWAHAN	6	20	1.899.661.170
57	KECAMATAN SELAJAMBE	6	21	2.181.694.670
58	KECAMATAN SUBANG	6	21	2.064.635.840
59	KECAMATAN CIAWIGEBANG	6	20	2.599.337.004
60	KECAMATAN CIBINGBIN	6	24	2.577.626.010
61	KECAMATAN CIDAHU	6	24	2.077.177.810
62	KECAMATAN CIGANDAMEKAR	6	21	2.367.564.200
Total		435	2802	4.679.094.953.276

Tabel 5.11 diatas merinci rekap pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dengan total pagu sebesar Rp. 4.679.094.953.276.

Tabel 5.12 Proporsi Anggaran Berdasarkan Isu Tematik

No.	ISU	Anggaran	Persentase
1.	Penanganan Kemiskinan	279,098,138,515	9.30%
	Penanggulangan Kemiskinan Desil 1 (Bantuan/Charity (Penanggulangan Kemiskinan))	103,851,240,000	3.46%
	Penanggulangan Kemiskinan Desil 2 (Bantuan Stimulan Pemberdayaan dan Pelatihan Angkatan Kerja), (Penanggulan Pengangguran dan Pemulihan Ekonomi)	152,935,898,515	5.10%
	Penanggulangan Kemiskinan Desil 3 (Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan sarana prasarana Pertanian), (Peningkatan Daya Beli)	22,311,000,000	0.74%
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1,081,083,152,983	36.02%
	Peningkatan Kesetaraan SDM (PUG)	22,740,500,000	0.76%
	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	393,690,671,983	13.12%
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	664,651,981,000	22.15%
3.	Pembangunan	1,038,709,316,822	34.61%
	Pembangunan Fisik (Infrastruktur)	1,007,065,548,352	33.56%
	Pembangunan Non Fisik (Agamis)	14,415,268,470	0.48%

No.	ISU	Anggaran	Persentase
	Pembangunan Reformasi Birokrasi (Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur)	5,810,000,000	0.19%
	Pembangunan Akuntabilitas (APIP)	11,418,500,000	0.38%
4	Pelayanan Pemerintahan	602,037,866,296	20.06%
	Total	3,000,928,474,616	100.00%

Dalam dokumen RKPD Tahun 2024 dibuat skema pembobotan pendanaan program dan kegiatan untuk penanganan 11(sebelas) isu pokok pembangunan yang secara umum bisa dikelompokkan untuk menjawab tiga permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kuningan serta alokasi pelayanan umum pemerintahan, yaitu:

1. Kelompok penanganan kemiskinan dengan proporsi sementara sebesar 9,3 % yang didalamnya dijabarkan dalam kegiatan:
 - a. Penanggulangan Kemiskinan Desil 1 yaitu untuk penanggulangan kemiskinan sebesar 3,46%,
 - b. Penanganan kemiskinan desil 2 yaitu untuk penanggulangan pengangguran dan pemulihan ekonomi sebesar 5,10%,
 - c. Penanganan kemiskinan desil 3 yaitu untuk Peningkatan Daya Beli sebesar 0,74%.
2. Kelompok Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan proporsi anggaran sebesar 36,03%, ini ditujukan untuk isu Peningkatan Kualitas Pendidikan (22,15%), Peningkatan Kualitas Kesehatan (13,12%) dan Pengarusutamaan Gender (0,76%);
3. Kelompok pembangunan fisik dan non fisik dengan proporsi sementara sebesar 34,61% untuk isu Infrastruktur (33,56%), Agamis (0,48%), Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (0,19%), Pengawasan Internal Pemerintah (0,38%); dan
4. Disamping ketiga kelompok besar diatas terdapat alokasi anggaran untuk pelayanan umum pemerintahan sebesar

20,06%, sehingga keseluruhan pengalokasian berdasarkan isu strategis menjadi 100%.

Sebelas isu pokok diatas merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang pada akhirnya mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan adalah dalam rangka menyelesaikan isu utama pembangunan, yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pj. Bupati (kepala daerah) yang ditetapkan menjadi indikator makro, indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Berdasarkan indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, maka indikator kinerja penyelenggaraan pada pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Penyedia Data
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Poin	5,53	5,81 %	BPS
2	Tingkat Penangguran Terbuka (%)	Persen	9,81	9,04 %	BPS
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	12,76	11,70	BPS
4	Ketimpangan Gini Ratio	Poin	0,354	0,336	BPS

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024	Penyedia Data
5	PDRB perKapita ADHK (juta rupiah)	Juta Rupiah	24,68	18,90	BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	70,16	71,09	BPS

Sumber: BPS Kab. Kuningan, 2022

Tabel 6.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022/2021*	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah	S1 Menurunnya Tingkat kemiskinan	1. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	Poin	0,7446	0,7640	DPMD/BPS
		S2 Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	2. Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	BPS
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif	S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat S4 Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga S5 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) S6 Terkendalinya pertumbuhan penduduk	3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,16	71,28	BPS

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022/2021*	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	S7 Meningkatnya investasi daerah S8 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja S9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	4. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,02	1,30-1,44	BAPPEDA
			5. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	BPBD
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	S10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	BPS
T5	Meningkatkan Tatakelola	S11 Meningkatnya Integritas, Kapasitas,	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Level/ Skor	CC	CC	Bag. Org / BKPSDM

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Tahun 2022/2021*	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik S12 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	8. Opini Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	BPKAD
			9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85	85,70	BAPPEDA
			10. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74,75	SATPOL-PP/BPBD

Sumber: RPD Kab. Kuningan Tahun 2024-2026

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
1	2	3	4	5	6
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,53	-1,11 – 6,04	BPS
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. (juta)	18.450.340	18.615.813 – 20.580.520	BPS
3	Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	BPS
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	11,12-12,72	BPS
6	Garis Kemiskinan	Rp	371.665	374.473 – 414.273	BPS
8	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (PPMI)/Miskin Ekstrim	persen	10,83	9,02	Dinsos
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	persen	2,14	1,09 – 2,52	BPS
10	IPM :	Poin	70,16	70,86-71,40	BPS
	- Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	BPS
	- Indeks Kesehatan	Persen	83,12	83,78-84,24	BPS
	- Indeks Pengeluaran	Poin	68,95	69,72-70,24	BPS
11	Angka Harapan Lama sekolah / EYS	Tahun	12,24	12,68	Disdikbud
12	Indeks Harapan Lama sekolah	Poin	68	70,47	Disdikbud
13	Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS	Tahun	7,88	8	Disdikbud
14	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	52,53	53,32	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
15	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	74,03	74,60	BPS
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	55	65	Dinkes
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	61,80	62,57-65,03	BPS / Bappeda
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	BPS / Bappeda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12,93	15,49	Bappenda
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,89	1,75 – 1,92	BPS/Bappeda
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32**	1,28	BPS / Bappeda
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	BPS / Bappeda
23	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	24,68	25,22	BPS / Bappeda
24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	9.620	9.933	BPS / Bappeda
25	Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	86,07	86,5	Disnakertrans
26	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	542.782	552.782	Disnakertrans
27	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	6	10	Diskatan
28	Angka Kematian Bayi (/ 1000)	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	Dinkes
28	Angka Kematian Ibu (/100.000)	Kasus	24	23	Dinkes
29	Persentase Stunting pada balita (SSGI)	Persen	19,4	16	Dinkes
30	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	Dinkes
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,17	87,02	BPS
32	Presentase desa/kelurahan dengan stop buang air	Persen	66,49	80	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	besar sembarangan/ODF				
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.211.684*	1.195.965-1.580.871	BPS/Bappeda
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,29	104,91	DKPP (tasik)
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (cek data)	Persen	44,79*	28,40-62,57	BPS/Bappeda
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,7446	0,7640	DPMD
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,70	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	85,70	Bappeda
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).	Persen	40	50	DKUKMPERINDA G
13	Nilai SAKIP	level / skor	B	B	Bag. Org / Inspektorat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	level / skor	CC	CC	Bag. Org /

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
					BKPSDM
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	Satpol PP, BPBD
16	Opini BPK	Kategori / Opini	WTP	WTP	BPKAD
17	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Skor	3,02	1,30 – 1,44	Bappeda
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Layanan Urusan Wajib Dasar				
	PENDIDIKAN :				Disdikbud
1	APK PAUD usia 5-6 tahun	Persen	93,58	93,98	
2	Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	910	920	
3	Jumlah PAUD Holistik integratif	Lembaga	100	150	
4	APK SD/Paket A	Persen	100,01	100,02	
5	APM SD/Paket A	Persen	99,90	99,91	
6	APK SMP/Paket B	Persen	99,35	99,52	
7	APM SMP/Paket B	Persen	93,25	93,65	
8	Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	Lembaga	50	55	
9	Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	Persen	95,15	95,40	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,81	1,9	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,7	1,8	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,84	1,9	
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,73	1,8	
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi Minimal B	Persen	36,06	36,7	
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	97,56	97,60	
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	84,82	85,10	
17	Guru PAUD professional	Persen	23,37	23,50	
18	Guru Profesional SD	Persen	59,08	59,30	
19	Guru Profesional SMP	Persen	58,98	59,25	
20	Presentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	
21	Presentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	
22	Persentase Guru Layak PAUD	Persen	74,08	74,28	
23	Persentase Guru Layak SD	Persen	95,56	95,76	
24	Persentase Guru Layak SMP	Persen	98,92	98,96	
25	Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	73,69	73,94	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
26	Rasio Kelas Layak SD	Persen	85,66	86,26	
27	Rasio Kelas Layak SMP	Persen	97,95	97,99	
	KESEHATAN :				Dinkes
1	Prevalensi Wasting pada Balita (e-PPBGM)	Persen	6,5	6	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kasus	24	23	
4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56	56	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,16	98	
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94,59	95	
8	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin/ 100.000 Penduduk	4,5	4,5	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua kasus	Persen	88	95	
10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54	40	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,1	0,1	
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	Dinkes
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90	95	
15	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,3	97	
16	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	53,4	100	
17	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	
18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,41	100	
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	
20	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	
21	Jumlah PBI BPJS/KIS	Orang	619.894	1.114.110	
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	
23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi keluarga	Persen	99,12	100	
24	Persentase puskesmas yang melakukan tata kelola masyarakat dengan indikator kinerja baik	Persen	13,51	25	
25	Persentase puskesmas yang melaksanakan program	Persen	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	kesehatan tradisional				
26	Persentase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat	Persen	100	100	
27	Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak terencana	Persen	0	40	
28	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	8,16	9,96	
29	Proporsi kusta baru tanpa cacat	Persen	67,3	70	
30	<i>Release From Treatment</i> (RFT) rate kusta PB dan MB	Persen	91	92	
31	Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV	Persen	95	95	
32	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,1	0,1	
33	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	Persen	92	92	
34	Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidence/API)	API per 1000 penduduk	0,0000009	<1	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	49%	60%	RSUD 45
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal	hari	4 hari	6 hari	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	di rumah sakit / Length of stay (LOS)				
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	4 hari	3 hari	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	per 1000	54 per 1000	40 per 1000	
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	per 1000	29 per 1000	24 per 1000	
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	52 kali	50 kali	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	76.95	78	
8	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	67,67	68,77	RSUD Linggarjati
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal	hari	3,67	4	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	di rumah sakit / Length of stay (LOS)				
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	2,29	2,59	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	persen	32,53	32	
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	persen	18,05	17,5	
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	51,45	51,3	RSUD Linggarjati
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	73,3	75	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :				DPUTR
1	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	
2	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,10	94,19	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
3	Akses Sanitasi Layak	Persen	93,65	96,33	
4	Persentase Kemantapan jalan	Persen	80,69	86	
5	Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	
6	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :					
1	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	DPKPP
2	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Ha	54,35	2	
3	Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	
4	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :					
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	N/A	90	Satpol PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	84	85	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	95	Satpol PP
4	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan	Persen	95	95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Damkar				
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	65	88	
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	
					BPBD
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	90.98	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	92.02	100	
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	30	10	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	92	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	81	75	
	SOSIAL :				Dinsos
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24.09	30	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan	Persen	70.40	75	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota				
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
	TENAGA KERJA :				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	Disnakertrans
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	50	50	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :				
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	DPPKBP3A
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	80	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	80	
4	Rasio KDRT	Persen	0,0001	0,0001	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per- 100.000 penduduk perempuan)	per-100.000	8	8	
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja Langsung APBD	persen	55	8	
7	Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina	persen	0,626	0,645	
PANGAN :					
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	93,20	87,01	Diskatan
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	68	2	
PERTANAHAN :					
1	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	40.000	40.000	DPKPP
LINGKUNGAN HIDUP :					
1	Penanganan Sampah	Ton	107.441	103,946	DLH
		Persen	61,09	58,2	
2	Pengurangan Sampah	Ton	11.200	10.716	
		Persen	22	6	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	65,98	
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	51,11	50,10	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	86,96	84,50	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	57,05	59,00	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :				
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	100	83	Disdukcapil
2	Cakupan Kepemilikan KTP eL	Persen	99,4	98,5	
3	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	43,46	35	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	94,21	89	
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	24	39	
8	Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persen	100	100	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :				
	Indeks Desa Membangun (IDM)				DPMD
1	Desa Status : Mandiri	Desa	183	10	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
2	Desa Status : Maju	Desa	62	15	
	- Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	48	60	
	- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum	Unit	53	7	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :				DPPKBP3A
1	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	persen	67,24	67,24	
2	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	point	52,73	52,73	
3	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	persen	20,86	20,76	
4	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	kelahiran	17,1	17	
5	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	tahun	20	20	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak	2,30	2,30	
	PERHUBUNGAN :				Dishub
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	49	53	
2	Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12*	30	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:				Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD)	Persen	100	100	Diskominfo
2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,162	8	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	
4	Indeks SPBE	Point	2,88	3	
5	Pengentasan Desa Blank Spot	Desa	1	5	
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (LPPD)	Persen	80	82	
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:					
1	Jumlah koperasi aktif	Unit Usaha	492	20	Diskopdagperin
2	Jumlah koperasi sehat	Unit usaha	75	75	
3	Jumlah koperasi binaan	Orang	100	50	
4	Jumlah koperasi modern	Orang	N/A	50	
5	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1317	100	
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	
PENANAMAN MODAL:					
1	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	1	3	DPMPSTP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
2	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	3	2	
3	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	1	2	
4	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	2	4	
5	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Media	2	2	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :					
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	Dispora
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	
STATISTIK :					
1	Jumlah Produsen Data	SKPD/NON SKPD	60	60	Diskominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	100	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan	Persen	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	evaluasi pembangunan daerah				
4	Jumlah Metadata Statistik	OPD/NON OPD	26	40	
	PERSANDIAN :				
1	Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan	Sertifikat TTE	997	1200	Diskominfo
	KEBUDAYAAN :				
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	143	143	
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya	24	24	
5	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	34.489	36.390	
	PERPUSTAKAAN :				
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	buku	26150	30150	
2	Jumlah Perpustakaan Binaan	perpustakaan	70	100	Dinas Arsip Perpus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
3	Jumlah SDM Perpustakaan Binaan	orang	70	100	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	8750	10000	
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD)	Persen	0	32,50	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	poin	0	6,85	
KEARSIPAN :					
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	85	90	Dinas Arsip Perpus
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	Orang	62	124	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD)	Box	0	5	
Layanan Urusan Pilihan					
PARIWISATA :					
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	Disporapar
2	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	Daya Tarik Wisata (DTW)	12	3	
3	Pembinaan Fasilitasi HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	50	
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	Orang	25	50	
PERTANIAN :					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	N/A	7,93	Diskatan
	Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Ekor	N/A	4678	
	Produksi Daging (Ton) :				
1	1. Daging Sapi	Ton	2.352	2.259	Diskannak
2	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1.430	1.348	
3	3. Daging Ayam Buras	Ton	591	648	
4	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1.777	1.479	
5	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	30.006	31.679	
	Produksi Telur (Ton) :				
6	1. Telur Ayam Buras	Ton	1.361	1.493	Diskannak
7	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	21.823	18.168	
8	3. Telur Itik	Ton	469	484	
9	Produksi Susu Sapi (Ton) :				
10	Susu Sapi Perah	Ton	18.402	18.979	
	Populasi Ternak (Ekor) :				
11	1. Sapi Perah	Ekor	7.278	7.943	
12	2. Sapi Potong	Ekor	30.631	30.559	
13	3. Kerbau	Ekor	4.647	4.678	
14	4. Domba	Ekor	136.620	133.79	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
15	5. Kambing	Ekor	7.725	7.718	
16	6. Ayam Buras	Ekor	634.796	696.545	
17	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.908.399	1.588.772	
18	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.814.651	4.027.412	
19	9. Itik	Ekor	74.710	75.836	
20	Bahan Pangan Asal Hewan (Ton)	Ton	-	Surplus	
21	Penanggulangan Kemiskinan (RTP)	RTP	304	731	
22	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	-	7	
	PERDAGANGAN :				
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	Diskopdagperin
2	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	
3	Nilai ekspor bersih perdagangan	USS	6.861.579	1.772.802	
4	Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	
5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	produk	N/A	50	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	PERINDUSTRIAN :				
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	Diskopdagperin
2	Pertumbuhan industri	Persen	13	2	
3	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	
	TRANSMIGRASI :				
1	Jumlah Translok yang diberdayakan	Orang	N/A	40	Disnakertrans
	KELAUTAN DAN PERIKANAN :				
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budiaya Ikan Kecil	Ton	24.567,65	28.500	Diskanak
2	Tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan (NTP)	Persen	102,75	104,2	
3	Tingkat produksi perikanan budidaya	Ton	24.567,65	28,5	
4	Cakupan kelompok pembudi daya ikan	Kelompok	700	1000	
5	Jumlah Rumah Tangga perikanan	Orang	12.238	23	
6	Pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis kearifan lokal	Unit	N/A	2	
7	Peningkatan Produksi Non Kosumsi	Persen	N/A	10.5	
8	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	350,95	420	
9	Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN)	Persen	102,95	102,75	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
10	Tingkat produksi perikanan tangkap	Ton	350,95	420	
11	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	13	20	
12	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	Orang	1,850	1.800	
13	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	210,59	250	
14	Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persen	102,10	101,5	
15	Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	210,59	250	
16	Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelompok	37	40	
17	Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar	Orang	1.750	3.000	
18	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	25	27	
19	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ha	200	200	
20	Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	200	200	
21	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	14	8	
22	cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	Kelompok	3	4	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH :				Setda
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	N/A	70-75	Barjas
2	Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	N/A	85	
3	Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang diinput pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	N/A	90	
4	Persentase Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek pembangunan	Persentase	N/A	80	Adpem
5	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase	N/A	80	Ekonomi
6	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD	Persentase	N/A	5	
7	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	N/A	85	
8	Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Level & Score	N/A	3,100	Tapem
9	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	N/A	84	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
10	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase	N/A	100	Hukum
11	Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan : Jumlah Bahan Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum	Persentase	N/A	>80	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi	Persentase	N/A	100	
13	Persentase Lembaga/ Organisasi Sosial/ Masyarakat/ Individu yang dibina dan difasilitasi	Persentase	20	20	Kesra
14	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	N/A	80	
15	Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan	Persentase	N/A	80	
16	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA	Persentase	N/A	80	Umum
17	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penaggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase	N/A	80	Perencanaan & Keuangan
18	Persentase Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah	Persentase	N/A	80	
19	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE	Persentase	N/A	80	
20	Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap	Persentase	N/A	80	Prokompim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	layanan keprotokolan				
21	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persentase	N/A	80	
22	Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi	Orang	N/A	750	
23	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien	Persentase	N/A	80	Organisasi
	Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN :				
1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	Persen	100	100	Bappeda
2	Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD	Persen	100	100	
3	Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Dokumen	4	4	
4	Dokumen Perencanaan (RPJP, RPD dan RKPD)	Dokumen	2	4	
	KEUANGAN :				
1	Penetapan APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
2	Persentase Laporan Aset Daerah	Persen	100	100	
1	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0.5	1	Bappeda
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	68	70	
3	Jumlah Layanan Pajak Daerah	WP	3630	800	
4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	89,98	95	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :				BKPSDM
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	57	57	
2	Indeks Sistem Merit	Point	282	290	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :				Bappeda
1	Kajian Isu Pembangunan	Dokumen	5	2	
2	Inovasi Daerah	Buah	1	1	
	SEKERTARIAT DEWAN :				Sekretariat DPRD
1	Pelayanan Administrator Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja	Ada/Tidak	Ada	Ada	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
	PENGAWASAN :				
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kuningan	Persen	71,65	70	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Persen	76,7	74	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	82,31	82	Inspektorat
4	Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	OPD	26	10	
5	Level SPIP	Level	3	2	
6	Capaian Nilai MCP	Nilai	91	70	
7	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :				
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	74,11*	75	Kesbangpol

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
			(2019)		
2	Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat	Orang	340	300	
3	Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	400	300	
4	Indeks Toleransi Beragama	Poin	72,39	70	
	Layanan Unsur Kewilayahan				
	KECAMATAN :				32 Kecamatan
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	63	64	Karangkancana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Karangkancana	Persen	63	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	190	195	
5	Jumlah KK Miskin	KK	300	309	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Karangkancana	Keluarga	70	60	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat	Orang	71	75	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	peningkatan kapasitas				
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	76	77	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	Karangkencana
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	83	84	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	251	252	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Ciniru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	90	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	78	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	815	820	
5	Jumlah KK Miskin	KK	409	390	
6	Jumlah keluarga miskin yang	Keluarga	380	350	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data	
	difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan					
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100		
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	97	97		
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92		
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1		
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90		
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	324	325		
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	40	60		Jalaksana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	90	70		
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di	Persen	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data	
	desa/Kelurahan dan Kecamatan					
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	302	302	302		
5	Jumlah KK Miskin	KK	7768	7768		
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7768	7768		
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	90	90		
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	168	168		
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100		
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	24	24		
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	600	600		
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	900	900		
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	93		Lebakwangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam	Persen	100	100		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	demokrasi politik di Kecamatan				
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	331	365	
5	Jumlah KK Miskin	KK	100	95	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1705	1875	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	155	155	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	Lebakwangi
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	450	470	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	Darma

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	umum yang diatasi				
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	
5	Jumlah KK Miskin	KK	6.125	5.500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	6.125	5.500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	150	200	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	Maleber
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	80	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	2148	2198	
5	Jumlah KK Miskin	KK	268	750	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	940	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	185	185	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	95	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati	Jenis	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	yang dilimpahkan kepada Camat				
11	Jumlah Pelayanan Adminsitration Non Perizinan	Pelayanan	957	1000	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	384	404	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	90	Ciwaru
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80	80	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	745	715	
5	Jumlah KK Miskin	KK	4294	3894	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	Ciwaru
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan	Persen	80	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan				
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11					
12	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130	
13	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	62	63	Pancalang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	62	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	128	140	
5	Jumlah KK Miskin	KK	342	308	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	66	50	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	77	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	76	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	Pancalang
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	85	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	251	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	75	80	Cimahi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	87	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	78	80	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1231	350	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	2415	1875		
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	60		
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	85		
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85		
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2		
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	245		
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	115	135		
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100		Kadugede
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam	Persen	-	85		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)				
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1500	1725	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3724	3500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	3724	3500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	120	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	80	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	79	81	Cibingbin
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	82	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	700	705	
5	Jumlah KK Miskin	KK	5854	5854	Cibingbin
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	5854	5854	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	200	200	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan	Persen	90	92	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	pemerintahan				
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsittrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	125	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	80	Cigandamekar
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.744	1.918	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7.096	6.386	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7.096	6.386	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat	Orang	107	117	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	peningkatan kapasitas				
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	490	500	Cigandamekar
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	301	331	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	70	70	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	Mandirancan
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	600	620	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1570	1410	
6	Jumlah keluarga miskin yang	Keluarga	700	750	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data	
	difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan					
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100		
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	130	130		
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92		
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2		
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	70	75		
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya(katagori Perizinan)	Dokumen	245	250		
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85		Japara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	60	65		
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Persen	75	77		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan				
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1007	1015	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3075	2767	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	480	500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	108	108	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	Garawangi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	umum yang diatasi				
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	550	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	Garawangi
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2415	1875	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	60	60	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	178	178	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	80	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Cilebak
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	75	80	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	237	262	
5	Jumlah KK Miskin	KK	415	400	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	109	109	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	79	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan	Persen	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	pemerintahan				
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	Cilebak
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	60	70	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	255	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Subang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat	Orang	105	105	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	peningkatan kapasitas				
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	Ciawigebang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	75	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102		
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520		
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100		
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312		
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90		
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2		
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515		
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280		
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	99	100		Cibeureum
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	95		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	77	93	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	0	
5	Jumlah KK Miskin	KK	576	500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	Cibeureum
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitras Non Perizinan	Pelayanan	85	90	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	210	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	Nusaherang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	umum yang diatasi				
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	75	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	90	90	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitration Non Perizinan	Pelayanan	100	125	Nusaherang
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	150	181	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	80	Kramatmulya
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	471	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	250	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	250	280	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				
1	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Cigugur
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	>90	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Cigugur	Lokasi	78	>78	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	5	5	Cigugur
6	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	
7	Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan	Keluarga	462	82	
8	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	90	
9	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	90	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
10	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	
11	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	107	316	
13	Jumlah Pelayanan Adminsitrase Non Perizinan	Pelayanan	2041	646	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Cidahu
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	72	82	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	350	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1.349	1.200	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1.290	1.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	144	150	Cidahu
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	300	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Hantara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	70	72	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	705	776	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1586	1427	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah	Keluarga	777	855	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	kecamatan				
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	172	172	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	80	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen			
					Pasawahan
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	76	
3	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Persen	80	82	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan				
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	156	159	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2051	1876	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	110	110	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	486	506	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (Kategori Perizinan)	Dokumen	568	588	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban	Persen	0	10	Cipicung

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	umum yang diatasi				
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	65	70	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	885	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1476	1358	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1476	1358	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	70	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	Cipicung
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	120	130	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	576	720	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	120	240	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Selajambe
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati	Jenis	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	yang dilimpahkan kepada Camat				
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	Selajambe
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Sindangagung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	85	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	3139	3139	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3898	3508	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	842	757	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	94	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	300	350	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	200	225	
1	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diatasi	Persen	100	100	Kuningan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	76	77	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	90%	>90%	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Kuningan	Lokasi	70	75	Kuningan
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	20	20	
6	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan	UMKM	32	32	
7	Jumlah KK Miskin	KK	8042	7882	
8	Jumlah keluarga miskin yang	Keluarga	1203	1180	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan				
9	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	80	90	
10	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	
11	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	
12	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	
13	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Dokumen	900	1000	
14	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Pelayanan	540	600	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	92	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	Cilimus
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di	Persen	75	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	desa/Kelurahan dan Kecamatan				
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.600	1,650	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2.838	2,500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2.520	2.600	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	507	507	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	Cilimus
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	299	310	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	Luragung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam	Persen	-	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)				
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	250	280	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	Kalimanggis
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	150	324	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	75	85	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh	Dokumen	100	130	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2022/2021*	Target 2024	Perangkat Daerah/ Penyedia Data
	Kecamatan setiap tahunnya				

Sumber: RPD Kab. Kuningan Tahun 2024-2026

BAB VII

PENUTUP

Penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 untuk pelaksanaan Tahun 2024, diawali dengan penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan penelaahan terhadap isu-isu strategis yang berkembang dengan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat proses penyusunan RKPD Tahun 2024 telah menerapkan asas perencanaan partisipatif. Selain itu perencanaan tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya serta memerhatikan dokumen perencanaan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024.

Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi.

Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 oleh perangkat daerah, antara lain:

- (1) RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 menjadi acuan perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- (2) RKPD merupakan wujud keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;

- (3) RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kuningan 2024; dan
- (4) Bappeda melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 dan melaporkannya kepada Bupati setiap triwulan, berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.